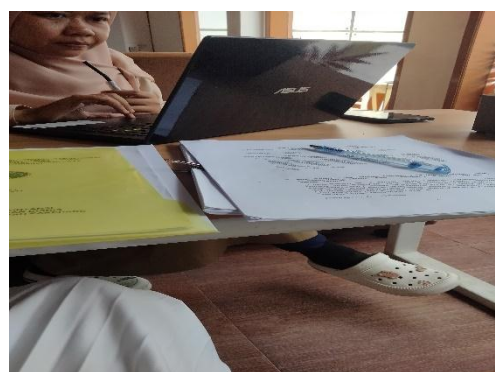
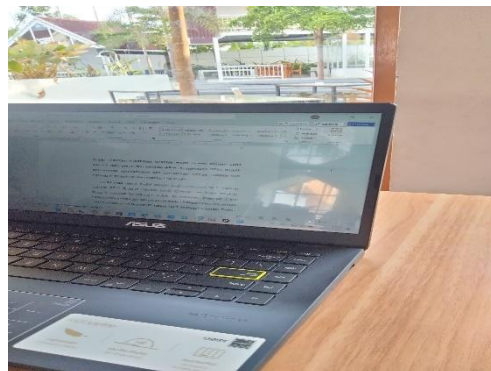


LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi



Lampiran 2 Formulir Isian Penilaian Kapabilitas APIP

FORMULIR ISIAN PENILAIAN MANDIRI KAPABILITAS APIP

ELEMEN I : PERAN DAN LAYANAN

Level 2	Key process Area	No	Uraian/Pernyataan	Penjelasan Pernyataan	Contoh Infrastruktur	Pilihan Jawaban		
						Ya	Sebagian	Tidak
APIP memberikan jasa Audit Ketaatan (compliance auditing)	1. APIP melaksanakan audit kepatuhan terhadap suatu area, proses, atau sistem untuk menilai kesesuaiannya dengan peraturan yang berlaku, termasuk kebijakan, rencana, prosedur, hukum, peraturan, kontrak, atau kriteria lain yang mengatur pelaksanaan area, proses, atau sistem tersebut.	1	Kami telah melaksanakan kegiatan pengawasan dalam bentuk audit atas transaksi atau dokumen tertentu untuk memastikan keakuratan perhitungan serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.	Auditor telah menerapkan prosedur audit standar, seperti vouching dan tracing, untuk menilai ketepatan perhitungan serta memastikan kepatuhan suatu area, proses, atau sistem terhadap peraturan yang berlaku, termasuk kebijakan, rencana, prosedur, hukum, kontrak, dan kriteria lainnya.	Pedoman, SOP, atau juklak mengenai pelaksanaan penugasan audit mencakup seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan hasil audit.			
		2	Kegiatan pengawasan yang kami lakukan bersifat audit kepatuhan (compliance auditing).	PKPT/PKAT memuat rencana audit untuk menilai kesesuaian antara kondisi yang ada dengan kriteria yang ditetapkan. Audit kepatuhan mencakup audit terhadap transaksi keuangan, audit terkait kelayakan pengambilan keputusan administratif, serta setiap audit yang menggunakan pendekatan berbasis proses.	PKPT yang berfokus pada prioritas manajemen/risiko tinggi dengan tujuan auditing kepatuhan.			
		3	Kami sudah memiliki internal audit charter yang menjelaskan mengenai jenis jasa assurance yang dapat diberikan oleh APIP saat ini, yaitu audit kepatuhan (compliance auditing).	Terdapat Internal Audit Charter (IAC) yang menjelaskan jasa assurance yang dapat diberikan APIP, yaitu audit kepatuhan. IAC memuat visi, misi, tujuan, kewenangan, tanggung jawab, independensi, akses, kerahasiaan, ruang lingkup audit, standar, hubungan dengan audit eksternal, dan pelaporan audit. IAC dibuat untuk memastikan komitmen pimpinan organisasi agar: 1) ruang lingkup tugas APIP tidak terbatas; 2) sumber daya pengawasan intern terjamin; 3) akses informasi yang dibutuhkan pengawasan intern terjamin.	Internal audit charter mencakup layanan penjaminan dari APIP berupa audit kepatuhan (compliance auditing), yang memastikan bahwa organisasi mematuhi peraturan dan kebijakan yang berlaku.			

		4	Setiap tim yang melaksanakan tugas pengawasan telah menyusun rencana dan program kerja audit di tingkat tim secara terstruktur, yang mencakup pengidentifikasian kriteria yang relevan, pendokumentasian survei pengendalian intern, penentuan sasaran, ruang lingkup, dan metodologi pengawasan, serta pengembangan rencana audit yang rinci.	Setiap tim yang melaksanakan tugas pengawasan telah menyusun rencana dan program kerja audit di tingkat tim audit, sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah. Pengendalian mutu terhadap penyusunan rencana dan program tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Pedoman/SOP/Juklak tentang Pelaksanaan Penugasan sejak perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil audit.			
		5	Kami telah melaksanakan tugas pengawasan yang mencakup penerapan prosedur pengawasan yang terperinci, penyusunan kertas kerja (KKA) terkait prosedur yang dilaksanakan beserta hasil-hasilnya, evaluasi terhadap informasi yang diperoleh, penyusunan simpulan yang jelas, serta pengembangan rekomendasi.	(1) Auditor telah melaksanakan prosedur audit untuk memverifikasi kesesuaian dan kepatuhan antara kondisi yang ada dengan kriteria yang berlaku, seperti prosedur analitis, konfirmasi, dan pemeriksaan fisik. (2) Setiap prosedur audit yang dilakukan, baik yang dilaksanakan maupun yang tidak dilaksanakan, telah didokumentasikan dengan jelas, contohnya: KKA yang merujuk pada nomor PKA dan PKA yang merujuk pada nomor KKA. (3) Auditor telah melakukan evaluasi terhadap informasi yang diperoleh. (4) Auditor menyusun kesimpulan yang didasarkan pada bukti-bukti relevan yang tercatat dalam KKA. (5) Auditor mengembangkan rekomendasi yang bertujuan untuk mengatasi penyebab masalah yang ditemukan. (6) Penggunaan kartu kendali mutu dan pelaksanaan supervisi juga diterapkan.	Pedoman /SOP/Juklak tentang Pelaksanaan Penugasan sejak perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil audit.			

		6	Kami telah menyusun laporan untuk menyampaikan hasil dari penugasan pengawasan.	(1) LHA disusun sesuai dengan pedoman kendali mutu audit aparat pengawasan instansi pemerintah—prosedur pengendalian mutu pelaporan audit, yang mencakup penyusunan konsep LHA oleh ketua tim dengan bantuan anggota tim berdasarkan hasil audit yang terdokumentasi dalam KKA dan temuan audit yang sudah dikomunikasikan dengan auditi. (2) Konsep LHA diperiksa kembali oleh pengendali teknis. (3) Konsep LHA direvisi oleh pengendali mutu atau pimpinan APIP. (4) LHA final didistribusikan kepada pihak-pihak yang berwenang. (5) Terdapat mekanisme pemantauan tindak lanjut sesuai dengan pedoman kendali mutu audit aparat pengawasan instansi pemerintah.	Pedoman/SOP/Juklak/ tentang Pelaksanaan penugasan sejak perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil audit.			
		7	Melalui audit yang kami lakukan, kami dapat memberikan keyakinan yang cukup bahwa area/proses/sistem yang diaudit telah mematuhi ketentuan yang berlaku, seperti kebijakan, rencana, prosedur, hukum, peraturan, kontrak, atau kriteria lainnya.	(1) Perencanaan pengawasan di tingkat tim audit telah disusun sesuai dengan pedoman kendali mutu audit bagi aparat pengawasan instansi pemerintah. (2) Prosedur atau langkah-langkah audit yang tercantum dalam program kerja audit telah dilaksanakan sesuai dengan tujuannya. (3) Mekanisme pelaporan dan tindak lanjut telah dilakukan sesuai dengan pedoman kendali mutu audit bagi aparat pengawasan instansi pemerintah. (4) LHA menunjukkan bahwa area, proses, atau sistem yang diaudit telah sesuai	Pedoman/SOP/Juklak/ tentang pelaksanaan penugasan sejak perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil audit.			

				dengan ketentuan pelaksanaannya.				
		8	Audit ketaatan yang kami lakukan telah berhasil mencegah dan mendeteksi tindakan ilegal serta penyimpangan yang berkaitan dengan kebijakan, prosedur, atau persyaratan kontrak yang berlaku.	(1) Perencanaan pengawasan oleh tim audit telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman kendali mutu audit aparat pengawasan instansi pemerintah. (2) Prosedur atau langkah-langkah yang dituangkan dalam program kerja audit telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. (3) Mekanisme pelaporan dan tindak lanjut telah sesuai dengan pedoman kendali mutu audit aparat pengawasan instansi pemerintah.	Pedoman/SOP/Juklak/ tentang pelaksanaan penugasan sejak perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil audit.			
		9	Rekomendasi yang kami berikan telah diteruskan untuk ditindaklanjuti.	(1) Perencanaan pengawasan oleh tim audit telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman kendali mutu audit aparat pengawasan instansi pemerintah. (2) Prosedur atau langkah-langkah yang dituangkan dalam program kerja audit telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. (3) Mekanisme pelaporan dan tindak lanjut telah sesuai dengan pedoman kendali mutu audit aparat pengawasan instansi pemerintah.	Pedoman/SOP/Juklak/ tentang pemantauan Tindak Lanjut.			
Level 3								
APIP melaksanakan <i>Value For Money</i> Audit/Program Evaluasi	1. APIP melakukan evaluasi dan pelaporan terkait efisiensi, efektivitas, dan penghematan (dalam operasi, aktivitas, atau program), serta aspek-aspek yang berhubungan dengan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian, serta pencapaian hasil yang diperoleh.	10	Kegiatan pengawasan yang kami lakukan meliputi evaluasi terhadap efisiensi, efektivitas, dan penghematan dalam operasional, aktivitas, atau program organisasi (K/L/Pemda) serta pencapaian hasil-hasil yang telah diperoleh.	PKPT/PKAT berisi rencana audit untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan kehematan dari operasi, aktivitas atau program auditi.	PKPT berbasis risiko dengan sasaran audit 3E dan <i>advisory services</i> .			

		11	Kegiatan pengawasan lainnya, seperti evaluasi, reviu, dan pemantauan, yang kami lakukan berkaitan dengan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian.	PKPT/PKAT berisi rencana audit untuk melakukan penugasan pengawasan lain (evaluasi, reviu, pemantauan) terkait dengan tata Kelola/manajemen risiko/pengendalian.	PKPT berbasis risiko dengan sasaran audit 3E dan <i>advisory services</i> .			
		12	Kami telah memiliki Internal Audit Charter yang menjelaskan mengenai jenis layanan assurance yang dapat diberikan oleh APIP saat ini, yaitu audit value for money (audit atas ekonomis, efisiensi, dan efektivitas 3E) serta evaluasi program/kebijakan.	Terdapat IAC yang didalamnya mengungkapkan mengenai sifat jasa assurance yang dapat diberikan APIP saat ini, yaitu value for money audit (audit atas ekonomis, efisiensi, efektivitas (3E)/ evaluasi program/evaluasi kebijakan).	<i>Internal Audit Charter</i> (yang mencakup layanan <i>audit kinerja-3E</i> , <i>pemberian layanan advisory</i>).			
		13	Pengawasan yang telah kami lakukan berhasil mendorong perbaikan dalam tata kelola, manajemen risiko, serta proses pengendalian organisasi (KL/Pemda).	(1)PKA, KKA, dan LHA untuk tujuan tersebut disusun sesuai dengan Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah. (2)Rekomendasi sudah sesuai dengan pedoman kendali mutu audit aparat pengawasan instansi pemerintah dan dapat ditindaklanjuti.	Pedoman/panduan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan atas Audit 3E, pemberian <i>layanan Advisory</i> .			
		14	Kami telah memberikan kontribusi terhadap perubahan yang mengarah pada peningkatan efektivitas, efisiensi, dan kinerja organisasi.	(1)PKA, KKA, dan LHA untuk tujuan tersebut disusun sesuai dengan Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah. (2)Rekomendasi sudah sesuai dengan pedoman kendali mutu audit aparat pengawasan instansi pemerintah dan dapat ditindaklanjuti.	Pedoman/panduan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan atas Audit 3E, pemberian <i>layanan Advisory</i> .			
		15	Kegiatan pengawasan yang kami laksanakan telah berhasil mengurangi besaran atau dampak dari risiko organisasi yang mungkin terjadi.	(1) PKA, KKA, dan LHA untuk tujuan tersebut disusun sesuai dengan Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah. (2) Rekomendasi sudah sesuai dengan pedoman kendali mutu audit aparat pengawasan instansi	Pedoman/panduan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan atas Audit 3E, pemberian <i>layanan Advisory</i> .			

				pemerintah dan dapat ditindaklanjuti.				
APIP memberikan Jasa Advis (<i>Advisory Services</i>)	1. APIP melakukan analisis terhadap kondisi dan situasi yang ada, serta memberikan pedoman dan nasihat kepada manajemen. Layanan advis yang diberikan bertujuan untuk meningkatkan nilai tanpa menggantikan tanggung jawab manajemen. Layanan advis tersebut disalurkan melalui fasilitas, bukan sebagai bentuk penjaminan, yang mencakup pelatihan, tinjauan pengembangan sistem, penilaian mandiri atas pengendalian dan kinerja, konseling, serta pemberian nasihat.	16	Kami telah melaksanakan tugas pengawasan dengan memberikan jasa advis tanpa mengambil alih tanggung jawab manajemen, yang mencakup pelatihan, tinjauan pengembangan sistem, penilaian pengendalian mandiri (control self assessment/CSA), serta penilaian kinerja mandiri, konseling, dan pemberian nasihat.	(1) PKPT/PKAT berisi rencana APIP untuk melakukan pemberian jasa advis (misalnya; APIP melakukan reviu laporan keuangan, tetapi tidak boleh ikut Menyusun laporan keuangan tersebut. (2) Mekanisme pemberian jasa advis tersebut diatur dalam pedoman atau panduan atau SOP.	PKPT berbasis risiko dengan sasaran audit 3E dan <i>Advisory services</i> .			
		17	Kami sudah memiliki Internal Audit Charter yang menguraikan sifat layanan konsultasi yang dapat diberikan oleh APIP saat ini, serta mencantumkan berbagai jenis layanan advisory yang dapat dilaksanakan oleh APIP.	Terdapat IAC yang didalamnya mengungkapkan mengenai sifat jasa pemberian saran (advisory services) yang dapat diberikan APIP saat ini, dan mencantumkan jenis-jenis advisory services yang dapat dilakukan APIP saat ini.	<i>Internal Audit Charter</i> (yang mencakup layanan <i>audit kinerja-3E</i> , <i>pemberian layanan advisory</i>).			
		18	Jasa konsultasi kami memberikan kontribusi yang bernilai tambah bagi organisasi.	(1) Mekanisme pemberian jasa advis sudah sesuai dengan panduan/pedoman/SOP. (2) Terdapat rekomendasi yang memberikan nilai tambah bagi organisasi.	Pedoman/panduan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan atas Audit 3E, pemberian <i>layanan Advisory</i> .			
		19	Kami telah melaksanakan praktik-praktik yang memastikan bahwa independensi dan obyektivitas kami tetap terjaga selama pemberian jasa advis.	(1) Mekanisme pemberian jasa advis sudah sesuai dengan panduan/pedoman/SOP. (2) Pembuktian adanya independensi dan obyektivitas dapat diperoleh melalui pernyataan independensi dan obyektivitas yang dibuat oleh auditor, dan juga dapat ditambahkan dari "kuesioner pengguna" setelah selesainya pemberian jasa advis (bila memungkinkan).	Surat pernyataan independensi dan obyektivitas auditor dan kuesioner kepuasan pelanggan.			
Level 4								
APIP memberikan jaminan	1. APIP telah melaksanakan kegiatan pengawasan secara menyeluruh untuk memberikan	20	Kami telah melakukan audit terhadap manajemen risiko di					

menyeluruh atas tata Kelola, manajemen risiko, dan pengendalian organisasi.	opini terkait efektivitas dan kecukupan tata kelola organisasi, manajemen risiko, serta proses pengendalian.		seluruh lingkup organisasi (<i>enterprise wide risk</i>).					
	2. APIP telah mengoordinasikan kegiatan pengawasannya dengan baik, sehingga dapat memberikan jaminan yang memadai bahwa seluruh proses dalam organisasi telah berjalan dengan cukup dan berfungsi sesuai harapan untuk mencapai tujuan organisasi.	21	Kami telah melakukan pengujian terhadap kewajaran asersi manajemen mengenai keefektifan tata kelola, manajemen risiko, dan proses pengendalian.					
		22	Kami telah memiliki Internal Audit Charter yang di dalamnya mencakup kewenangan untuk memberikan opini mengenai organisasi secara keseluruhan, termasuk efektivitas tata kelola, manajemen risiko, dan proses pengendalian.					
		23	Kami telah menyusun perencanaan pengawasan dengan pendekatan berbasis risiko.					
		24	Pimpinan instansi (K/L/Pemda) serta pemangku kepentingan kami meyakini bahwa tata kelola organisasi, manajemen risiko, dan proses pengendalian yang diterapkan telah memberikan jaminan yang cukup untuk mencapai tujuan organisasi.					
Level 5								
Internal Auditing dianggap sebagai agen perubahan kunci	1. APIP telah cukup mengembangkan kapasitas kepemimpinan dan profesionalisme untuk dapat memberikan pandangan-pandangan ke depan dan bertindak sebagai katalis guna menghasilkan perubahan positif dalam organisasi.	25	Kegiatan pengawasan kami telah dapat memberikan jaminan memadai dan pemberian saran (<i>advisory services</i>) termasuk cakupan audit pada area tata kelola, pengendalian Tingkat entitas, kecurangan, usulan strategi baru, program atau praktek bisnis yang dibutuhkan oleh organisasi.					
		26	Kami telah melakukan <i>update</i> atas <i>internal audit charter</i> yang mencakup perluasan peran					

			dan ruang lingkup kegiatan pengawasan.				
		27	Kami telah memiliki kapasitas kepemimpinan dan profesionalisme yang maju sehingga dapat berperan sebagai katalis, agen perubahan dan mampu memberikan prediksi ke depan untuk mendorong perubahan positif bagi organisasi.				
		28	Kami telah menggunakan manajemen risiko organisasi secara keseluruhan (<i>Enterprise Risk Management</i>) sebagai suatu kesatuan dari strategi APIP.				
		29	Focus strategi kami ditekankan pada inovasi, layanan kepada pemangku kepentingan dan pemberian nilai.				
		30	Kami berperan penting (<i>key player</i>) dalam memberikan kontribusi bagi penentuan visi organisasi dalam menanggapi kebutuhan intern maupun ekstern organisasi.				

FORMULIR ISIAN PENILAIAN MANDIRI KAPABILITAS APIP

ELEMEN II : PENGELOLAAN SDM

Key process Area	No	Uraian/Pernyataan	Penjelasan Pernyataan	Contoh Infrastruktur	Pilihan Jawaban		
					Ya	Sebagian	Tidak
Level 2							
APIP mengidentifikasi dan merekrut orang-orang yang kompeten.	1) Kegiatan pengawasan dilaksanakan oleh auditor yang memiliki kompetensi yang relevan.	1	Kami telah mengidentifikasi kompetensi (pengetahuan, keahlian, teknis, sikap) dan kompetensi lain yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan pengawasan yang telah direncanakan.	APIP memiliki dokumen hasil identifikasi atas kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan pengawasan yang telah direncanakan.	- Peta Kompetensi SDM (Data pegawai termasuk kompetensinya). - SOP penyusunan peta kompetensinya.		

		2	Kami telah memiliki uraian jabatan (job description) untuk setiap posisi jabatan di unit kerja kami yang disusun berdasarkan analisis jabatan dan dievaluasi secara berkala.	Terdapat dokumen uraian jabatan untuk setiap posisi jabatan pada APIP. Uraian jabatan berisi: Uraian pekerjaan, (tanggung jawab), wewenang, deskripsi, pekerjaan, dll); Ukuran kinerja yang dipersyaratkan sebagai indikator terhadap keberhasilan menyelesaikan tanggung jawab utama jabatan; persyaratan jabatan (<i>job requirement</i>).	Uraian jabatan (termasuk peraturan pemberlakuannya).			
		3	Kami telah menentukan klasifikasi pemberian tunjangan untuk setiap posisi jabatan di unit kerja kami.	APIP telah Menyusun klasifikasi pemberian insentif bagi staf APIP sesuai dengan uraian jabatan, kompetensi, pengalaman, dan kinerja; dan telah mengusulkannya kepada pimpinan K/L/Pemda.	Klasifikasi pemberian tunjangan untuk setiap posisi jabatan di unit kerja APIP.			
		4	Proses rekrutmen kami telah dapat memperoleh pegawai yang kompeten (memenuhi persyaratan pengetahuan, keahlian, dan kompetensi lain yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengawasan intern).	1) APIP memiliki auditor dengan jumlah sesuai yang diperlukan dan dengan kualitas sesuai dengan hasil identifikasi kompetensi. 2) Terdapat dokumen permintaan staf yang dibutuhkan berdasarkan hasil identifikasi kompetensi.	Penghitungan kebutuhan auditor dan SDM APIP beserta panduan rekrutmen.			
		5	Kegiatan pengawasan intern yang kami lakukan sudah memenuhi kecermatan profesi (<i>due professional care</i>) dan menghasilkan temuan, simpulan, dan rekomendasi yang bermutu.	1) Seluruh penugasan pengawasan dilaksanakan oleh auditor yang kompeten (kompeten dapat dilihat dari apakah yang sudah memiliki sertifikasi aditor dan atau sertifikasi profesi internal auditor lainnya. Bila belum bersertifikat (sambil yang menunggu proses sertifikasi), latar belakang Pendidikan yang adalah akuntansi atau pernah mengikuti diklat terkait kegiatan pengawasan yang dilakukan. 2) Apabila penugasan pengawasan menggunakan tenaga ahli dari luar APIP, sudah dilakukan supervise dengan semestinya.	Kebijakan rekrutmen dan <i>staffing</i> pegawai.			

APIP telah melakukan pengembangan profesi bagi individu auditor	1) APIP telah memastikan bahwa auditor di lingkungannya secara berkelanjutan mempertahankan dan meningkatkan kapabilitas profesional mereka.	6	Kami telah memiliki dokumen tertulis yang memuat rencana training, misalnya rencana Pendidikan dan pelatihan bagi setiap auditor dan rencana PPM/PKS, dan lain-lain.	Terdapat dokumen rencana diklat bagi setiap auditor, meliputi jenis dan jumlah diklat, penyelenggara diklat, waktu diklat, anggaran dan SDM yang akan ikut diklat.	Panduan /Petunjuk penyusunan rencana dan penyelenggara <i>training</i> . Dokumen rencana/usulan <i>training</i> (diklat, PPM/PKS,dll) bagi setiap individu.			
		7	Kami telah mendorong setiap auditor untuk menjadi anggota profesi.	Bentuk dorongan tersebut antara lain: APIP menyediakan anggaran khusus untuk menjadi anggota profesi, atau adanya pemberian ijin kepada auditor untuk menghadiri acara acara yang diselenggarakan oleh profesi seperti diklat, seminar, ujian bersertifikat profesi, workshop, dll.	Nota dinas/Surat edaran tentang kesempatan untuk mengikuti kegiatan yang diselenggarakan organisasi profesi.			
		8	Kami telah memantau dan mendokumentasikan untuk memastikan bahwa kebutuhan training setiap auditor telah terpenuhi, serta membuat laporannya.	Terdapat laporan periodic yang berisi daftar training yang telah diikuti oleh setiap auditor.	Laporan penyelenggaraan training (diklat,PPM/PKS, dll), dalam rangka memantau pemenuhan kompetensi setiap individu pegawai terkait dengan PKPT yang akan dilakukan.			
		9	Kami telah meyakini bahwa kompetensi (keahlian, pengetahuan dan perilaku) pada semua posisi telah memadai untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi kami.	1) APIP memiliki dokumen hasil identifikasi atas kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan pengawasan yang telah direncanakan. 2) Rekrutmen auditor telah sesuai dengan usulan permintaan staf yang dibutuhkan.	Pelaporan pemantauan kompetensi setiap individu.			
		10	Setiap auditor memiliki komitmen untuk terus menerus meningkatkan kompetensi profesionalnya.	Kecukupan angka kredit pengembangan profesi untuk setiap auditor.	Pelaporan pemantauan kompetensi setiap individu.			
		11	Pelaksanaan pengawasan dilaksanakan oleh pejabat yang memiliki sertifikasi di bidang pengawasan internal pemerintah.	Seluruh auditor telah bersertifikasi JFA.	Peta kompetensi.			
		12	Kami telah Menyusun perencanaan jumlah jam pelatihan minimal bagi setiap auditor yang harus dipenuhi setiap tahunnya sesuai dengan aturan yang berlaku.	APIP merencanakan kegiatan PKS, seminar, workshop, diklat, dll untuk setahun.	Dokumen rencana/usulan training (diklat, PPM/PKS, dll) bagi setiap individu.			

LEVEL 3								
Adanya koordinasi satuan tugas SDM APIP (<i>workforce</i>).	1) APIP telah melakukan penyalarsan PKPT dengan mempertimbangkan sumber daya manusia yang dimiliki.	13	Kami telah mengestimasi jumlah dan ruang lingkup kegiatan audit dan kegiatan pengawasan lainnya dan membandingkan dengan jumlah dan keahlian SDM yang tersedia.	Terdapat dokumen hasil mapping jumlah SDM dan kompetensi yang dibutuhkan dengan yang tersedia pada APIP untuk melihat adanya <i>compelency gap</i> .	Peta kompetensi pegawai.			
		14	PKPT yang kami susun telah memperhatikan skala prioritas dengan mengoptimalkan sumber daya manusia yang tersedia.	PKPT/PKAT dilengkapi dengan susunan tim auditor.	• PKPT berbasis risiko dengan sasaran audit 3E dan <i>advisory services</i>. • SOP penyusunan PKPT berbasis risiko.			
		15	Kebijakan organisasi APIP telah mendukung koordinasi satuan tugas.	Terdapat SK pimpinan APIP terkait koordinasi satuan tugas.	Kebijakan organisasi yang mendukung pengoptimalan tim audit misalnya penugasan lintas inspektorat/irban, pola hubungan tim, dll.			
Tersedianya staf APIP yang berkualifikasi professional.	1) Semua pegawai APIP adalah pegawai berkompeten dalam bidangnya.	16	Kami memiliki kerangka kompetensi setiap jabatan yang mencakup pola pengembangan karir dan kriteria penilaian kinerja.	Kerangka kompetensi auditor APIP disusun merujuk ke Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengembangan Kompetensi dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Auditor.	Kerangka kompetensi pegawai.			
		17	Kami mempunyai rencana pelatihan dan pengembangan setiap pegawai yang berpedoman pada kerangka kompetensi.	Rencana pelatihan dan pengembangan pegawai merujuk ke diklat sertifikasi JFA dan diklat teknis susbtansi yang dikembangkan Pusdiklatwas BPKP maupun dikembangkan sendiri oleh APIP.	Dokumen rencana training untuk memenuhi kompetensi pelaksanaan audit 3E dan jasa <i>advisory</i> .			
		18	Kami mempunyai program pengembangan sertifikasi jabatan fungsional auditor.	Terdapat anggaran untuk program pengembangan sertifikasi jabatan fungsional auditor merujuk ke kalender diklat sertifikasi JFA. Apabila perolehan sertifikasi tersebut dibiayai sendiri oleh audtor maka APIP mendukungnya dalam bentuk pemberian ijin pelatihan maupun perolehan sertifikasi.	Dokumen rencana training untuk memenuhi kompetensi pelaksanaan audit 3E dan jasa <i>advisory</i> .			
		19	Kami mempunyai program untuk perolehan sertifikasi profesi internal auditor seperti QIA, CIA, CGAP, CFE, dll.	Terdapat anggaran untuk program perolehan sertifikasi. Apabila perolehan sertifikasi tersebut dibiayai sendiri oleh auditor maka APIP mendukungnya dalam bentuk	Dokumen rencana training untuk memenuhi kompetensi pelaksanaan audit 3E dan jasa <i>advisory</i> .			

				pemberian ijin pelatihan maupun perolehan sertifikat.				
		20	Kami telah mekanisme pemberian reward/penghargaan bagi pegawai yang berkinerja memuaskan atau terbaik pada setiap tingkatan.	Terdapat dokumen yang menjelaskan kebijakan pemberian <i>reward</i> tersebut.	• Klasifikasi pemberian <i>reward</i>. • Klasifikasi pemberian tunjangan untuk setiap posisi jabatan di Unit Kerja APIP dikaitkan dengan kinerja system penilaian kinerja tahunan.			
		21	Kami telah menentukan kombinasi keahlian dan jenjang jabatan auditor yang diperlukan saat ini, dan menilai apakah dapat dilakukan pengembangan kemampuan auditor secara internal atau melalui kerja sama dengan pihak lain (<i>co-sourcing</i>) maupun melimpahkan pekerjaan kepada pihak lain (<i>out sourcing</i>).	Terdapat dokumen hasil analisis kekuatan sumber daya APIP terhadap beban kerja APIP.	Dokumen hasil analisis kekuatan sumber daya APIP terhadap beban kerja APIP.			
		22	Semua posisi telah dijabat oleh pegawai yang kompeten di bidangnya.s	Seluruh staf yang melaksanakan penugasan pengawasan telah memiliki sertifikasi JFA dan atau sertifikasi profesi internal auditor lainnya. Bila belum bersertifikat (sambil dengan menunggu proses sertifikasi), latar belakang Pendidikan yakni adalah akuntansi atau pernah mengikuti diklat terkait kegiatan pengawasan yang dilakukan.	Dokumen peta kompetensi pegawai.			
		23	Kami telah mempunyai metode yang sistematis untuk penilaian kinerja bagi setiap individu secara adil dan transparan yang berpedoman pada kerangka kompetensi.	Terdapat Satuan Kinerja Individu (SKI)/ Satuan Kinerja Pegawai (SKP).	Dokumen SKI atau SKP untuk seluruh Auditor.			
		24	Kami telah memiliki system pengembangan karier (promosi, rotasi, dan mutasi) dengan membandingkan kinerja auditor dengan kinerja yang diharapkan.	1) System pengembangan karier mengacu pada SKI. 2) Pola karier auditor jelas (promosi, rotasi, dan mutasi sesuai dengan kinerja auditor, bukan acak).	Kebijakan rotasi dan mutasi internal APIP yang sehat dan berpola.			
Adanya kompetensi dan <i>team building</i> .	1. Adanya pengembangan kemampuan individu untuk dapat bekerja dalam tim secara efektif.	25	Kami telah memiliki mekanisme komunikasi dan koordinasi tim audit.	Pola komunikasi dan koordinasi tim audit mengacu pada Pedoman Kendali Mutu	Nota Dinas/Memo/SE Tentang Penyelenggaraan komunikasi Internal APIP.			

				Audit Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah.				
		26	Kami telah memiliki kriteria untuk praktek dan perilaku kerja tim yang efektif yang dicantumkan pada kerangka/standar kompetensi.	Kerangka kompetensi auditor APIP mencantumkan kriteria untuk praktek dan perilaku kerja tim yang efektif.	Kerangka kompetensi pegawai.			
		27	Kami telah memiliki program pengembangan kompetensi tim seperti kepemimpinan tim, komunikasi yang efektif, kerja sama tim, Pembangunan hubungan dalam tim.	Terdapat kebijakan pimpinan APIP terkait dengan pengembangan kompetensi tim.	Dokumen rencana training untuk memenuhi kompetensi pelaksanaan audit 3E dan jasa advisory.			
		28	Kami telah mempunyai pedoman tata laksana tim audit yang menetapkan dengan jelas dan tegas tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan dari para anggota tim audit.	Terdapat pedoman tata laksana tim audit (dokumentasi pola hubungan internal tim audit), bisa berupa SK pimpinan APIP, SOP kegiatan pengawasan.	Kebijakan organisasi yang mendukung pengoptimalan tim audit misalnya penugasan lintas inspektorat/irban, pola hubungan tim, dll.			
		29	Kami telah memiliki mekanisme pemberian penghargaan bagi tim yang berhasil menerapkan perilaku yang diharapkan.	Terdapat dokumentasi atas kebijakan pimpinan APIP terkait pemberian penghargaan bagi tim.	Kebijakan pemberian penghargaan berbasis tim.			
		30	Kami telah mengembangkan setiap personal dalam tim untuk selalu siap berganti peran (<i>assurance</i> dan <i>consulting</i>) seiring dengan perubahan organisasi.	Terdapat dokumen evaluasi pelaksanaan penugasan dan dokumen rencana pengembangan pegawai berdasarkan hasil evaluasi tersebut.	Dokumen rencana training untuk memenuhi kompetensi pelaksanaan audit 3E dan jasa advisory.			
		31	Kami memiliki tim-tim yang produktif yang saling berbagi pengetahuan dan pengalaman.	Terdapat forum untuk memberi kesempatan saling berbagi antar tim (dibuktikan dengan adanya notulen/laporan).				
		32	Kami telah memberikan kesempatan kepada staf kami untuk mengembangkan kemampuan individu dan profesinya dalam hal komunikasi, kepemimpinan dan pengembangan hubungan kerja.	Terdapat dokumen rencana pengembangan pegawai.				
LEVEL 4								
Perencanaan satuan kerja SDM APIP (<i>workforce planning</i>)	1. APIP mengkoordinasikan seluruh SDM yang ada untuk dapat melaksanakan tupoksinya. Termasuk merencanakan sumber daya, keahlian, pelatihan dan sarana yang dibutuhkan untuk melaksanakan penugasan pengawasan.	33	Kami memiliki perencanaan penugasan tahunan yang dapat merencanakan pegawai dengan kompetensi, penugasan, dan penggunaan perangkat, serta pada saat yang tepat untuk menangani area-area penting yang berisiko (sebagaimana telah	Perencanaan penugasan tahunan memastikan pegawai dengan kompetensi yang sesuai, perangkat yang diperlukan, dan waktu yang tepat untuk menangani area berisiko berdasarkan audit berbasis risiko.	Sistem Audit Berbasis Risiko (<i>Audit Management System</i>), Database Kompetensi Pegawai (SIMPEG), Perangkat Pendukung Audit (Srikandi, ACL, IDEA), dan Dashboard Monitoring Audit.			

			diidentifikasi dalam perencanaan audit berbasis risiko) pada organisasi K/L/Pemda.				
		34	Kami telah melakukan Analisis kesenjangan kompetensi yang kami miliki saat ini dengan yang kami butuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas saat ini dan beberapa tahun mendatang.	Analisis kesenjangan kompetensi membandingkan keterampilan saat ini dengan yang dibutuhkan untuk tugas sekarang dan mendatang.	Sistem Manajemen Pelatihan (<i>e-learning, workshop</i>), Pusat Pengembangan SDM (pelatihan pegawai), Sistem Informasi Kepegawaian (pemetaan keterampilan), <i>Program Mentoring</i> (bimbingan pegawai), dan Sistem Evaluasi Kinerja (umpan balik kompetensi).		
		35	Kami telah mengomunikasikan prioritas dan strategi untuk mengatasi kesenjangan kompetensi beberapa tahun mendatang kepada pimpinan K/L/Pemda dan para pemangku kepentingan utama, terutama jika keseluruhan rencana kegiatan pengawasan berkala tidak dapat dilakukan.	Menegaskan bahwa strategi dan prioritas untuk mengatasi kesenjangan kompetensi telah dikomunikasikan kepada pimpinan K/L/Pemda dan pemangku kepentingan utama, terutama jika pengawasan berkala tidak dapat dilakukan.	Sistem Manajemen Kompetensi, Pusat Pelatihan SDM, Forum Konsultasi, E-Learning dan Kolaborasi BPKP.		
		36	Kami telah memiliki SDM dengan kapasitas yang cukup memuaskan dari segi kompetensi, jumlah personal, dan sarana untuk dapat menyelesaikan seluruh rencana kegiatan pengawasan berkala yang menjadi tanggung jawab kami.	Mengindikasikan bahwa organisasi memiliki sumber daya manusia (SDM) yang memadai baik dari segi kompetensi, jumlah, maupun fasilitas pendukung. Dengan SDM yang cukup dan didukung oleh sarana yang memadai, organisasi dapat menjalankan tugas pengawasan secara efektif sesuai rencana yang telah ditetapkan.	Sarana Teknologi, Akses Data dan Jaringan, Fasilitas Kantor Transportasi, Dokumentasi dan Arsip.		
APIP mendukung organisasi profesi	1. APIP memberikan kesempatan bagi staff auditor untuk mengembangkan profesionalisme dan kepemimpinan melalui keterlibatan dan partisipasi mereka dalam organisasi profesi.	37	Kami telah mengidentifikasi organisasi profesi yang relevan dan terkait dengan strategi dan operasi unit kerja kami.	Organisasi telah mengidentifikasi asosiasi atau lembaga profesi yang mendukung strategi dan operasional unit kerjanya.	Inspektorat Daerah: Berkoordinasi dengan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAPI) untuk meningkatkan kapabilitas pengawasan. Dinas Kesehatan: Bermitra dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk standar pelayanan medis.		
		38	Kami telah menetapkan mekanisme dan kriteria untuk mendukung pegawai yang berpartisipasi dalam kegiatan organisasi profesi melalui	Kami telah menyusun mekanisme dan kriteria untuk mendukung pegawai yang berpartisipasi dalam organisasi profesi dengan memberikan	Dana Bantuan: Anggaran khusus untuk biaya keanggotaan atau seminar.		

			dukungan keuangan, waktu dan sumber daya lainnya.	bantuan keuangan, kelonggaran waktu, serta sumber daya yang diperlukan.	Waktu Luang: Izin dinas atau cuti khusus untuk menghadiri kegiatan organisasi. Fasilitas Pendukung: Akses ke ruang rapat, internet, atau materi pelatihan.			
		39	Kami mendorong staf auditor yang aktif terlibat dalam organisasi profesi untuk melaporkan sumbangsihnya terhadap organisasi profesi guna pengembangan karirnya dalam organisasi K/L/Pemda.	Staf auditor didorong aktif dalam organisasi profesi untuk mendukung pengembangan karir dan kontribusi mereka di K/L/Pemda.	Forum diskusi atau seminar yang diselenggarakan oleh organisasi profesi. Program pelatihan dan sertifikasi yang disediakan oleh organisasi profesi. Jaringan profesional yang memungkinkan auditor untuk berbagi pengalaman dan best practice.			
		40	Kami telah memanfaatkan pengetahuan yang diperoleh staf auditor dari keterlibatannya pada organisasi profesi untuk meningkatkan kapasitas SDM APIP dalam kegiatan pengawasan.	Kami memanfaatkan pengetahuan staf auditor dari organisasi profesi untuk meningkatkan kapasitas SDM APIP dalam pengawasan.	Berupa pelatihan dan seminar yang diadakan oleh organisasi profesi bagi staf auditor, serta pemanfaatan jaringan profesional untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan tugas pengawasan.			
		41	Kami telah menginformasikan kepengurusan dan kontribusi kami pada organisasi profesi dalam laporan kinerja kami.	Kami telah melaporkan kepengurusan dan kontribusi kami pada organisasi profesi dalam laporan kinerja.	Penunjukan anggota organisasi dalam kepengurusan asosiasi profesi. Penyampaian laporan tentang kontribusi organisasi dalam kegiatan seminar atau pelatihan profesi.			
Adanya kontribusi kegiatan pengawasan terhadap pengembangan manajemen	1) Adanya pengintegrasian pengembangan manajerial organisasi K/L/Pemda melalui pelatihan dan pengalaman dalam kegiatan pengawasan intern (APIP sebagai <i>training ground</i> bagi manajer K/L/Pemda), dan sebaliknya.	42	Kami telah mengembangkan hasil kegiatan pengawasan intern dalam berbagai kajian, riset, telaahan, untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang bernilai bagi organisasi.	Pengawasan intern dilakukan melalui kajian, riset, dan telaahan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian dalam organisasi.	Sistem Manajemen Pengetahuan, Tim Riset, Pelatihan dan Workshop, dan Sistem Informasi Pengawasan.			
		43	Kami telah mengembangkan mekanisme yang tepat dalam organisasi K/L/Pemda untuk memunculkan calon-calon yang dapat berkontribusi dalam kegiatan peningkatan pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang bernilai bagi organisasi.	Upaya organisasi untuk menciptakan mekanisme yang memilih dan mengembangkan calon pegawai yang dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman mereka.	Pelatihan dan Sertifikasi, Mentoring, Rotasi Jabatan dan Evaluasi Kinerja.			
		44	Kami telah mengidentifikasi calon-calon dari APIP maupun organisasi K/L/Pemda yang	Pengawasan yang dilakukan bertujuan untuk membantu organisasi K/L/Pemda	Pelatihan dan workshop, Sistem manajemen risiko dan SDM terlatih.			

			dapat menarik manfaat dari kegiatan pengembangan profesi dan penerapan konsep tata Kelola, manajemen risiko dan prinsip pengendalian.	memahami dan menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan prinsip pengendalian. Kegiatan pengembangan profesi ini memberikan manfaat bagi APIP dan organisasi dalam meningkatkan pengelolaan dan pengawasan internal mereka.				
		45	Kegiatan pengawasan yang kami lakukan merupakan sarana bagi para pimpinan organisasi K/L/Pemda untuk mengembangkan pemahaman mengenai tata Kelola, manajemen risiko dan prinsip pengendalian.	Kegiatan pengawasan membantu pimpinan organisasi memahami tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian dengan memberikan informasi yang mendukung pengambilan keputusan yang tepat.	Sistem Informasi Manajemen Pengawasan, Audit Internal dan Pelaporan Keuangan dan Pelatihan dan Workshop.			
		46	Kami senantiasa menjadi contoh (<i>role model</i>) dalam organisasi untuk mempromosikan pentingnya tata Kelola, manajemen risiko dan pengendalian.	Kegiatan pengawasan membantu pimpinan organisasi menjadi contoh dalam mempromosikan tata kelola yang baik, manajemen risiko, dan pengendalian. Ini memastikan semua langkah sesuai prinsip yang berlaku, mengurangi risiko, dan meningkatkan kontrol.	Sistem Informasi Pengawasan (SIMWAS), Audit Internal dan Pelatihan.			
LEVEL 5								
Adanya proyeksi satuan kerja SDM APIP (<i>workforce projection</i>)	1. APIP menyelaraskan kegiatan pengembangan SDM APIP jangka panjangnya untuk memenuhi kebutuhan bisnis APIP di masa mendatang sejalan dengan kebutuhan rencana strategis K/L/Pemda.	47	Kami telah menyelaraskan kegiatan pengawasan SDM jangka Panjang untuk memenuhi kebutuhan layanan yang akan kami berikan di masa mendatang sejalan dengan kebutuhan rencana strategis orginak K/L/Pemda.					
		48	Adanya pengakuan dari organisasi K/L/Pemda bahwa terdapat hubungan yang erat antara tujuan strategis organisasi, risiko organisasi, serta peningkatan kapasitas APIP dalam rangka memberikan nilai tambah bagi organisasi.					
		49	Kami telah mengembangkan rencana strategis yang terkait pengembangan SDM yang meliputi kompetensi, jumlah personal, dan perangkat yang dibutuhkan lima tahun					

			mendatang dan selaras dengan renstra organisasi K/L/Pemda.					
Para Pimpinan APIP dan auditor internal terlibat aktif dalam kepengurusan inti organisasi profesi	1. APIP memfasilitasi dan mendukung penuh jajaran pimpinan dan staff auditor untuk menjadi pengurus inti dalam organisasi profesi yang relevan, yang dapat memberikan pengaruh bagi perkembangan profesi tersebut.	50	Kami telah menciptakan iklim yang kondusif guna mendukung jajaran pimpinan kami untuk menjadi pengurus inti dalam organisasi profesi yang relevan dan mengakui pencapaian yang berhasil diraihinya.					
		51	Kami telah melakukan pembelajaran APIP lain dan organisasi yang menanguinya dan mengintegrasikan praktik-praktik dan pemikiran strategis yang relevan dengan unit kami dan organisasi K/L/Pemda kami.					
		52	Kami telah memanfaatkan secara optimal pengetahuan yang diperoleh dari kepemimpinan pada organisasi profesi dan dari hasil pembelajaran dengan APIP lain dan organisasi yang menanguinya untuk meningkatkan strategi pembelajaran bagi organisasi K/L/Pemda.					
		53	Kami mempunyai pengaruh yang kuat kepada pengembangan dan arah profesi internal auditor.					
		54	Keterlibatan kami dalam organisasi profesi yang relevan mendorong kami untuk terus melakukan pembelajaran (<i>continuous learning</i>) serta meningkatkan wawasan dan pemikiran yang strategis.					
		55	Kami telah secara aktif mempromosikan pimpinan kami untuk menjadi pengurus inti organisasi profesi yang relevan.					

FORMULIR ISIAN PENILAIAN MANDIRI KAPABILITAS APIP

ELEMEN III: PRAKTIK PROFESIONAL

Key process Area	No	Uraian/Pernyataan	Penjelasan Pernyataan	Contoh Infrastruktur	Pilihan Jawaban		
					Ya	Sebagian	Tidak
Level 2							
Perencanaan pengawasan disusun berdasarkan pada prioritas manajemen /pemangku kepentingan	1. Adanya rencana pengawasan (audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan jasa lainnya) secara periodic (tahunan dan beberapa tahun) berdasarkan hasil konsultasi dengan manajemen dan atau pemangku kepentingan.	1	Pengawasan yang kami lakukan telah berdasarkan perencanaan.	APIP memiliki perencanaan pengawasan.	• PKPT dengan berbasis prioritas manajemen/ risiko tinggi dengan sasaran <i>compliance auditing</i>. • <i>Audit Universe</i> (peta auditan) • SOP penyusunan PKPT		
		2	Kami telah memiliki Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)/Program Kerja Audit, Tahunan (PKAT).	APIP telah Menyusun PKPT/PKAT.	• PKPT dengan berbasis prioritas manajemen/ risiko tinggi dengan sasaran <i>compliance auditing</i>. • <i>Audit Universe</i> (peta auditan) • SOP penyusunan PKPT		
		3	Kami telah menentukan klasifikasi pemberian tunjangan untuk setiap posisi jabatan di unit kerja kami.	1) APIP memiliki audit universe (peta audit), Audit universe merupakan obyek yang berpotensi untuk diaudit, dapat berupa divisi, bagian, bidang, cabang/perwakilan, kegiatan, proyek, kebijakan, program, dsb. 2) Audit universe sudah memperhatikan apakah obyek tab mendukung tujuan, visi, dan misi organisasi. Apakah obyek tersebut memiliki pengaruh yang cukup material, apakah audit dan pengendalian layak dikembangkan terhadap objek tersebut, apakah dana yang dikelola obyek tersebut cukup signifikan.	• PKPT dengan berbasis prioritas manajemen/ risiko tinggi dengan sasaran <i>compliance auditing</i>. • <i>Audit Universe</i> (peta auditan) • SOP penyusunan PKPT		
		4	Kami telah mengidentifikasi area dan topik yang dipertimbangkan untuk menjadi prioritas kegiatan APIP dalam PKPT dengan berkonsultasi kepada	PKPT/PKAT disusun sesuai dengan prioritas.	• PKPT dengan berbasis prioritas manajemen/ risiko tinggi dengan sasaran <i>compliance auditing</i>. • <i>Audit Universe</i> (peta auditan)		

			manajemen/pemangku kepentingan		• SOP penyusunan PKPT			
		5	PKPT kami telah mempertimbangkan seluruh (sumber daya yang diperlukan mencakup, SDM, keuangan, dan sarana prasarana).	PKPT/PKAT telah mencantumkan staf yang akan melakukan penugasan, jumlah biaya yang disediakan untuk menyelesaikan penugasan, dan sarana dan prasarana.	• PKPT dengan berbasis prioritas manajemen/ risiko tinggi dengan sasaran <i>compliance auditing</i>. • <i>Audit Universe</i> (peta auditan) • SOP penyusunan PKPT			
		6	PKPT yang kami susun telah disetujui oleh Pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemda		• PKPT dengan berbasis prioritas manajemen/ risiko tinggi dengan sasaran <i>compliance auditing</i>. • <i>Audit Universe</i> (peta auditan) • SOP penyusunan PKPT			
APIP memiliki kerangka kerja praktik profesional	1. Tersedianya kebijakan, proses, dan prosedur yang akan memandu kegiatan APIP dalam pengelolaan operasinya, mengembangkan program kerja pengawasan intern, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pengawasan intern.	7	<i>Internal Audit Charter</i> yang kami miliki memuat kewenangan untuk mengakses catatan, personal, kekayaan fisik, kewenangan untuk hadir dalam rapat terkait, lingkup kegiatan pengawasan intern, definisi pengawasan intern, kode etik dan standar pengawasan yang digunakan.	IAC mencantumkan; kewenangan untuk mengakses catatan, personal, kekayaan fisik, kewenangan untuk hadir dalam rapat terkait lingkup kegiatan pengawasan intern; definisi pengawasan intern, kode etik dan standar pengawasan yang digunakan.	<i>Internal Audit Charter</i>			
		8	Piagam Pengawasan Intern (<i>Internal Audit Charter</i>) telah mendapatkan persetujuan secara formal dari Pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemda	IAC telah ditandatangani oleh pimpinan K/L/Pemda.	<i>Internal Audit Charter</i>			
		9	Kami telah memiliki kebijakan dalam bentuk peraturan/SK yang mendukung kegiatan pengawasan intern (misalnya; kebijakann SDM, manajemen informasi, dan keuangan).	Terdapat Peraturan/SK notulen rapat terkait dengan dukungan kegiatan pengawasan intern.	Pedoman/SOP/Juklak tentang Kebijakan SDM, manajemen informasi, dan keuangan.			
		10	Kami telah memiliki pedoman/ juklak pengawasan intern (metodologi, standar, prosedur, perangkat dalam melakukan kegiatan pengawasan intern).	Terdapat Pedoman/juklak/SOP pengawasan intern.	Pedoman/SOP/Juklak tentang Pelaksanaan Penugasan sejak perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil audit.			
		11	Adanya dokumentasi atas kebijakan, proses, prosedur, dan metodologi pengawasan.	1) Misal; kalau ada crash program yang harus dilaksanakan sehingga mengubah prioritas dalam PKPT, maka kebijakan ini harus didokumentasikan. 2) KKA	Pedoman/SOP/Juklak tentang Pelaksanaan Penugasan sejak perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil audit.			

		12	Diterapkannya standar kendali mutu pada setiap penugasan audit.	Penugasan audit sudah menerapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali mutu Audit Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah. Kendali mutu ini harus dibuktikan dengan dokumen kendali mutu atau pernyataan reviu atau paraf atas setiap dokumen pengawasan (seperti form kendali mutu, checklist, dan paraf).	Pemberlakuan kendali mutu audit mengacu ke Permenpan No.19 tahun 2009.			
		13	Penugasan pengawasan intern yang kami lakukan telah mengacu pada kebijakan, standar, pedoman dan prosedur yang ditetapkan.	1) Terdapat kebijakan, standar, pedoman, dan prosedur yang diacu. 2) APIP sudah melakukan internal quality assessment (bisa self-assessment dengan validation oleh pihak lain di luar APIP atau external quality assessment oleh pihak lain di luar APIP) untuk menilai kesesuaian penugasan pengawasan interna dengan kebijakan, standar, pedoma, dan prosedur yang diteapkan.	Pemberlakuan kendali mutu audit mengacu ke Permenpan No.19 tahun 2009.			
LEVEL 3								
Adanya perencanaan audit berbasis risiko	1. Terlaksananya penilaian risiko secara sistematis dan focus pada prioritas rencana kegiatan periodic APIP (audit, evaluasi, reviu, pemantauan, jasa lain) atas Gambaran risiko organisasi APIP secara keseluruhan.	14	Kami telah melakukan pemutakhiran data/informasi semua unit kerja yang dapat diawasi (<i>audit universe</i>).	Terdapat pemutakhiran data terkait obyek pengawasan.	Audit Universe/ Peta Auditan termasuk identifikasi dan penanganan risiko.			
		15	Kami telah mengidentifikasi unit kerja auditi yang memiliki risiko tertinggi.	APIP telah menentukan besaran risiko atas seluruh auditi dengan memperhatikan unsur-unsur risiko.	Audit Universe/ Peta Auditan termasuk identifikasi dan penanganan risiko.			
		16	Kami telah menentukan probabilitas terjadinya risiko yang signifikan yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan unit kerja auditi.	APIP telah menentukan besaran risiko atas seluruh auditi dengan memperhatikan unsur-unsur risiko.	Audit Universe/ Peta Auditan termasuk identifikasi dan penanganan risiko.			

		17	Kami telah mengidentifikasi alternatif penanganan risiko yang dilakukan oleh manajemen.	Terdapat dokumentasi atas alternatif penanganan risiko yang dilakukan oleh manajemen.	Audit Universe/ Peta Auditan termasuk identifikasi dan penanganan risiko.			
		18	Kami telah mengidentifikasi penanganan tambahan atau penanganan lain yang diperlukan untuk merespon risiko.	Terdapat dokumentasi atas alternatif penanganan risiko yang dilakukan oleh manajemen.	Audit Universe/ Peta Auditan termasuk identifikasi dan penanganan risiko.			
		19	Perencanaan penugasan kami, juga telah mencakup pengawasan atas audit yang memiliki risiko tinggi, dan atau penanganannya belum tepat.	PKPT/PKAT mencantumkan kegiatan pengawasan atas obyek pemeriksaan yang memiliki risiko tinggi, dan/atau manajemen belum menangani risiko tersebut dengan tepat.	• PKPT berbasis risiko dengan sasaran audit 3E dan advisory. • SOP Penyusunan PKPT berbasis risiko.			
		20	Kami telah membandingkan rencana pengawasan yang akan dilakukan (audit, reviu, monitoring dan evaluasi, serta pengawasan lainnya) dengan tujuan strategis organisasi, untuk memastikan keduanya telah selarasa.	Seluruh kegiatan pengawasan yang tercantum dalam PKPT/PKAT telah mempertimbangkan kesesuaian dengan pencapaian tujuan K/L/Pemda.	• PKPT berbasis risiko dengan sasaran audit 3E dan advisory. • SOP Penyusunan PKPT berbasis risiko.			
		21	Kami telah Menyusun PKPT yang berbasis risiko (berdasar hasil penelitian risiko audit).	APIP Menyusun PKPT berdasarkan besaran risiko atas seluruh audit.	• PKPT berbasis risiko dengan sasaran audit 3E dan advisory. • SOP Penyusunan PKPT berbasis risiko.			
		22	Dilakukannya komunikasi informasi mengenai risiko dan pengendaliannya kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemda	Terdapat notulen hasil rapat dengan Pimpinan K/L/Pemda mengenai risiko dan pengendaliannya.	• SOP Penyusunan PKPT berbasis risiko. • Audit Universe/Peta Auditan termasuk identifikasi dan penanganan risiko.			
		23	Kami telah melakukan pelatihan perencanaan pengawasan berbasis risiko.	Terdapat laporan hasil pelatihan perencanaan pengawasan berbasis risiko.	Dokumen rencana training untuk memenuhi kompetensi pelaksanaan audit 3E dan jasa advisory.			
APIP memiliki kerangka kerja untuk mengelola kualitas	1. Ditetapan dan diterapkan proses untuk pemantauan berkelanjutan, menilai dan memperbaiki efektivitas kegiatan pengawasan intern. Proses tersebut mencakup pemantauan internal terus menerus, atas kinerja kegiatan pengawasan intern sebagaimana penilaian kualitas yang dilakukan secara periodic (oleh pihak internal dan eksternal).	24	Kami telah mengembangkan kebijakan, praktik, dan prosedur yang dapat memberikan kontribusi perbaikan berkelanjutan bagi kegiatan pengawasan intern.	Kebijakan, praktik dan prosedur yang dibangun termasuk diantaranya adanya proses kendali mutu atas pelaksanaan pengawasan intern.	Pedoman / panduan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan atas Audit 3E, pemberian layanan advisory.			

		25	Kami telah mengembangkan dan mendokumentasikan peran, tanggung jawab dan akuntabilitas dalam melaksanakan, mereviu, dan memberi persetujuan atas hasil penugasan pengawasan intern pada setiap tahapan proses penugasan pengawasan.	1) Terdapat supervise atas setiap tahapan pekerjaan audit, ketua tim menyupervisi anggota timnya, pengendali teknis mengawasi tim audit yang dibawahinya dan pengendali mutu menyupervisi seluruh kerja audit yang dilaksanakan. 2) Supervise tersebut didokumentasikan dalam KPA.	Pedoman / panduan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan atas Audit 3E, pemberian layanan advisory.			
		26	Kami telah melaksanakan dan memelihara kegiatan program <i>quality assurance dan perbaikannya (quality assurance and improvement program)</i> .	APIP melakukan <i>Quality Assurance and Improvement Program (QAIP)</i> secara periodic terkait dengan kegiatan pengawasan yang dilakukan guna memastikan kesesuaian penugasan pengawasan tersebut dengan standar yang ditetapkan (Standar Audit yang dikeluarkan AAIP, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah, Pedoman telaah sejawat). QAIP tersebut bisa dilakukan dengan <i>self-assessment</i> atau <i>self-assessment</i> dengan <i>validation</i> oleh pihak lain di luar APIP, atau <i>external quality assessment</i> oleh pihak lain di luar APIP.	Pedoman telaahan sejawat dan pemberlakuannya.			
		27	Kami telah mengembangkan system dan prosedur untuk memonitor dan melaporkan pelaksanaan program <i>quality assurance dan perbaikannya (quality assurance and improvement program)</i> .	Laporan hasil pelaksanaan QAIP.	Pedoman telaahan sejawat dan pemberlakuannya.			
		28	Kami telah mengembangkan system dan prosedur untuk memonitor dan melaporkan kinerja dan efektivitas kegiatan APIP, misal: penerapan <i>peer review</i> , kecukupan pemenuhan	Laporan <i>peer review</i> atau laporan hasil survey kepuasan stakeholder terhadap peran dan layanan yang diberikan APIP.	Pedoman telaahan sejawat dan pemberlakuannya.			

			<i>internal audit charter</i> , kontribusi APIP bagi auditi (dalam tata Kelola manajemen risiko) dll.				
		29	Kami telah mengembangkan system dan prosedur untuk menindaklanjuti pelaksanaan rekomendasi yang dibuat dalam rangka meningkatkan efektivitas kegiatan pengawasan intern, serta kesesuaian dengan standar.	Terdapat rekomendasi dalam laporan QAIP yang ditindaklanjuti APIP.	Pedoman telaahan sejawat dan pemberlakuannya.		
		30	Praktik pengawasan yang kami lakukan telah meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan.	Hasil QAIP beberapa periode menyatakan bahwa penugasan pengawasan oleh APIP secara umum telah sesuai standar.	• Surat Pernyataan independensi dan objektivitas auditor. • Kuesioner kepuasan pelanggan.		
LEVEL 4							
Adanya strategi pengawasan yang dapat meningkatkan pengelolaan risiko organisasi	1. Adanya hubungan antara rencana kegiatan periodic pengawasan intern dengan praktik-praktik dan strategi manajemen risiko organisasi yang diawasi (ERM organisasi).	31	Strategi pengawasan yang kami susun telah mencakup area-area yang dianggap oleh manajemen memiliki risiko tinggi berdasarkan hasil manajemen risiko organisasi K/L/Pemda secara keseluruhan (<i>Enterprise Risk Management/ERM</i>).	Strategi pengawasan yang disusun berfokus pada area yang memiliki risiko tinggi sesuai dengan hasil manajemen risiko organisasi. Hal ini memastikan bahwa pengawasan dilakukan secara efektif dengan memprioritaskan aspek yang berpotensi menyebabkan dampak signifikan terhadap tujuan organisasi.	• Sistem Manajemen Risiko Terintegrasi: Menggunakan perangkat lunak ERM seperti COSO ERM <i>Framework</i> atau ISO 31000 untuk memetakan risiko. • Dashboard Monitoring Risiko: Platform digital yang menampilkan profil risiko secara real-time. • Database Risiko: Katalog elektronik yang memuat daftar risiko, penyebab, dampak, dan strategi mitigasi.		
		32	Unit kerja kami terus menerus memantau profil risiko organisasi K/L/Pemda dan merevisi rencana pengawasan jika diperlukan serta memperoleh persetujuan Pimpinan/Kementerian/Lemba ga/ Pemda.	Unit kerja melakukan pemantauan profil risiko secara terus-menerus dan menyesuaikan rencana pengawasan sesuai dengan perubahan yang terjadi. Hal ini dilakukan dengan melibatkan Pimpinan/Kementerian/Lemba ga/ Pemda untuk memastikan pengawasan tetap relevan.	• <i>Sistem Early Warning System (EWS)</i>: Alat berbasis data analitik untuk mendeteksi potensi risiko sejak dini. • Rapat Evaluasi Berkala: Forum yang diadakan setiap bulan atau kuartal untuk meninjau dan menyesuaikan rencana pengawasan. • Aplikasi Manajemen Pengawasan: Platform digital untuk mencatat perubahan risiko dan rekomendasi tindakan mitigasi.		

		33	Kami telah memahami strategi dan praktik manajemen risiko organisasi melalui konsultasi dengan Pimpinan K/L/Pemda dan mereviu dokumen yang relevan, baik dari internal maupun eksternal organisasi.	Unit kerja memahami strategi dan praktik manajemen risiko organisasi melalui konsultasi dengan pimpinan serta mereviu dokumen yang relevan. Pendekatan ini memastikan bahwa pengawasan dilakukan berdasarkan standar dan kebijakan terkini.	• Pelatihan dan Workshop Manajemen Risiko: Program peningkatan kapasitas auditor dan pengawas. • Portal Digital Manajemen Risiko: Tempat berbagi dokumen, kebijakan, dan pedoman terbaru mengenai risiko. • Database Regulasi dan Kebijakan: Sistem yang memuat dokumen internal dan eksternal terkait tata kelola risiko.			
		34	Unit kerja kami secara periodic telah melakukan audit manajemen risiko dalam lingkup yang luas (<i>enterprise, wide risk management audit</i>).	Audit manajemen risiko dilakukan secara menyeluruh mencakup berbagai aspek risiko, baik operasional, strategis, keuangan, maupun kepatuhan. Audit ini bertujuan untuk memastikan efektivitas pengelolaan risiko dalam organisasi.	• <i>Checklist Audit Risiko</i>: Daftar periksa yang digunakan auditor dalam melakukan penilaian risiko organisasi. • Laporan Hasil Audit Risiko: Dokumen yang merinci temuan audit, rekomendasi mitigasi, dan tindak lanjut. • <i>Software Audit Risiko</i>: Aplikasi berbasis data yang mempermudah pelaksanaan audit risiko organisasi.			
LEVEL 5								
Adanya rencana strategis pengawasan intern	1. Dipahaminya arah strategi organisasi APIP auditi dan risiko serta isu penting, serta merancang perubahan keahlian/kapabilitas APIP dalam melaksanakan kegiatan pengawasan intern untuk memenuhi kebutuhan potensial di masa mendatang.	35	Kami telah memiliki rencana strategis pengawasan (<i>Renstra APIP</i>) dengan pendekatan yang fleksibel dan dinamis serta selaras dengan arah strategi organisasi K/L/Pemda untuk menangani risiko dan isu yang potensial.					
		36	Kami telah mengidentifikasi dan menilai trend, isu, dan risiko baik pada lingkungan internal maupun eksternal organisasi, serta mendiskusikannya secara intensif dengan Pimpinan K/L/Pemda.					
		37	Kami telah melakukan penilaian yang komprehensif					

			untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam praktik, sarana dan keahlian yang dibutuhkan dalam rangka merespon isu-isu dan risiko-risiko organisasi yang berkembang saat ini.					
		38	Kami telah melakukan penilaian atas pilihan-pilihan penanganan risiko yang berkembang untuk mengatasi kesenjangan yang ada. (seperti melakukan revisi, atau menambah prosedur, praktik, dan/atau sarana, menambah staf lain, dan/atau melakukan <i>co-sourcing</i>).					
		39	Kami telah memastikan bahwa semua auditor internal telah mengikuti program Pendidikan dan pengembangan profesional berkelanjutan secara tepat (idealnya 30 sd 40 jam per pegawai per tahun).					
		40	Kami telah melakukan reviu dan penyesuaian terhadap <i>Internal Audit Charter</i> , kebijakan, praktik dan prosedur kegiatan pengawasan intern secara berkala untuk memastikan kesesuaiannya dengan standar internasional.					
		41	Kami telah melakukan pemantauan system manajemen kinerja pengawasan untuk menilai hasil dan mengambil Tindakan dalam rangka meningkatkan kinerja.					
		42	Kami telah berkontribusi untuk asosiasi profesi yang relevan guna mendapatkan pembelajaran dan penerapan praktik-praktik terbaik pengawasan intern terkini.					
		43	Kebijakan dan praktik pengawasan intern yang kami lakukan telah sesuai dengan standar dunia (sesuai dengan hakikat. Definisi internal auditing, kode etik, standar,					

		independensi dan obyektivitas, pelaporan yang valid dan dapat diandalkan).					
--	--	--	--	--	--	--	--

FORMULIR ISIAN PENILAIAN MANDIRI KAPABILITAS APIP

ELEMEN IV : AKUNTABILITAS DAN MANAJEMEN KINERJA

Key process Area	No	Uraian/Pernyataan	Penjelasan Pernyataan	Contoh Infrastruktur	Pilihan Jawaban		
					Ya	Sebagian	Tidak
Level 2							
Adanya perencanaan kegiatan pengawasan	1. Memiliki Rencana Kinerja Tahunan (RKT) penugasan pengawasan yang mencakup seluruh sumber daya yang dibutuhkan.	1	Kami telah memiliki Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang didalamnya telah mengidentifikasi sasaran dan hasil-hasil yang ingin dicapai.	Sebagaimana indicator dalam kriteria Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Komponen Perencanaan Kinerja dan subkomponen Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (PermenPAN RB Nomor 53 Tahun 2014).	Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/ Rencana Kerja (RENJA)/ Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), LAKIP.		
		2	RKT kami telah mempertimbangkan pelayanan penunjang dan administrasi yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan yang efektif (missal; SDM, material, teknologi informasi).	Sebagaimana indicator dalam kriteria Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Komponen Perencanaan Kinerja dan subkomponen Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (PermenPAN RB Nomor 53 Tahun 2014).	Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/ Rencana Kerja (RENJA)/ Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), LAKIP.		
		3	RKT yang kami susun mencakup penetapan jadwal dan penetapan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran yang telah dicapai.	Sebagaimana indicator dalam kriteria Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Komponen Perencanaan Kinerja dan subkomponen Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (PermenPAN RB Nomor 53 Tahun 2014).	Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/ Rencana Kerja (RENJA)/ Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), LAKIP.		
		4	Dalam RKT, kami telah mengembangkan Langkah-langkah penting untuk mencapai sasaran yang diharapkan.	Sebagaimana indicator dalam kriteria Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Komponen Perencanaan Kinerja dan subkomponen Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (PermenPAN RB Nomor 53 Tahun 2014).	Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/ Rencana Kerja (RENJA)/ Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), LAKIP.		

		5	RKT yang disusun menyediakan instrument untuk mengendalikan operasional kegiatan pengawasan (rencana/target atas inputs, output, outcomes).	Sebagaimana indicator dalam kriteria Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Komponen Perencanaan Kinerja dan subkomponen Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (PermenPAN RB Nomor 53 Tahun 2014).	Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/ Rencana Kerja (RENJA)/ Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), LAKIP.			
		6	RKT yang kami susun telah memperoleh persetujuan dari pimpinan Kementerian /Lembaga/Pemda.		Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/ Rencana Kerja (RENJA)/ Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), LAKIP.			
		7	Kami memperoleh pengalokasian anggaran untuk kegiatan pengawasan dan dapat mempergunakan anggaran tersebut untuk merencanakan kegiatan pengawasan.		Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/ Rencana Kerja (RENJA)/ Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), LAKIP.			
Adanya anggaran operasional kegiatan pengawasan	1. APIP memperoleh pengalokasian anggaran untuk kegiatan pengawasan dan dapat mempergunakan anggaran tersebut untuk merencanakan kegiatan pengawasan.	8	Kami Menyusun anggaran rencana realistis/wajar untuk kegiatan-kegiatan dan sumber daya yang telah diidentifikasi dalam RKT.		Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/ Rencana Kerja (RENJA)/ Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), LAKIP.			
		9	Anggaran operasional kami telah disahkan oleh Pimpinan Kementerian/Lembaga/ Pemda.		Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/ Rencana Kerja (RENJA)/ Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), LAKIP.			
		10	Kami selalu melakukan reviu terhadap anggaran operasional secara berkesinambungan untuk memastikan bahwa anggaran yang disusun masih realistis dan akurat, dan kami mengidentifikasi dan melaporkan setiap selisih yang ada.	Terdapat laporan hasil reviu anggaran APIP oleh APIP yang bersangkutan.	Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/ Rencana Kerja (RENJA)/ Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), LAKIP.			
LEVEL 3								
Adanya laporan manajemen kegiatan pengawasan	1. APIP mendayagunakan informasi untuk mengelola operasional hariannya, mendukung proses pengambilan Keputusan, serta membangun akuntabilitas.	11	Kami telah mengidentifikasi kebutuhan dan persyaratan pelaporan manajemen APIP untuk kepentingan pertanggung jawaban dan akuntabilitas manajemen APIP (misal; mengidentifikasi jenis dan model pelaporan yang perlu disediakan oleh manajemen APIP).	Laporan pelaksanaan pengawasan intern kepada pimpinan K/L/D.	Kebijakan dan prosedur pelaporan pertanggung jawaban kinerja.			

		12	Kami telah mengembangkan system informasi pengumpulan dan pengolahan data yang relevan untuk tujuan pelaporan kegiatan pengawasan kami.	APIP memiliki system informasi pengumpulan data dan pengolahan data yang relevan untuk tujuan pelaporan kegiatan pengawasan intern.	Aplikasi system informasi berbasis teknologi untuk pengolahan anggaran/ keuangan, pengelolaan hasil pengawasan, pengelolaan kinerja seperti; SIM, HP, SIM Monev, SIM Pengendalian Anggaran/SILABI/IPMS.			
		13	Kami telah merancang laporan seluruh hasil kegiatan pengawasan intern untuk memenuhi kebutuhan pengguna dan para pemangku kepentingan yang utama.		Aplikasi system informasi berbasis teknologi untuk pengolahan anggaran/ keuangan, pengelolaan hasil pengawasan, pengelolaan kinerja seperti; SIM, HP, SIM Monev, SIM Pengendalian Anggaran/SILABI/IPMS.			
		14	Kami telah menyediakan laporan dan informasi yang relevan secara tepat waktu dan berkala.		SOP mengenai Pelaporan Ikhtisar Hasil Pengawasan.			
		15	Kami telah melakukan pemantauan penggunaan laporan dan informasi untuk melihat apakah masih relevan, dan melakukan perbaikan apabila diperlukan.	APIP telah melakukan survey kepuasan penggunaan laporan atau mengadakan pertemuan rutin dengan pengguna/ stakeholder untuk mendapatkan respon terkait informasi laporan.	SOP mengenai Pelaporan Ikhtisar Hasil Pengawasan.			
		16	Akuntabilitas dan tanggung jawab manajemen dalam kegiatan pengawasan intern telah dapat kami penuhi melalui pelaporan kegiatan pengawasan yang tepat waktu, relevan dan dapat diandalkan.	Laporan kinerja dan akuntabilitas APIP telah tepat waktu, relevan, dan dapat diandalkan.	Kebijakan dan prosedur pelaporan pertanggung jawaban kinerja.			
Adanya informasi mengenai biaya	1. APIP memiliki system informasi keuangan yang dapat menyediakan informasi keuangan yang memadai sehingga APIP dapat mengelola aktivitasnya seekonomis dan seefisien mungkin.	17	Kami telah mengembangkan system informasi biaya untuk melaksanakan kegiatan pengawasan.	1) Terdapat mekanisme untuk mendapatkan informasi yang akurat terkait biaya untuk melaksanakan kegiatan APIP. 2) APIP telah memiliki kebijakan/prosedur pelaporan informasi biaya. 3) APIP telah memiliki system informasi biaya yang relevan dan handal.	Aplikasi system informasi berbasis teknologi untuk pengolahan anggaran/ keuangan, pengelolaan hasil pengawasan, pengelolaan kinerja seperti; SIM, HP, SIM Monev, SIM Pengendalian Anggaran/SILABI/IPMS.			
		18	Kami telah menerapkan system manajemen biaya pengelolaan kegiatan pengawasan intern yang selaras dengan system manajemen keuangan dan		Aplikasi system informasi berbasis teknologi untuk pengolahan anggaran/ keuangan, pengelolaan hasil pengawasan, pengelolaan			

			operasional K/L/Pemda serta pelaporannya.		kinerja seperti; SIM, HP, SIM Monev, SIM Pengendalian Anggaran/SILABI/IPMS.			
		19	Kami telah memantau biaya yang sebenarnya dibandingkan dengan biaya standar atau biaya yang telah ditetapkan pada berbagai tahap kegiatan pengawasan intern.	Dokumen <i>analisis variance</i> biaya.	Aplikasi system informasi berbasis teknologi untuk pengolahan anggaran/ keuangan, pengelolaan hasil pengawasan, pengelolaan kinerja seperti; SIM, HP, SIM Monev, SIM Pengendalian Anggaran/SILABI/IPMS.			
		20	Kami telah memantau system manajemen biaya secara berkala dan memastikan bahwa struktur biaya masih relevan dan informasi bahwa biaya tersebut dihasilkan/diperoleh dengan cara yang paling efisien dan ekonomis.	Dokumen <i>analisis variance</i> biaya.	Aplikasi system informasi berbasis teknologi untuk pengolahan anggaran/ keuangan, pengelolaan hasil pengawasan, pengelolaan kinerja seperti; SIM, HP, SIM Monev, SIM Pengendalian Anggaran/SILABI/IPMS.			
		21	Kami telah memanfaatkan informan biaya untuk pengendalian biaya program/ kegiatan pengawasan yang dilakukan dan sebagai salah satu dasar pengambilan Keputusan.	Dokumen tindak lanjut hasil <i>analisis variance</i> dan dokumen monitor system manajemen biaya.	Aplikasi system informasi berbasis teknologi untuk pengolahan anggaran/ keuangan, pengelolaan hasil pengawasan, pengelolaan kinerja seperti; SIM, HP, SIM Monev, SIM Pengendalian Anggaran/SILABI/IPMS.			
Adanya system pengukuran kinerja	1. APiP telah mengembangkan indicator-indikator dan alat ukur yang memungkinkan untuk mengukur dan melaporkan kinerjanya dan melakukan pemantauan secara rutin atas kemajuan pencapaian target guna memastikan bahwa hasil dicapai seekonomis dan seefisien mungkin.	22	Kami telah menetapkan kegiatan pengawasan intern yang perlu diukur kinerjanya.	Dokumen System Manajemen Kinerja/SOP yang mengatur pengembangan dan penetapan <i>key performance indicator</i> (KPI).	Dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin).			
		23	Kami telah mendokumentasikan Sistem Manajemen Kinerja dalam pengelolaan kegiatan pengawasan intern, yang mencakup identifikasi data kinerja yang harus dikumpulkan, frekuensi pengumpulan data, siapa yang bertanggung jawab untuk pengumpulan data, pengendalian mutu data, siapa yang menghasilkan laporan		SOP dan Aplikasi Pengukuran Manajemen Kinerja.			

			data kinerja, dan siapa yang menerima laporan.				
		24	Kami telah mengembangkan ukuran-ukuran kinerja (rasio input/output, indicator produktivitas).	APIP memiliki dokumen pengembangan/penyusunan <i>key performance indicator</i> (KPI) yang layak untuk mengatur kinerja aktivitas APIP.	Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/ Rencana Kerja (RENJA)/ Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tapkin/RENSTRA.		
		25	Kami telah menetapkan target kinerja.	Dokumen KPI yang terukur secara kuantitatif.	Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/ Rencana Kerja (RENJA)/ Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tapkin/RENSTRA.		
		26	Kami telah menggunakan informasi kinerja untuk memantau kegiatan pengawasan intern dan hasilnya dibandingkan dengan tujuan yang telah kami tetapkan guna mengambil Tindakan yang diperlukan.	Dokumen monitoring pengukuran dan analisis kinerja sesuai KPI.	LAKIP		
		27	Kami telah melaporkan kinerja kegiatan pengawasan intern kapan saja dibutuhkan oleh pimpinan terkait K/L/Pemda dan atau pihak terkait.		LAKIP		
		28	Kami telah melakukan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas biaya dan relevansinya dengan ukuran-ukuran kinerja.		LAKIP		
		29	System pengukuran kinerja kami dapat menginformasikan bagaimana operasional harian kegiatan pengawasan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan K/L/Pemda secara keseluruhan.	Dokumen analisis/evaluasi hasil pengukur KPI dengan pencapaian tujuan aktivitas APIP dan tujuan organisasi Pemda/K/L.	LAKIP		
LEVEL 4							
Adanya integritas atas pengukuran kinerja kuantitatif maupun kualitatif	1. APIP dapat menggunakan informasi kinerja untuk mengukur dan memantau fluktuasi yang mempengaruhi hasil-hasil kegiatan pengawasannya.	30	Kami telah mengidentifikasi dengan jelas tujuan strategis unit kerja kami.				
		31	Kami telah mengembangkan ukuran-ukuran dan target-target kinerja yang komprehensif yang dapat menetapkan Tingkat risikoyang dapat diterima (<i>acceptable risk</i>), biaya, kualitas, dan hasil yang ingin dicapai.				

		32	Kami telah mengembangkan system untuk mengukur dan memantau kinerja kuantitatif dan kualitatif.					
		33	Kami telah menggunakan informasi kinerja untuk memonitor dan mengukur fluktuasi kinerja yang dapat mempengaruhi hasil-hasil kegiatan pengawasan.					
		34	Kami telah menggunakan informasi kinerja untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada untuk mengurangi dampak dari risiko organisasi K/L/Pemda.					
		35	Kami telah meminta masukan secara berkala dari para pemangku kepentingan utama untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas kegiatan pengawasan intern.					
		36	Kami telah mengintegrasikan hasil-hasil dari program perbaikan dan pengendalian mutu dengan system manajemen kinerja dan menggunakan informasinya untuk meningkatkan kinerja.					
		37	Kami telah melakukan pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi APiP oleh manajemen organisasi untuk mengukur dampak (<i>impact</i>) dan nilai tambah dari kegiatan pengawasan.					
		38	Kami telah mengintegrasikan sepenuhnya ukuran kualitatif dan kuantitatif untuk memastikan bahwa tujuan strategis kami telah tercapai.					
LEVEL 5								
Adanya pelaporan kepada public atas efektivitas kegiatan pengawasan internal.	1. APiP melaporkan kepada public efektivitasnya untuk menunjukkan akuntabilitas dan transparansi kepada para pemangku kepentingan organisasi dan public.	39	Kami telah membangun instrument untuk mengukur dampak dari kegiatan pengawasan yang kami lakukan.					
		40	Kami telah mengidentifikasi dampak dari kegiatan					

			pengawasan pada tataran organisasi K/L/Pemda yang mencakup kemungkinan pengurangan risiko, penghematan biaya, dan perbaikan keuangan organisasi.					
		41	Kami telah melaporkan kinerja pengawasan kami kepada para pemangku kepentingan eksternal (misal; BPK,BPKP, Inspektorat lain, dan KPK) dan public.					
		42	Kami telah memperoleh masukan dari pemangku kepentingan eksternal (misal; BPK,BPKP, Inspektorat lain, dan KPK) dan public untuk memperbaiki efektivitas APIP.					
		43	Kami telah memberikan nilai tambah (<i>value added</i>) dan berkontribusi nyata dalam perbaikan proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian K/L/Pemda.					

FORMULIR ISIAN PENILAIAN MANDIRI KAPABILITAS APIP
ELEMEN V : BUDAYA DAN HUBUNGAN ORGANISASI

Key process Area	No	Uraian/Pernyataan	Penjelasan Pernyataan	Contoh Infrastruktur	Pilihan Jawaban		
					Ya	Sebagian	Tidak
Level 2							
Adanya pengelolaan atas bisnis proses pengawasan intern	1.	APIP focus pada pembinaan dan pembenahan hubungan dan infrastruktur di dalam lingkungan internalnya sendiri, yang mencakup struktur organisasi, manajemen SDM, penyusunan dan pemantauan anggaran, rencana tahunan, pemenuhan perangkat, dan teknologi pengawasan intern, dan pelaksanaan kegiatan pengawasan intern itu sendiri.	1	Kami telah memiliki struktur organisasi untuk melaksanakan pengawasan intern sesuai peraturan yang berlaku yang ditetapkan secara formal dalam bentuk Peraturan atau SK Pimpinan K/L/Pemda.			
			2	Kami telah mengidentifikasi peran dan tanggung jawab seluruh pejabat struktural di lingkungan kami.			
			3	Kami telah memiliki aturan, arahan, dan sarana komunikasi di lingkungan internal APIP.	Misal; terdapat mekanisme rapat internal APIP secara berkala.	Nota Dinas/Memo/SE tentang Penyelenggaraan Komunikasi Internal APIP.	
			4	Kami telah membina hubungan dan mendorong komunikasi yang efektif di lingkungan internal APIP.	Misal; terdapat suatu forum yang mengumpulkan tim audit dalam APIP untuk dapat saling berbagi informasi; terdapat moment pembekalan kepada tim audit oleh pimpinan APIP, terdapat forum ekspos hasil-hasil auditor.	Nota Dinas/Memo/SE tentang Penyelenggaraan Komunikasi Internal APIP.	
			5	Kami telah menganalisis kebutuhan dan memperoleh sumber daya dan perangkat pengawasan intern termasuk perangkat berbasis teknologi untuk mengelola dan melaksanakan kegiatan pengawasan intern.	1) Analisis kebutuhan sumber daya didokumentasikan. 2) APIP memiliki sumber daya dan perangkat pengawasan intern termasuk perangkat berbasis teknologi sesuai yang dibutuhkan.	Aplikasi Sistem Informasi berbasis teknologi seperti SIM HP dan SIM Monev.	
			6	Struktur organisasi kami telah tepat dan sesuai dengan	Struktur organisasi APIP memungkinkan APIP untuk berkomunikasi secara	Peraturan tentang SOTK (Struktur Organisasi Tata Kerja) Dimana APIP secara	

			kebutuhan dan budaya organisasi KL/Pemda.	langsung dengan pucuk pimpinan organisasi, dan memungkinkan APIP untuk dapat melakukan pengawasan tanpa ada pun pembatasan akses ke seluruh unit organisasi.	fungsional bertanggungjawab langsung kepada Pucuk Pimpinan K/L/D.			
LEVEL 3								
APIP Bersama-sama dengan unit lain dalam organisasi merupakan satu tim manajemen	1. APIP berpartisipasi secara aktif dalam manajemen organisasi sebagai bagian dari tim manajemen yang memberikan nilai tambah bagi organisasi.	7	Jajaran pimpinan APIP telah memahami prioritas manajemen dan senantiasa mengikuti perubahan terkait proses bisnis serta hal-hal baru dalam organisasi K/L/Pemda.	Jajaran pimpinan APIP selalu diundang untuk mengikuti rapat manajemen puncak organisasi (ada notulennya).	• SK TPTGR, SK Baperjakat. • PKPT berbasis risiko dengan sasaran audit 3E dan <i>advisory services</i>, dan usulan perubahannya.			
		8	Pimpinan organisasi K/L/Pemda menyampaikan rencana organisasi dan informasi penting serta laporan lainnya kepada pimpinan kami (misalnya, rencana strategis dan rencana kegiatan serta laporan keuangan).		Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/ Rencana Kerja (RENJA)/ Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)/ Tapkin/RENSTRA.			
		9	Pimpinan unit APIP telah menginformasikan dan mendiskusikan rencana dan isu-isu organisasi K/L/Pemda dengan seluruh staf di lingkungan APIP.	Terdapat notulen/laporan hasil forum/rapat tersebut.	Nota Dinas/Memo/SE tentang Penyelenggaraan Komunikasi Internal APIP.			
		10	Pimpinan APIP ikut berpartisipasi dan hadir dalam forum-forum penting yang diselenggarakan organisasi K/L/Pemda guna mengetahui perkembangan strategis dan operasional kegiatan pengawasan intern serta isu-isu tentang risiko, system, prosedur, dan jenis pengendalian pada kegiatan pengawasan intern.	Terdapat notulen/laporan hasil forum/rapat tersebut.	• Adanya kegiatan-kegiatan penting dalam organisasi K/L/D Dimana Pimpinan APIP menjadi bagian yang terintegrasi dalam tim manajemen K/L/D. • SK TPTGR, SK Baperjakat.			
		11	Pimpinan kami telah mendorong staf pengawasan untuk terlibat dalam komite-komite organisasi K/L/Pemda (seperti satgas, forum) yang penting apabila diperlukan.	Terdapat SK satgas, forum, dll.	Pembentukan Forum, Satgas untuk berbagai pengetahuan.			
		12	Kami telah mempertimbangkan masukan dari manajemen dalam pengembangan rencana kegiatan pengawasan.		• PKPT berbasis risiko dengan sasaran audit 3E dan <i>advisory services</i>.			

					• SOP Penyusunan PKPT berbasis risiko.			
		13	Kami telah saling bertukar informasi dengan jajaran pimpinan K/L/Pemda secara berkala terkait dengan rencana dan kegiatan pengawasan intern.	Terdapat notulen/laporan hasil forum/rapat tersebut.	• PKPT berbasis risiko dengan sasaran audit 3E dan <i>advisory services</i>. • SOP Penyusunan PKPT berbasis risiko.			
		14	Unit kerja kami menjadi penghubung organisasi K/L/Pemda (sebagai wakil manajemen) dalam berkoordinasi dengan auditor.		<i>Internal Audit Charter</i> (yang mencakup layanan audit kinerja-3E, pemberian layanan <i>advisory</i>).			
		15	Jajaran pimpinan unit kerja kami dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan (penting) dalam tim manajemen organisasi K/L/Pemda dan masukannya dianggap penting dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.	Jajaran pimpinan APIP selalu diundang untuk mengikuti rapat manajemen puncak organisasi (ada notulennya).				
APIP berkoordinasi dengan pihak lain yang menyediakan jasa pemberian advis dan penjaminan (<i>other review groups</i>)	1. APIP berbagi informasi dan berkoordinasi dengan pihak external maupun internal yang terkait dengan penyediaan jasa pemberian advis dan penjaminan (<i>providers of assurance and advisory services</i>) untuk memastikan cakupan pelayanan dan meminimalisir duplikasi kegiatan pengawasan.	16	Kami telah mengidentifikasi pihak-pihak selain kami yang memberikan jasa penjaminan (<i>assurance</i>) dan pemberian saran (<i>advisory services</i>) bagi organisasi K/L/Pemda (seperti BPKP, KAP, BPK, Inspektorat lain).		<i>Internal Audit Charter</i> (antara lain mencakup hubungan kerja dan koordinasi dengan unit pemberi jasa penjaminan dan pemberi saran lainnya).			
		17	Kami telah mengidentifikasi area-area yang dapat memberikan manfaat melalui berbagai perencanaan, informasi, maupun hasil kegiatan pengawasan dengan pihak lain tersebut 9seperti BPKP, KAP, BPK, Inspektorat lain).		<i>Internal Audit Charter</i> (antara lain mencakup hubungan kerja dan koordinasi dengan unit pemberi jasa penjaminan dan pemberi saran lainnya).			
		18	Kami telah mengembangkan proses atau mekanisme untuk berbagi informasi maupun berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak lain tersebut terkait dengan isu-isu yang menjadi perhatian Bersama.	Proses atau mekanisme untuk berbagi informasi maupun berkomunikasi dengan pihak lain tersebut dapat berupa rapat, forum, dll. (ada notulen/laporannya).	Kebijakan/mekanisme koordinasi dengan unit pemberi jasa penjaminan dan pemberi saran lainnya yang sama-sama melakukan fungsi reviu lain seperti APIP lain dan eksternal auditor BPK, KPK; dalam perencanaan pengawasan atau pemanfaatan hasil pengawasan.			

		19	Kami telah secara reguler berkomunikasi dengan auditor eksternal dan berbagi informasi rencana kerja untuk saling mendukung dan melengkapi.		Pelaksanaan rapat koordinasi dengan unit pemberi jasa penjaminan dan pemberi saran lainnya.			
		20	Komunikasi yang dilakukan dengan auditor eksternal maupun dengan pihak penyedia jasa lainnya telah dapat meminimalisir duplikasi atas kegiatan pengawasan dan memaksimalkan cakupan kegiatan pengawasan.					
LEVEL 4								
Pimpinan APIP mampu memberikan saran-saran dan mempengaruhi jajaran manajemen organisasi	1. Adanya pemahaman organisasi dan penghargaan atas visi, kepemimpinan, dan pandangan ke depan pimpinan APIP.	21	Pimpinan kami secara berkala berkomunikasi dan berinteraksi secara langsung dengan pimpinan tertinggi K/L/Pemda.					
	2. Adanya hubungan yang baik antara pimpinan APIP dengan jajaran manajemen organisasi.	22	Pimpinan kami telah memberikan kontribusi terhadap K/L/Pemda dengan memberikan sumbang saran atas isu-isu penting dan strategis.					
		23	Pimpinan kami telah mengembangkan budaya Kerjasama dan kepercayaan antara auditor dengan jajaran pimpinan organisasi baik untuk kegiatan pengawasan intern maupun terkait isu-isu organisasi.					
		24	Pimpinan kami telah berbagi pengetahuan tentang praktik terbaik dalam operasional organisasi dengan seluruh unit kerja/SKPD di lingkungan K/L/Pemda.					
		25	Pimpinan kami telah menetapkan suatu contoh nyata mengenai manajemen yang efektif, etis, dan berwawasan berdasarkan saran-saran dan petunjuk yang diberikan kepada pihak lain sebelumnya.					

		26	Pimpinan kami telah mendukung manajemen K/L/Pemda dengan mengembangkan hubungan yang kooperatif, transparan, dan formal dengan auditor eksternal dan mendorong auditor eksternal untuk senantiasa memanfaatkan hasil pengawasan intern.					
		27	Jajaran pimpinan K/L/Pemda mempercayai dan menghargai saran-saran yang kami berikan.					
LEVEL 5								
Adanya hubungan yang efektif dan berkesinambungan.	1. APIP mampu memelihara hubungan yang baik dengan para pemangku kepentingan dan jajaran pimpinan/ manajemen organisasi.	28	Kami telah berpartisipasi dan menjadi pengamat pada semua komite atau forum-forum penting organisasi K/L/Pemda (misalnya dalam forum penyusunan anggaran K/L/Pemda).					
		29	Kami telah memfasilitasi pembelajaran organisasi melalui identifikasi perubahan lingkungan global yang berpengaruh terhadap organisasi.					
		30	Kami telah memiliki suatu mekanisme untuk melakukan pertemuan secara berkala dengan pimpinan K/L/Pemda dan para pemangku kepentingan utama.					
		31	Para pemangku kepentingan utama, jajaran pimpinan organisasi K/L/Pemda dan komite audit memahami dan menghargai unit kami.					
		32	Kami dipandang sebagai partner bisnis yang mumpuni/ kredibel di seluruh organisasi K/L/Pemda.					
		33	Visi dan nilai-nilai unit kami sesuai dengan visi dan nilai-nilai organisasi K/L/Pemda dan selaras dengan pemangku kepentingan utama.					
		34	Unit kami memegang peranan penting dalam pengembangan komitmen pimpinan.					

		35	Auditor eksternal mengandalkan hasil-hasil pekerjaan kami.					
--	--	----	--	--	--	--	--	--

FORMULIR ISIAN PENILAIAN MANDIRI KAPABILITAS APIP

ELEMEN VI : STRUKTUR DAN TATA KELOLA

Key process Area	No	Uraian/Pernyataan	Penjelasan Pernyataan	Contoh Infrastruktur	Pilihan Jawaban		
					Ya	Sebagian	Tidak
Level 2							
Hubungan pelaporan telah terbangun	1. APIP telah membangun hubungan pelaporan (laporan kegiatan dan laporan administrasi) secara formal di lingkungannya.	1	Internal Audit Charter telah mendefinisikan secara formal visi, misi, tujuan, wewenang dan tanggung jawab unit APIP dan telah memperoleh persetujuan secara formal dari pimpinan organisasi K/L/Pemda.		Internal Audit Charter		
		2	Tujuan, wewenang dan tanggung jawab unit APIP telah dikomunikasikan ke seluruh organisasi K/L/Pemda.	Komunikasi tersebut bisa dalam bentuk sosialisasi saat gelar pengawasan, dan rapat pimpinan.	- Internal Audit Charter - Penyelenggaraan sosialisasi, rapat, dll terkait kewenangan dan tanggung jawab unit APIP yang ada dalam dokumen Internal Audit Charter.		
		3	Kami telah memiliki system pelaporan kegiatan dan pelaporan administrasi pengawasan (functional and administrative reporting) secara formal kepada level pimpinan K/L/Pemda.	Adanya prosedur/system yang menunjukkan bahwa APIP melapor secara fungsional ke Pimpinan K/L/Pemda dan secara administratif ke Sckjcn/Scsma/Sckda.	SOP mengenai penyampaian Ikhtisar Hasil Pengawasan ke Pimpinan K/L/D.		
		4	Kami telah melakukan reviu dan pemutakhiran internal audit charter secara berkala dan mendapat persetujuan pimpinan organisasi.		Internal Audit Charter		
		5	Internal Audit Charter dapat dijadikan dasar bagi manajemen organisasi K/L/Pemda untuk mengevaluasi kegiatan unit APIP.		Internal Audit Charter		
APIP memiliki akses penuh	1. Adanya kewenangan bagi APIP untuk mengakses	6	Internal Audit Charter telah mencakup kewenangan untuk		Internal Audit Charter		

terhadap informasi asset dan personal unit, organisasi K/L/Pemda	informasi,asset, dan personal organisasi K/L/Pemda, yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas pengawasan internnya.		mengakses seluruh informasi, asset, dan personal organisasi K/L/Pemda.				
		7	Kami memiliki kebijakan dan prosedur formal terkait dengan kewenangan untuk mengakses secara penuh, bebas, dan tidak terbatas atas seluruh informasi, asset dan personal organisasi K/L/Pemda yang diaudit, serta tidak ada intervensi dan pembatasan ruang lingkup.		<i>Internal Audit Charter</i> dan kebijakan SOP turunan terakrit kewenangan APIP.		
		8	Kami telah menetapkan prosedur yang harus diikuti jika auditi tidak mengungkapkan dokumen yang diperlukan selama pelaksanaan tugas pengawasan.	Terdapat SOP mengenai apa yang harus dilakukan auditor jika auditi tidak mengungkapkan dokumen yang diperlukan selama pelaksanaan tugas pengawasan.	Pedoman/SOP/Juklak tentang Pelaksanaan Penugasan sejak perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil audit.		
LEVEL 3							
Adanya mekanisme penganggaran kegiatan pengawasan	1. APIP telah membangun proses penganggaran yang transparan dan sehat untuk memastikan ketersediaan sumber daya dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.	9	Penganggaran kami mencakup sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan <i>assurance and advisory services</i> guna mengatasi risiko organisasi yang telah diidentifikasi sebelumnya (proses penganggaran didasarkan pada rencana pengawasan berbasis risiko).		• PKPT berbasis risiko dengan sasaran audit 3E dan <i>advisory services</i>. • SOP Penyusunan PKPT berbasis risiko.		
		10	Kami telah memiliki proses/ mekanisme persetujuan terhadap sumber daya yang dibutuhkan (termasuk pendanaan) yang transparan serta kewenangan untuk mengajukan besaran anggaran sesuai yang dibutuhkan.		Kebijakan/Prosedur/ Mekanisme Pengajuan, Usulan Anggaran APIP dengan memerhatikan risiko organisasi.		
		11	Kami telah mengidentifikasi dampak dari adanya pembatasan sumber daya dan telah mengomunikasikan jajaran pimpinan dalam organisasi K/L/Pemda.	Terdapat hasil analisis dampak yang dimaksud.	Kebijakan/Prosedur/ Mekanisme Pengajuan, Usulan Anggaran APIP dengan memerhatikan risiko organisasi.		
		12	Kami telah memiliki anggaran yang memadai untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami secara efektif.				

		13	Alokasi anggaran yang kami terima telah mempertimbangkan risiko dan dampak apabila terdapat kegiatan pengawasan yang tidak dilakukan.				
Adanya pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan APIP oleh manajemen organisasi K/L/Pemda	1. Adanya proses/mechanisme dalam organisasi K/L/Pemda yang melibatkan pimpinan organisasi untuk mengawasi, memberikan saran dan mereviu hasil-hasil dari kegiatan APIP untuk menguatkan independensi dan memastikan Tindakan yang tepat telah dilaksanakan, guna meningkatkan dukungan terhadap APIP dan memperluas ruang lingkup APIP.	14	Kami telah merekomendasikan dan memberikan kontribusi dalam membangun mekanisme/proses yang tepat dalam rangka pengawasan dan pemberian saran oleh jajaran pimpinan K/L/Pemda terkait dengan kegiatan kami.		• SOP mengenai Pelaporan Ikhtisar Hasil Pengawasan. • Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan secara berkala.		
		15	Kami telah membangun kebijakan dan prosedur dalam rangka berkomunikasi, berinteraksi, dan melaporkan kepada jajaran pimpinan K/L/Pemda yang bertugas mengawasi APIP.	Terdapat mekanisme pengawasan oleh jajaran pimpinan organisasi terhadap APIP.	SOP mengenai Pelaporan Ikhtisar Hasil Pengawasan.		
		16	Kami telah melakukan pertemuan secara berkala dengan jajaran pimpinan K/L/Pemda dalam rangka meningkatkan kepedulian organisasi terhadap tata Kelola, penilaian risiko, pengawasan internal, dan pentingnya lingkungan pengendalian yang kuat.	Notulen/Laporan.	Adanya kegiatan-kegiatan penting dalam organisasi K/L/D Dimana Pimpinan APIP menjadi bagian yang terintegrasi dalam tim manajemen K/L/D.		
		17	Kami mendorong jajaran pimpinan K/L/Pemda untuk mendukung independensi APIP melalui usaha-usaha seperti mengomunikasikan mandat, kewenangan, independensi, dan manfaat kegiatan pengawasan intern ke seluruh organisasi.		• <i>Internal Audit Charter</i> (yang mencakup layanan audit kinerja-3E, pemberian layanan <i>advisory</i>). • Adanya pihak dalam organisasi Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah Kinerja APIP.		
		18	Kami telah mengkoordinasikan kegiatan kami dan berbagi informasi hasil pengawasan kami dengan pihak lain yang memberikan jasa penjaminan (<i>assurance</i>) dan pemberian saran (<i>advisory services</i>) bagi organisasi		Kebijakan/mechanisme koordinasi dengan unit pemberi jasa penjaminan dan pemberi saran lainnya yang sama-sama melakukan fungsi reviu lain seperti APIP lain dan eksternal auditor BPK, KPK, dalam perencanaan pengawasan		

			K/L/Pemda (seperti BPKP, KAP, BPK, Inspektorat lain).		atau pemanfaatan hasil pengawasan.			
		19	Adanya penguatan independensi, obyektivitas, dan efektivitas unit kerja kami melalui dukungan nyata dari jajaran pimpinan organisasi K/L/Pemda.		Adanya pihak dalam organisasi Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah yang mengawasi kinerja APIP.			
		20	Tidak terdapat duplikasi pengawasan yang dilakukan unit kami dengan pihak lain yang memberikan jasa penjaminan (<i>assurance</i>) dan pemberian saran (<i>advisory services</i>) bagi organisasi K/L/Pemda (seperti BPKP, KAP, BPK, Inspektorat lain).					
		21	<i>Internal Audit Charter</i> telah mencakup aturan mengenai pengawasan terhadap unit kami oleh jajaran pimpinan K/L/Pemda yang diberikan kewenangan untuk mengawasi kinerja APIP.		<i>Internal Audit Charter</i> (yang mencakup layanan audit kinerja-3E, pemberian layanan <i>advisory</i>).			
LEVEL 4								
Adanya laporan pimpinan APIP kepada pimpinan tertinggi organisasi K/L/Pemda	1. Adanya penguatan independensi pimpinan APIP dengan membangun mekanisme pelaporan secara langsung kepada pimpinan tertinggi organisasi K/L/Pemda.	22	<i>Internal Audit Charter</i> telah menggambarkan pola hubungan pelaporan secara langsung dari pimpinan APIP kepada pimpinan tertinggi organisasi K/L/Pemda.					
		23	Kebijakan organisasi K/L/Pemda memungkinkan pimpinan kami untuk melakukan pertemuan secara berkala dan berkomunikasi secara langsung dengan pimpinan tertinggi organisasi K/L/Pemda.					
		24	Pola hubungan pelaporan pimpinan APIP dengan pimpinan tertinggi organisasi K/L/Pemda memperkuat independensi unit kerja kami dan memungkinkan kami memberikan saran-saran yang bernilai dan terpercaya bagi organisasi.					
Adanya pengawasan	Adanya badan pengawas APIP yang anggotanya mencakup pihak	25	Adanya badan pengawas independent (di luar jajaran					

terhadap APIP oleh pihak independent.	independent (di luar jajaran manajemen organisasi K/L/Pemda) guna memastikan independensi APIP, mengembangkan lingkup pengawasan APIP, dan membantu menguatkan akuntabilitas organisasi K/L/Pemda.		manajemen organisasi K/L/Pemda) yang memberikan pengawasan dan arahan fungsional kepada APIP.					
		26	Kami telah ikut berkontribusi dalam pembentukan dan kinerja badan pengawas independent dengan cara merekomendasikan atribut-atribut keanggotaan, membantu pengembangan aturan, menyediakan dukungan kesekretariatan dan mengarahkan agenda.					
		27	Kami telah mengembangkan kebijakan dan prosedur untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan memberikan laporan kepada badan pengawas independent tersebut.					
		28	Kami telah mengembangkan peran badan pengawas independent dalam memberikan rekomendasi terhadap penunjukan dan pemberhentian pimpinan unit kerja kami.					
		29	<i>Internal Audit Charter</i> telah mencakup aturan mengenai pengawasan terhadap unit kami oleh badan pengawas independent.					
LEVEL 5								
Adanya independensi kemampuan, dan kewenangan yang penuh	1. APIP telah menunjukkan independensi, kemampuan dan kewenangan yang penuh.	30	Kami telah memiliki independensi, kemampuan dan kewenangan penuh yang telah diformalkan dalam peraturan dan mandat dengan dukungan manajemen dan badan pengawas independent, dalam menentukan ruang lingkup, melaksanakan dan mengomunikasikan hasil pengawasan.					
		31	semua ucapan dan Tindakan jajaran pimpinan organisasi K/L/Pemda, badan pengawas independent, dan semua					

			pemangku kepentingan telah menunjukkan penerimaan dan dukungan penuh terhadap keberadaan unit kerja kami.					
		32	Budaya organisasi K/L/Pemda secara nyata mengakui dan menerima nilai-nilai dan peran dari pengawasan intern.					
		33	Kami telah membandingkan indicator kunci keberhasilan (<i>key success factor</i>) struktur tata kelola kami dengan praktik yang berlaku <i>universal</i> (misal landasan hukum, mandat dari komite audit, <i>internal audit charter</i> , kebijakan organisasi).					
		34	Pemerintah RI dan organisasi K/L/Pemda telah menunjukkan komitmen nyata terkait dengan peran pengawasan intern.					

FORMULIR ISIAN PENILAIAN MANDIRI KAPABILITAS APIP

ELEMEN I : PERAN DAN LAYANAN

Key process Area		No	Uraian/Pernyataan	Penjelasan Pernyataan	Contoh Infrastruktur	Pilihan Jawaban		
						Ya	Sebagian	Tidak
Level 2								
APIP memberikan jasa Audit Ketaatan (compliance auditing)	1. APIP melaksanakan audit kepatuhan terhadap suatu area, proses, atau sistem untuk menilai kesesuaiannya dengan peraturan yang berlaku, termasuk kebijakan, rencana, prosedur, hukum, peraturan, kontrak, atau kriteria lain yang mengatur pelaksanaan area, proses, atau sistem tersebut.	1	Kami telah melaksanakan kegiatan pengawasan dalam bentuk audit atas transaksi atau dokumen tertentu untuk memastikan keakuratan perhitungan serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.	Auditor telah menerapkan prosedur audit standar, seperti vouching dan tracing, untuk menilai ketepatan perhitungan serta memastikan kepatuhan suatu area, proses, atau sistem terhadap peraturan yang berlaku, termasuk kebijakan, rencana, prosedur, hukum, kontrak, dan kriteria lainnya.	Pedoman, SOP, atau juklak mengenai pelaksanaan penugasan audit mencakup seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan hasil audit.			
		2	Kegiatan pengawasan yang kami lakukan bersifat audit kepatuhan (compliance auditing).	PKPT/PKAT memuat rencana audit untuk menilai kesesuaian antara kondisi yang ada dengan kriteria yang ditetapkan. Audit kepatuhan mencakup audit terhadap transaksi keuangan, audit terkait kelayakan pengambilan keputusan administratif, serta setiap audit yang menggunakan pendekatan berbasis proses.	PKPT yang berfokus pada prioritas manajemen/risiko tinggi dengan tujuan auditing kepatuhan.			
		3	Kami sudah memiliki internal audit charter yang menjelaskan mengenai jenis jasa assurance yang dapat diberikan oleh APIP saat ini, yaitu audit kepatuhan (compliance auditing).	Terdapat Internal Audit Charter (IAC) yang menjelaskan jasa assurance yang dapat diberikan APIP, yaitu audit kepatuhan. IAC memuat visi, misi, tujuan, kewenangan, tanggung jawab, independensi, akses, kerahasiaan, ruang lingkup audit, standar, hubungan dengan audit eksternal, dan pelaporan audit. IAC dibuat untuk memastikan komitmen pimpinan organisasi agar: 1) ruang lingkup tugas APIP tidak terbatas; 2) sumber daya pengawasan intern terjamin; 3) akses informasi yang dibutuhkan pengawasan intern terjamin.	Internal audit charter mencakup layanan penjaminan dari APIP berupa audit kepatuhan (compliance auditing), yang memastikan bahwa organisasi mematuhi peraturan dan kebijakan yang berlaku.			

		4	Setiap tim yang melaksanakan tugas pengawasan telah menyusun rencana dan program kerja audit di tingkat tim secara terstruktur, yang mencakup pengidentifikasian kriteria yang relevan, pendokumentasian survei pengendalian intern, penentuan sasaran, ruang lingkup, dan metodologi pengawasan, serta pengembangan rencana audit yang rinci.	Setiap tim yang melaksanakan tugas pengawasan telah menyusun rencana dan program kerja audit di tingkat tim audit, sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah. Pengendalian mutu terhadap penyusunan rencana dan program tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Pedoman/SOP/Juklak tentang Pelaksanaan Penugasan sejak perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil audit.			
		5	Kami telah melaksanakan tugas pengawasan yang mencakup penerapan prosedur pengawasan yang terperinci, penyusunan kertas kerja (KKA) terkait prosedur yang dilaksanakan beserta hasil-hasilnya, evaluasi terhadap informasi yang diperoleh, penyusunan simpulan yang jelas, serta pengembangan rekomendasi.	(1) Auditor telah melaksanakan prosedur audit untuk memverifikasi kesesuaian dan kepatuhan antara kondisi yang ada dengan kriteria yang berlaku, seperti prosedur analitis, konfirmasi, dan pemeriksaan fisik. (2) Setiap prosedur audit yang dilakukan, baik yang dilaksanakan maupun yang tidak dilaksanakan, telah didokumentasikan dengan jelas, contohnya: KKA yang merujuk pada nomor PKA dan PKA yang merujuk pada nomor KKA. (3) Auditor telah melakukan evaluasi terhadap informasi yang diperoleh. (4) Auditor menyusun kesimpulan yang didasarkan pada bukti-bukti relevan yang tercatat dalam KKA. (5) Auditor mengembangkan rekomendasi yang bertujuan untuk mengatasi penyebab masalah yang ditemukan. (6) Penggunaan kartu kendali mutu dan pelaksanaan supervisi juga diterapkan.	Pedoman /SOP/Juklak tentang Pelaksanaan Penugasan sejak perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil audit.			

		6	Kami telah menyusun laporan untuk menyampaikan hasil dari penugasan pengawasan.	(1) LHA disusun sesuai dengan pedoman kendali mutu audit aparat pengawas instansi pemerintah—prosedur pengendalian mutu pelaporan audit, yang mencakup penyusunan konsep LHA oleh ketua tim dengan bantuan anggota tim berdasarkan hasil audit yang terdokumentasi dalam KKA dan temuan audit yang sudah dikomunikasikan dengan auditi. (2) Konsep LHA diperiksa kembali oleh pengendali teknis. (3) Konsep LHA direvisi oleh pengendali mutu atau pimpinan APIP. (4) LHA final didistribusikan kepada pihak-pihak yang berwenang. (5) Terdapat mekanisme pemantauan tindak lanjut sesuai dengan pedoman kendali mutu audit aparat pengawasan instansi pemerintah.	Pedoman/SOP/Juklak tentang Pelaksanaan penugasan sejak perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil audit.			
		7	Melalui audit yang kami lakukan, kami dapat memberikan keyakinan yang cukup bahwa area/proses/sistem yang diaudit telah mematuhi ketentuan yang berlaku, seperti kebijakan, rencana, prosedur, hukum, peraturan, kontrak, atau kriteria lainnya.	(1) Perencanaan pengawasan di tingkat tim audit telah disusun sesuai dengan pedoman kendali mutu audit bagi aparat pengawasan instansi pemerintah. (2) Prosedur atau langkah-langkah audit yang tercantum dalam program kerja audit telah dilaksanakan sesuai dengan tujuannya. (3) Mekanisme pelaporan dan tindak lanjut telah dilakukan sesuai dengan pedoman kendali mutu audit bagi aparat pengawasan instansi pemerintah. (4) LHA menunjukkan bahwa area, proses, atau sistem yang diaudit telah sesuai	Pedoman/SOP/Juklak/ tentang pelaksanaan penugasan sejak perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil audit.			

				dengan ketentuan pelaksanaannya.				
		8	Audit ketaatan yang kami lakukan telah berhasil mencegah dan mendeteksi tindakan ilegal serta penyimpangan yang berkaitan dengan kebijakan, prosedur, atau persyaratan kontrak yang berlaku.	(1) Perencanaan pengawasan oleh tim audit telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman kendali mutu audit aparat pengawasan instansi pemerintah. (2) Prosedur atau langkah-langkah yang dituangkan dalam program kerja audit telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. (3) Mekanisme pelaporan dan tindak lanjut telah sesuai dengan pedoman kendali mutu audit aparat pengawasan instansi pemerintah.	Pedoman/SOP/Juklak/ tentang pelaksanaan penugasan sejak perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil audit.			
		9	Rekomendasi yang kami berikan telah diteruskan untuk ditindaklanjuti.	(1) Perencanaan pengawasan oleh tim audit telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman kendali mutu audit aparat pengawasan instansi pemerintah. (2) Prosedur atau langkah-langkah yang dituangkan dalam program kerja audit telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. (3) Mekanisme pelaporan dan tindak lanjut telah sesuai dengan pedoman kendali mutu audit aparat pengawasan instansi pemerintah.	Pedoman/SOP/Juklak/ tentang pemantauan Tindak Lanjut.			
Level 3								
APIP melaksanakan <i>Value For Money</i> Audit/Program Evaluasi	1. APIP melakukan evaluasi dan pelaporan terkait efisiensi, efektivitas, dan penghematan (dalam operasi, aktivitas, atau program), serta aspek-aspek yang berhubungan dengan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian, serta pencapaian hasil yang diperoleh.	10	Kegiatan pengawasan yang kami lakukan meliputi evaluasi terhadap efisiensi, efektivitas, dan penghematan dalam operasional, aktivitas, atau program organisasi (K/L/Pemda) serta pencapaian hasil-hasil yang telah diperoleh.	PKPT/PKAT berisi rencana audit untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan kehematan dari operasi, aktivitas atau program auditi.	PKPT berbasis risiko dengan sasaran audit 3E dan <i>advisory services</i> .			

		11	Kegiatan pengawasan lainnya, seperti evaluasi, revidi, dan pemantauan, yang kami lakukan berkaitan dengan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian.	PKPT/PKAT berisi rencana audit untuk melakukan penugasan pengawasan lain (evaluasi, revidi, pemantauan) terkait dengan tata Kelola/manajemen risiko/pengendalian.	PKPT berbasis risiko dengan sasaran audit 3E dan <i>advisory services</i> .			
		12	Kami telah memiliki Internal Audit Charter yang menjelaskan mengenai jenis layanan assurance yang dapat diberikan oleh APIP saat ini, yaitu audit value for money (audit atas ekonomis, efisiensi, dan efektivitas 3E) serta evaluasi program/kebijakan.	Terdapat IAC yang didalamnya mengungkapkan mengenai sifat jasa assurance yang dapat diberikan APIP saat ini, yaitu value for money audit (audit atas ekonomis, efisiensi, efektivitas 3E)/ evaluasi program/evaluasi kebijakan).	<i>Internal Audit Charter</i> (yang mencakup layanan <i>audit kinerja-3E</i> , <i>pemberian layanan advisory</i>).			
		13	Pengawasan yang telah kami lakukan berhasil mendorong perbaikan dalam tata kelola, manajemen risiko, serta proses pengendalian organisasi (KL/Pemda).	(1)PKA, KKA, dan LHA untuk tujuan tersebut disusun sesuai dengan Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah. (2)Rekomendasi sudah sesuai dengan pedoman kendali mutu audit aparat pengawasan instansi pemerintah dan dapat ditindaklanjuti.	Pedoman/panduan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan atas Audit 3E, pemberian <i>layanan Advisory</i> .			
		14	Kami telah memberikan kontribusi terhadap perubahan yang mengarah pada peningkatan efektivitas, efisiensi, dan kinerja organisasi.	(1)PKA, KKA, dan LHA untuk tujuan tersebut disusun sesuai dengan Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah. (2)Rekomendasi sudah sesuai dengan pedoman kendali mutu audit aparat pengawasan instansi pemerintah dan dapat ditindaklanjuti.	Pedoman/panduan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan atas Audit 3E, pemberian <i>layanan Advisory</i> .			
		15	Kegiatan pengawasan yang kami laksanakan telah berhasil mengurangi besaran atau dampak dari risiko organisasi yang mungkin terjadi.	(1) PKA, KKA, dan LHA untuk tujuan tersebut disusun sesuai dengan Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah. (2) Rekomendasi sudah sesuai dengan pedoman kendali mutu audit aparat pengawasan instansi	Pedoman/panduan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan atas Audit 3E, pemberian <i>layanan Advisory</i> .			

				pemerintah dan dapat ditindaklanjuti.				
APIP memberikan Jasa Advis (<i>Advisory Services</i>)	1. APIP melakukan analisis terhadap kondisi dan situasi yang ada, serta memberikan pedoman dan nasihat kepada manajemen. Layanan advis yang diberikan bertujuan untuk meningkatkan nilai tanpa menggantikan tanggung jawab manajemen. Layanan advis tersebut disalurkan melalui fasilitas, bukan sebagai bentuk penjaminan, yang mencakup pelatihan, tinjauan pengembangan sistem, penilaian mandiri atas pengendalian dan kinerja, konseling, serta pemberian nasihat.	16	Kami telah melaksanakan tugas pengawasan dengan memberikan jasa advis tanpa mengambil alih tanggung jawab manajemen, yang mencakup pelatihan, tinjauan pengembangan sistem, penilaian pengendalian mandiri (control self assessment/CSA), serta penilaian kinerja mandiri, konseling, dan pemberian nasihat.	(1) PKPT/PKAT berisi rencana APIP untuk melakukan pemberian jasa advis (misalnya; APIP melakukan reviu laporan keuangan, tetapi tidak boleh ikut Menyusun laporan keuangan tersebut. (2) Mekanisme pemberian jasa advis tersebut diatur dalam pedoman atau panduan atau SOP.	PKPT berbasis risiko dengan sasaran audit 3E dan <i>Advisory services</i> .			
		17	Kami sudah memiliki Internal Audit Charter yang menguraikan sifat layanan konsultasi yang dapat diberikan oleh APIP saat ini, serta mencantumkan berbagai jenis layanan advisory yang dapat dilaksanakan oleh APIP.	Terdapat IAC yang didalamnya mengungkap mengenai sifat jasa pemberian saran (advisory services) yang dapat diberikan APIP saat ini, dan mencantumkan jenis-jenis advisory services yang dapat dilakukan APIP saat ini.	<i>Internal Audit Charter</i> (yang mencakup layanan <i>audit kinerja-3E</i> , <i>pemberian layanan advisory</i>).			
		18	Jasa konsultasi kami memberikan kontribusi yang bernilai tambah bagi organisasi.	(1) Mekanisme pemberian jasa advis sudah sesuai dengan panduan/pedoman/SOP. (2) Terdapat rekomendasi yang memberikan nilai tambah bagi organisasi.	Pedoman/panduan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan atas Audit 3E, pemberian <i>layanan Advisory</i> .			
		19	Kami telah melaksanakan praktik-praktik yang memastikan bahwa independensi dan obyektivitas kami tetap terjaga selama pemberian jasa advis.	(1) Mekanisme pemberian jasa advis sudah sesuai dengan panduan/pedoman/SOP. (2) Pembuktian adanya independensi dan obyektivitas dapat diperoleh melalui pernyataan independensi dan obyektivitas yang dibuat oleh auditor, dan juga dapat ditambahkan dari "kuesioner pengguna" setelah selesainya pemberian jasa advis (bila memungkinkan).	Surat pernyataan independensi dan obyektivitas auditor dan kuesioner kepuasan pelanggan.			
Level 4								
APIP memberikan jaminan	1. APIP telah melaksanakan kegiatan pengawasan secara menyeluruh untuk memberikan	20	Kami telah melakukan audit terhadap manajemen risiko di					

menyeluruh atas tata Kelola, manajemen risiko, dan pengendalian organisasi.	opini terkait efektivitas dan kecukupan tata kelola organisasi, manajemen risiko, serta proses pengendalian.		seluruh lingkup organisasi (<i>enterprise wide risk</i>).					
	2. APIP telah mengoordinasikan kegiatan pengawasannya dengan baik, sehingga dapat memberikan jaminan yang memadai bahwa seluruh proses dalam organisasi telah berjalan dengan cukup dan berfungsi sesuai harapan untuk mencapai tujuan organisasi.	21	Kami telah melakukan pengujian terhadap kewajaran asersi manajemen mengenai keefektifan tata kelola, manajemen risiko, dan proses pengendalian.					
		22	Kami telah memiliki Internal Audit Charter yang di dalamnya mencakup kewenangan untuk memberikan opini mengenai organisasi secara keseluruhan, termasuk efektivitas tata kelola, manajemen risiko, dan proses pengendalian.					
		23	Kami telah menyusun perencanaan pengawasan dengan pendekatan berbasis risiko.					
		24	Pimpinan instansi (K/L/Pemda) serta pemangku kepentingan kami meyakini bahwa tata kelola organisasi, manajemen risiko, dan proses pengendalian yang diterapkan telah memberikan jaminan yang cukup untuk mencapai tujuan organisasi.					
Level 5								
Internal Auditing dianggap sebagai agen perubahan kunci	1. APIP telah cukup mengembangkan kapasitas kepemimpinan dan profesionalisme untuk dapat memberikan pandangan-pandangan ke depan dan bertindak sebagai katalis guna menghasilkan perubahan positif dalam organisasi.	25	Kegiatan pengawasan kami telah dapat memberikan jaminan memadai dan pemberian saran (<i>advisory services</i>) termasuk cakupan audit pada area tata kelola, pengendalian Tingkat entitas, kecurangan, usulan strategi baru, program atau praktek bisnis yang dibutuhkan oleh organisasi.					
		26	Kami telah melakukan <i>update</i> atas <i>internal audit charter</i> yang mencakup perluasan peran					

			dan ruang lingkup kegiatan pengawasan.					
		27	Kami telah memiliki kapasitas kepemimpinan dan profesionalisme yang maju sehingga dapat berperan sebagai katalis, agen perubahan dan mampu memberikan prediksi ke depan untuk mendorong perubahan positif bagi organisasi.					
		28	Kami telah menggunakan manajemen risiko organisasi secara keseluruhan (<i>Enterprise Risk Management</i>) sebagai suatu kesatuan dari strategi APIP.					
		29	Focus strategi kami ditekankan pada inovasi, layanan kepada pemangku kepentingan dan pemberian nilai.					
		30	Kami berperan penting (<i>key player</i>) dalam memberikan kontribusi bagi penentuan visi organisasi dalam menanggapi kebutuhan intern maupun ekstern organisasi.					

FORMULIR ISIAN PENILAIAN MANDIRI KAPABILITAS APIP

ELEMEN II : PENGELOLAAN SDM

Key process Area	No	Uraian/Pernyataan	Penjelasan Pernyataan	Contoh Infrastruktur	Pilihan Jawaban		
					Ya	Sebagian	Tidak
Level 2 APIP mengidentifikasi dan merekrut orang-orang yang kompeten.	1	1) Kegiatan pengawasan dilaksanakan oleh auditor yang memiliki kompetensi yang relevan.	Kami telah mengidentifikasi kompetensi (pengetahuan, keahlian, teknis, sikap) dan kompetensi lain yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan pengawasan yang telah direncanakan.	APIP memiliki dokumen hasil identifikasi atas kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan pengawasan yang telah direncanakan.	- Peta Kompetensi SDM (Data pegawai termasuk kompetensinya). - SOP penyusunan peta kompetensinya.		

		2	Kami telah memiliki uraian jabatan (job description) untuk setiap posisi jabatan di unit kerja kami yang disusun berdasarkan analisis jabatan dan dievaluasi secara berkala.	Terdapat dokumen uraian jabatan untuk setiap posisi jabatan pada APIP. Uraian jabatan berisi: Uraian pekerjaan, (tanggung jawab), wewenang, deskripsi, pekerjaan, dll); Ukuran kinerja yang dipersyaratkan sebagai indikator terhadap keberhasilan menyelesaikan tanggung jawab utama jabatan; persyaratan jabatan (<i>job requirement</i>).	Uraian jabatan (termasuk peraturan pemberlakuannya).			
		3	Kami telah menentukan klasifikasi pemberian tunjangan untuk setiap posisi jabatan di unit kerja kami.	APIP telah Menyusun klasifikasi pemberian insentif bagi staf APIP sesuai dengan uraian jabatan, kompetensi, pengalaman, dan kinerja; dan telah mengusulkannya kepada pimpinan K/L/Pemda.	Klasifikasi pemberian tunjangan untuk setiap posisi jabatan di unit kerja APIP.			
		4	Proses rekrutmen kami telah dapat memperoleh pegawai yang kompeten (memenuhi persyaratan pengetahuan, keahlian, dan kompetensi lain yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengawasan intern).	1) APIP memiliki auditor dengan jumlah sesuai yang diperlukan dan dengan kualitas sesuai dengan hasil identifikasi kompetensi. 2) Terdapat dokumen permintaan staf yang dibutuhkan berdasarkan hasil identifikasi kompetensi.	Penghitungan kebutuhan auditor dan SDM APIP beserta panduan rekrutmen.			
		5	Kegiatan pengawasan intern yang kami lakukan sudah memenuhi kecermatan profesi (<i>due professional care</i>) dan menghasilkan temuan, simpulan, dan rekomendasi yang bermutu.	1) Seluruh penugasan pengawasan dilaksanakan oleh auditor yang kompeten (kompeten dapat dilihat dari apakah yang sudah memiliki sertifikasi auditor dan atau sertifikasi profesi internal auditor lainnya. Bila belum bersertifikat (sambil yang menunggu proses sertifikasi), latar belakang Pendidikan yang adalah akuntansi atau pernah mengikuti diklat terkait kegiatan pengawasan yang dilakukan. 2) Apabila penugasan pengawasan menggunakan tenaga ahli dari luar APIP, sudah dilakukan supervise dengan semestinya.	Kebijakan rekrutmen dan <i>staffing</i> pegawai.			

APIP telah melakukan pengembangan profesi bagi individu auditor	1) APIP telah memastikan bahwa auditor di lingkungannya secara berkelanjutan mempertahankan dan meningkatkan kapabilitas profesional mereka.	6	Kami telah memiliki dokumen tertulis yang memuat rencana training, misalnya rencana Pendidikan dan pelatihan bagi setiap auditor dan rencana PPM/PKS, dan lain-lain.	Terdapat dokumen rencana diklat bagi setiap auditor, meliputi jenis dan jumlah diklat, penyelenggara diklat, waktu diklat, anggaran dan SDM yang akan ikut diklat.	Panduan /Petunjuk penyusunan rencana dan penyelenggara <i>training</i> . Dokumen rencana/usulan <i>training</i> (diklat, PPM/PKS,dll) bagi setiap individu.			
		7	Kami telah mendorong setiap auditor untuk menjadi anggota profesi.	Bentuk dorongan tersebut antara lain: APIP menyediakan anggaran khusus untuk menjadi anggota profesi, atau adanya pemberian ijin kepada auditor untuk menghadiri acara acara yang diselenggarakan oleh profesi seperti diklat, seminar, ujian bersertifikat profesi, workshop, dll.	Nota dinas/Surat edaran tentang kesempatan untuk mengikuti kegiatan yang diselenggarakan organisasi profesi.			
		8	Kami telah memantau dan mendokumentasikan untuk memastikan bahwa kebutuhan training setiap auditor telah terpenuhi, serta membuat laporannya.	Terdapat laporan periodic yang berisi daftar training yang telah diikuti oleh setiap auditor.	Laporan penyelenggaraan training (diklat,PPM/PKS, dll), dalam rangka memantau pemenuhan kompetensi setiap individu pegawai terkait dengan PKPT yang akan dilakukan.			
		9	Kami telah meyakini bahwa kompetensi (keahlian, pengetahuan dan perilaku) pada semua posisi telah memadai untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi kami.	1) APIP memiliki dokumen hasil identifikasi atas kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan pengawasan yang telah direncanakan. 2) Rekrutmen auditor telah sesuai dengan usulan permintaan staf yang dibutuhkan.	Pelaporan pemantauan kompetensi setiap individu.			
		10	Setiap auditor memiliki komitmen untuk terus menerus meningkatkan kompetensi profesionalnya.	Kecukupan angka kredit pengembangan profesi untuk setiap auditor.	Pelaporan pemantauan kompetensi setiap individu.			
		11	Pelaksanaan pengawasan dilaksanakan oleh pejabat yang memiliki sertifikasi di bidang pengawasan internal pemerintah.	Seluruh auditor telah bersertifikasi JFA.	Peta kompetensi.			
		12	Kami telah Menyusun perencanaan jumlah jam pelatihan minimal bagi setiap auditor yang harus dipenuhi setiap tahunnya sesuai dengan aturan yang berlaku.	APIP merencanakan kegiatan PKS, seminar, workshop, diklat, dll untuk setahun.	Dokumen rencana/usulan training (diklat, PPM/PKS, dll) bagi setiap individu.			

LEVEL 3								
Adanya koordinasi satuan tugas SDM APIP (<i>workforce</i>).	1) APIP telah melakukan penyalarsan PKPT dengan mempertimbangkan sumber daya manusia yang dimiliki.	13	Kami telah mengestimasi jumlah dan ruang lingkup kegiatan audit dan kegiatan pengawasan lainnya dan membandingkan dengan jumlah dan keahlian SDM yang tersedia.	Terdapat dokumen hasil mapping jumlah SDM dan kompetensi yang dibutuhkan dengan yang tersedia pada APIP untuk melihat adanya <i>competency gap</i> .	Peta kompetensi pegawai.			
		14	PKPT yang kami susun telah memperhatikan skala prioritas dengan mengoptimalkan sumber daya manusia yang tersedia.	PKPT/PKAT dilengkapi dengan susunan tim auditor.	• PKPT berbasis risiko dengan sasaran audit 3E dan <i>advisory services</i>. • SOP penyusunan PKPT berbasis risiko.			
		15	Kebijakan organisasi APIP telah mendukung koordinasi satuan tugas.	Terdapat SK pimpinan APIP terkait koordinasi satuan tugas.	Kebijakan organisasi yang mendukung pengoptimalan tim audit misalnya penugasan lintas inspektorat/irban, pola hubungan tim, dll.			
Tersedianya staf APIP yang berkualifikasi profesional.	1) Semua pegawai APIP adalah pegawai berkompeten dalam bidangnya.	16	Kami memiliki kerangka kompetensi setiap jabatan yang mencakup pola pengembangan karir dan kriteria penilaian kinerja.	Kerangka kompetensi auditor APIP disusun merujuk ke Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengembangan Kompetensi dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Auditor.	Kerangka kompetensi pegawai.			
		17	Kami mempunyai rencana pelatihan dan pengembangan setiap pegawai yang berpedoman pada kerangka kompetensi.	Rencana pelatihan dan pengembangan pegawai merujuk ke diklat sertifikasi JFA dan diklat teknis substansi yang dikembangkan Pusdiklatwas BPKP maupun dikembangkan sendiri oleh APIP.	Dokumen rencana training untuk memenuhi kompetensi pelaksanaan audit 3E dan jasa <i>advisory</i> .			
		18	Kami mempunyai program pengembangan sertifikasi jabatan fungsional auditor.	Terdapat anggaran untuk program pengembangan sertifikasi jabatan fungsional auditor merujuk ke kalender diklat sertifikasi JFA. Apabila perolehan sertifikasi tersebut dibiayai sendiri oleh auditor maka APIP mendukungnya dalam bentuk pemberian ijin pelatihan maupun perolehan sertifikasi.	Dokumen rencana training untuk memenuhi kompetensi pelaksanaan audit 3E dan jasa <i>advisory</i> .			
		19	Kami mempunyai program untuk perolehan sertifikasi profesi internal auditor seperti QIA, CIA, CGAP, CFE, dll.	Terdapat anggaran untuk program perolehan sertifikasi. Apabila perolehan sertifikasi tersebut dibiayai sendiri oleh auditor maka APIP mendukungnya dalam bentuk	Dokumen rencana training untuk memenuhi kompetensi pelaksanaan audit 3E dan jasa <i>advisory</i> .			

				pemberian ijin pelatihan maupun perolehan sertifikat.				
		20	Kami telah mekanisme pemberian reward/penghargaan bagi pegawai yang berkinerja memuaskan atau terbaik pada setiap tingkatan.	Terdapat dokumen yang menjelaskan kebijakan pemberian <i>reward</i> tersebut.	• Klasifikasi pemberian <i>reward</i>. • Klasifikasi pemberian tunjangan untuk setiap posisi jabatan di Unit Kerja APIP dikaitkan dengan kinerja system penilaian kinerja tahunan.			
		21	Kami telah menentukan kombinasi keahlian dan jenjang jabatan auditor yang diperlukan saat ini, dan menilai apakah dapat dilakukan pengembangan kemampuan auditor secara internal atau melalui kerja sama dengan pihak lain (<i>co-sourcing</i>) maupun melimpahkan pekerjaan kepada pihak lain (<i>out sourcing</i>).	Terdapat dokumen hasil analisis kekuatan sumber daya APIP terhadap beban kerja APIP.	Dokumen hasil analisis kekuatan sumber daya APIP terhadap beban kerja APIP.			
		22	Semua posisi telah dijabat oleh pegawai yang kompeten di bidangnya.	Seluruh staf yang melaksanakan penugasan pengawasan telah memiliki sertifikasi JFA dan atau sertifikasi profesi internal auditor lainnya. Bila belum bersertifikat (sambil dengan menunggu proses sertifikasi), latar belakang Pendidikan yakni adalah akuntansi atau pernah mengikuti diklat terkait kegiatan pengawasan yang dilakukan.	Dokumen peta kompetensi pegawai.			
		23	Kami telah mempunyai metode yang sistematis untuk penilaian kinerja bagi setiap individu secara adil dan transparan yang berpedoman pada kerangka kompetensi.	Terdapat Satuan Kinerja Individu (SKI)/ Satuan Kinerja Pegawai (SKP).	Dokumen SKI atau SKP untuk seluruh Auditor.			
		24	Kami telah memiliki system pengembangan karier (promosi, rotasi, dan mutasi) dengan membandingkan kinerja auditor dengan kinerja yang diharapkan.	1) System pengembangan karier mengacu pada SKI. 2) Pola karier auditor jelas (promosi, rotasi, dan mutasi sesuai dengan kinerja auditor, bukan acak).	Kebijakan rotasi dan mutasi internal APIP yang sehat dan berpola.			
Adanya kompetensi dan <i>team building</i> .	1. Adanya pengembangan kemampuan individu untuk dapat bekerja dalam tim secara efektif.	25	Kami telah memiliki mekanisme komunikasi dan koordinasi tim audit.	Pola komunikasi dan koordinasi tim audit mengacu pada Pedoman Kendali Mutu	Nota Dinas/Memo/SE Tentang Penyelenggaraan komunikasi Internal APIP.			

				Audit Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah.				
		26	Kami telah memiliki kriteria untuk praktek dan perilaku kerja tim yang efektif yang dicantumkan pada kerangka/standar kompetensi.	Kerangka kompetensi auditor APIP mencantumkan kriteria untuk praktek dan perilaku kerja tim yang efektif.	Kerangka kompetensi pegawai.			
		27	Kami telah memiliki program pengembangan kompetensi tim seperti kepemimpinan tim, komunikasi yang efektif, kerja sama tim, Pembangunan hubungan dalam tim.	Terdapat kebijakan pimpinan APIP terkait dengan pengembangan kompetensi tim.	Dokumen rencana training untuk memenuhi kompetensi pelaksanaan audit 3E dan jasa advisory.			
		28	Kami telah mempunyai pedoman tata laksana tim audit yang menetapkan dengan jelas dan tegas tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan dari para anggota tim audit.	Terdapat pedoman tata laksana tim audit (dokumentasi pola hubungan internal tim audit), bisa berupa SK pimpinan APIP, SOP kegiatan pengawasan.	Kebijakan organisasi yang mendukung pengoptimalan tim audit misalnya penugasan lintas inspektorat/urban, pola hubungan tim, dll.			
		29	Kami telah memiliki mekanisme pemberian penghargaan bagi tim yang berhasil menerapkan perilaku yang diharapkan.	Terdapat dokumentasi atas kebijakan pimpinan APIP terkait pemberian penghargaan bagi tim.	Kebijakan pemberian penghargaan berbasis tim.			
		30	Kami telah mengembangkan setiap personal dalam tim untuk selalu siap berganti peran (<i>assurance</i> dan <i>consulting</i>) seiring dengan perubahan organisasi.	Terdapat dokumen evaluasi pelaksanaan penugasan dan dokumen rencana pengembangan pegawai berdasarkan hasil evaluasi tersebut.	Dokumen rencana training untuk memenuhi kompetensi pelaksanaan audit 3E dan jasa advisory.			
		31	Kami memiliki tim-tim yang produktif yang saling berbagi pengetahuan dan pengalaman.	Terdapat forum untuk memberi kesempatan saling berbagi antar tim (dibuktikan dengan adanya notulen/laporan).				
		32	Kami telah memberikan kesempatan kepada staf kami untuk mengembangkan kemampuan individu dan profesinya dalam hal komunikasi, kepemimpinan dan pengembangan hubungan kerja.	Terdapat dokumen rencana pengembangan pegawai.				
LEVEL 4								
Perencanaan satuan kerja SDM APIP (<i>workforce planning</i>)	1. APIP mengkoordinasikan seluruh SDM yang ada untuk dapat melaksanakan tupoksinya. Termasuk merencanakan sumber daya, keahlian, pelatihan dan sarana yang dibutuhkan untuk melaksanakan penugasan pengawasan.	33	Kami memiliki perencanaan penugasan tahunan yang dapat merencanakan pegawai dengan kompetensi, penugasan, dan penggunaan perangkat, serta pada saat yang tepat untuk menangani area-area penting yang berisiko (sebagaimana telah	Perencanaan penugasan tahunan memastikan pegawai dengan kompetensi yang sesuai, perangkat yang diperlukan, dan waktu yang tepat untuk menangani area berisiko berdasarkan audit berbasis risiko.	Sistem Audit Berbasis Risiko (<i>Audit Management System</i>), Database Kompetensi Pegawai (SIMPEG), Perangkat Pendukung Audit (Srikandi, ACL, IDEA), dan Dashboard Monitoring Audit.			

			diidentifikasi dalam perencanaan audit berbasis risiko) pada organisasi K/L/Pemda.				
		34	Kami telah melakukan Analisis kesenjangan kompetensi yang kami miliki saat ini dengan yang kami butuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas saat ini dan beberapa tahun mendatang.	Analisis kesenjangan kompetensi membandingkan keterampilan saat ini dengan yang dibutuhkan untuk tugas sekarang dan mendatang.	Sistem Manajemen Pelatihan (<i>e-learning, workshop</i>), Pusat Pengembangan SDM (pelatihan pegawai), Sistem Informasi Kepegawaian (pemetaan keterampilan), <i>Program Mentoring</i> (bimbingan pegawai), dan Sistem Evaluasi Kinerja (umpan balik kompetensi).		
		35	Kami telah mengomunikasikan prioritas dan strategi untuk mengatasi kesenjangan kompetensi beberapa tahun mendatang kepada pimpinan K/L/Pemda dan para pemangku kepentingan utama, terutama jika keseluruhan rencana kegiatan pengawasan berkala tidak dapat dilakukan.	Menegaskan bahwa strategi dan prioritas untuk mengatasi kesenjangan kompetensi telah dikomunikasikan kepada pimpinan K/L/Pemda dan pemangku kepentingan utama, terutama jika pengawasan berkala tidak dapat sepenuhnya dilakukan.	Sistem Manajemen Kompetensi, Pusat Pelatihan SDM, Forum Konsultasi, E-Learning dan Kolaborasi BPKP.		
		36	Kami telah memiliki SDM dengan kapasitas yang cukup memuaskan dari segi kompetensi, jumlah personal, dan sarana untuk dapat menyelesaikan seluruh rencana kegiatan pengawasan berkala yang menjadi tanggung jawab kami.	Mengindikasikan bahwa organisasi memiliki sumber daya manusia (SDM) yang memadai baik dari segi kompetensi, jumlah, maupun fasilitas pendukung. Dengan SDM yang cukup dan didukung oleh sarana yang memadai, organisasi dapat menjalankan tugas pengawasan secara efektif sesuai rencana yang telah ditetapkan.	Sarana Teknologi, Akses Data dan Jaringan, Fasilitas Kantor Transportasi, Dokumentasi dan Arsip.		
APIP mendukung organisasi profesi	1. APIP memberikan kesempatan bagi staff auditor untuk mengembangkan profesionalisme dan kepemimpinan melalui keterlibatan dan partisipasi mereka dalam organisasi profesi.	37	Kami telah mengidentifikasi organisasi profesi yang relevan dan terkait dengan strategi dan operasi unit kerja kami.	Organisasi telah mengidentifikasi asosiasi atau lembaga profesi yang mendukung strategi dan operasional unit kerjanya.	Inspektorat Daerah: Berkoordinasi dengan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAPI) untuk meningkatkan kapabilitas pengawasan. Dinas Kesehatan: Bermitra dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk standar pelayanan medis.		
		38	Kami telah menetapkan mekanisme dan kriteria untuk mendukung pegawai yang berpartisipasi dalam kegiatan organisasi profesi melalui	Kami telah menyusun mekanisme dan kriteria untuk mendukung pegawai yang berpartisipasi dalam organisasi profesi dengan memberikan	Dana Bantuan: Anggaran khusus untuk biaya keanggotaan atau seminar.		

			dukungan keuangan, waktu dan sumber daya lainnya.	bantuan keuangan, kelonggaran waktu, serta sumber daya yang diperlukan.	Waktu Luang: Izin dinas atau cuti khusus untuk menghadiri kegiatan organisasi. Fasilitas Pendukung: Akses ke ruang rapat, internet, atau materi pelatihan.			
		39	Kami mendorong staf auditor yang aktif terlibat dalam organisasi profesi untuk melaporkan sumbangsihnya terhadap organisasi profesi guna pengembangan karirnya dalam organisasi K/L/Pemda.	Staf auditor didorong aktif dalam organisasi profesi untuk mendukung pengembangan karir dan kontribusi mereka di K/L/Pemda.	Forum diskusi atau seminar yang diselenggarakan oleh organisasi profesi. Program pelatihan dan sertifikasi yang disediakan oleh organisasi profesi. Jaringan profesional yang memungkinkan auditor untuk berbagi pengalaman dan best practice.			
		40	Kami telah memanfaatkan pengetahuan yang diperoleh staf auditor dari keterlibatannya pada organisasi profesi untuk meningkatkan kapasitas SDM APIP dalam kegiatan pengawasan.	Kami memanfaatkan pengetahuan staf auditor dari organisasi profesi untuk meningkatkan kapasitas SDM APIP dalam pengawasan.	Berupa pelatihan dan seminar yang diadakan oleh organisasi profesi bagi staf auditor, serta pemanfaatan jaringan profesional untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan tugas pengawasan.			
		41	Kami telah menginformasikan kepengurusan dan kontribusi kami pada organisasi profesi dalam laporan kinerja kami.	Kami telah melaporkan kepengurusan dan kontribusi kami pada organisasi profesi dalam laporan kinerja.	Penunjukan anggota organisasi dalam kepengurusan asosiasi profesi. Penyampaian laporan tentang kontribusi organisasi dalam kegiatan seminar atau pelatihan profesi.			
Adanya kontribusi kegiatan pengawasan terhadap pengembangan manajemen	1) Adanya pengintegrasian pengembangan manajerial organisasi K/L/Pemda melalui pelatihan dan pengalaman dalam kegiatan pengawasan intern (APIP sebagai <i>training ground</i> bagi manajer K/L/Pemda), dan sebaliknya.	42	Kami telah mengembangkan hasil kegiatan pengawasan intern dalam berbagai kajian, riset, telaahan, untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang bernilai bagi organisasi.	Pengawasan intern dilakukan melalui kajian, riset, dan telaahan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian dalam organisasi.	Sistem Manajemen Pengetahuan, Tim Riset, Pelatihan dan Workshop, dan Sistem Informasi Pengawasan.			
		43	Kami telah mengembangkan mekanisme yang tepat dalam organisasi K/L/Pemda untuk memunculkan calon-calon yang dapat berkontribusi dalam kegiatan peningkatan pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang bernilai bagi organisasi.	Upaya organisasi untuk menciptakan mekanisme yang memilih dan mengembangkan calon pegawai yang dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman mereka.	Pelatihan dan Sertifikasi, Mentoring, Rotasi Jabatan dan Evaluasi Kinerja.			
		44	Kami telah mengidentifikasi calon-calon dari APIP maupun organisasi K/L/Pemda yang	Pengawasan yang dilakukan bertujuan untuk membantu organisasi K/L/Pemda	Pelatihan dan workshop, Sistem manajemen risiko dan SDM terlatih.			

			dapat menarik manfaat dari kegiatan pengembangan profesi dan penerapan konsep tata Kelola, manajemen risiko dan prinsip pengendalian.	memahami dan menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan prinsip pengendalian. Kegiatan pengembangan profesi ini memberikan manfaat bagi APIP dan organisasi dalam meningkatkan pengelolaan dan pengawasan internal mereka.				
		45	Kegiatan pengawasan yang kami lakukan merupakan sarana bagi para pimpinan organisasi K/L/Pemda untuk mengembangkan pemahaman mengenai tata Kelola, manajemen risiko dan prinsip pengendalian.	Kegiatan pengawasan membantu pimpinan organisasi memahami tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian dengan memberikan informasi yang mendukung pengambilan keputusan yang tepat.	Sistem Informasi Manajemen Pengawasan, Audit Internal dan Pelaporan Keuangan dan Pelatihan dan Workshop.			
		46	Kami senantiasa menjadi contoh (<i>role model</i>) dalam organisasi untuk mempromosikan pentingnya tata Kelola, manajemen risiko dan pengendalian.	Kegiatan pengawasan membantu pimpinan organisasi menjadi contoh dalam mempromosikan tata kelola yang baik, manajemen risiko, dan pengendalian. Ini memastikan semua langkah sesuai prinsip yang berlaku, mengurangi risiko, dan meningkatkan kontrol.	Sistem Informasi Pengawasan (SIMWAS), Audit Internal dan Pelatihan.			
LEVEL 5								
Adanya proyeksi satuan kerja SDM APIP (<i>workforce projection</i>)	1. APIP menyelaraskan kegiatan pengembangan SDM APIP jangka panjangnya untuk memenuhi kebutuhan bisnis APIP di masa mendatang sejalan dengan kebutuhan rencana strategis K/L/Pemda.	47	Kami telah menyelaraskan kegiatan pengawasan SDM jangka Panjang untuk memenuhi kebutuhan layanan yang akan kami berikan di masa mendatang sejalan dengan kebutuhan rencana strategis orginak K/L/Pemda.					
		48	Adanya pengakuan dari organisasi K/L/Pemda bahwa terdapat hubungan yang erat antara tujuan strategis organisasi, risiko organisasi, serta peningkatan kapasitas APIP dalam rangka memberikan nilai tambah bagi organisasi.					
		49	Kami telah mengembangkan rencana strategis yang terkait pengembangan SDM yang meliputi kompetensi, jumlah personal, dan perangkat yang dibutuhkan lima tahun					

			mendatang dan selaras dengan renstra organisasi K/L/Pemda.					
Para Pimpinan APIP dan auditor internal terlibat aktif dalam kepengurusan inti organisasi profesi	1. APIP memfasilitasi dan mendukung penuh jajaran pimpinan dan staff auditor untuk menjadi pengurus inti dalam organisasi profesi yang relevan, yang dapat memberikan pengaruh bagi perkembangan profesi tersebut.	50	Kami telah menciptakan iklim yang kondusif guna mendukung jajaran pimpinan kami untuk menjadi pengurus inti dalam organisasi profesi yang relevan dan mengakui pencapaian yang berhasil diraihinya.					
		51	Kami telah melakukan pembelajaran APIP lain dan organisasi yang menanguinya dan mengintegrasikan praktik-praktik dan pemikiran strategis yang relevan dengan unit kami dan organisasi K/L/Pemda kami.					
		52	Kami telah memanfaatkan secara optimal pengetahuan yang diperoleh dari kepemimpinan pada organisasi profesi dan dari hasil pembelajaran dengan APIP lain dan organisasi yang menanguinya untuk meningkatkan strategi pembelajaran bagi organisasi K/L/Pemda.					
		53	Kami mempunyai pengaruh yang kuat kepada pengembangan dan arah profesi internal auditor.					
		54	Keterlibatan kami dalam organisasi profesi yang relevan mendorong kami untuk terus melakukan pembelajaran (<i>continuous learning</i>) serta meningkatkan wawasan dan pemikiran yang strategis.					
		55	Kami telah secara aktif mempromosikan pimpinan kami untuk menjadi pengurus inti organisasi profesi yang relevan.					

FORMULIR ISIAN PENILAIAN MANDIRI KAPABILITAS APIP

ELEMEN III: PRAKTIK PROFESIONAL

Key process Area		No	Uraian/Pernyataan	Penjelasan Pernyataan	Contoh Infrastruktur	Pilihan Jawaban		
						Ya	Sebagian	Tidak
Level 2								
Perencanaan pengawasan disusun berdasarkan prioritas manajemen /pemangku kepentingan	1. Adanya rencana pengawasan (audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan jasa lainnya) secara periodic (tahunan dan beberapa tahun) berdasarkan hasil konsultasi dengan manajemen dan atau pemangku kepentingan.	1	Pengawasan yang kami lakukan telah berdasarkan perencanaan.	APIP memiliki perencanaan pengawasan.	• PKPT dengan berbasis prioritas manajemen/ risiko tinggi dengan sasaran <i>compliance auditing</i>. • <i>Audit Universe</i> (peta auditan) • SOP penyusunan PKPT			
		2	Kami telah memiliki Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)/Program Kerja Audit, Tahunan (PKAT).	APIP telah Menyusun PKPT/PKAT.	• PKPT dengan berbasis prioritas manajemen/ risiko tinggi dengan sasaran <i>compliance auditing</i>. • <i>Audit Universe</i> (peta auditan) • SOP penyusunan PKPT			
		3	Kami telah menentukan klasifikasi pemberian tunjangan untuk setiap posisi jabatan di unit kerja kami.	1) APIP memiliki audit universe (peta audit), Audit universe merupakan obyek yang berpotensi untuk diaudit, dapat berupa divisi, bagian, bidang, cabang/perwakilan, kegiatan, proyek, kebijakan, program, dsb. 2) Audit universe sudah memperhatikan apakah obyek tab mendukung tujuan, visi,dan misi organisasi. Apakah obyek tersebut memiliki pengaruh yang cukup material, apakah audit dan pengendalian layak dikembangkan terhadap objek tersebut, apakah dana yang dikelola obyek tersebut cukup signifikan.	• PKPT dengan berbasis prioritas manajemen/ risiko tinggi dengan sasaran <i>compliance auditing</i>. • <i>Audit Universe</i> (peta auditan) • SOP penyusunan PKPT			
		4	Kami telah mengidentifikasi area dan topik yang dipertimbangkan untuk menjadi prioritas kegiatan APIP dalam PKPT dengan berkonsultasi kepada	PKPT/PKAT disusun sesuai dengan prioritas.	• PKPT dengan berbasis prioritas manajemen/ risiko tinggi dengan sasaran <i>compliance auditing</i>. • <i>Audit Universe</i> (peta auditan)			

			manajemen/pemangku kepentingan		SOP penyusunan PKPT			
		5	PKPT kami telah mempertimbangkan seluruh (sumber daya yang diperlukan mencakup, SDM, keuangan, dan sarana prasarana).	PKPT/PKAT telah mencantumkan staf yang akan melakukan penugasan, jumlah biaya yang disediakan untuk menyelesaikan penugasan, dan sarana dan prasarana.	- PKPT dengan berbasis prioritas manajemen/ risiko tinggi dengan sasaran <i>compliance auditing</i>. <i>Audit Universe</i> (peta auditan) - SOP penyusunan PKPT			
		6	PKPT yang kami susun telah disetujui oleh Pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemda		- PKPT dengan berbasis prioritas manajemen/ risiko tinggi dengan sasaran <i>compliance auditing</i>. <i>Audit Universe</i> (peta auditan) - SOP penyusunan PKPT			
APIP memiliki kerangka kerja praktik profesional	1. Tersedianya kebijakan, proses, dan prosedur yang akan memandu kegiatan APIP dalam pengelolaan operasinya, mengembangkan program kerja pengawasan intern, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pengawasan intern.	7	<i>Internal Audit Charter</i> yang kami miliki memuat kewenangan untuk mengakses catatan, personal, kekayaan fisik, kewenangan untuk hadir dalam rapat terkait, lingkup kegiatan pengawasan intern, definisi pengawasan intern, kode etik dan standar pengawasan yang digunakan.	IAC mencantumkan; kewenangan untuk mengakses catatan, personal, kekayaan fisik, kewenangan untuk hadir dalam rapat terkait lingkup kegiatan pengawasan intern; definisi pengawasan intern, kode etik dan standar pengawasan yang digunakan.	<i>Internal Audit Charter</i>			
		8	Piagam Pengawasan Intern (<i>Internall Audit Charter</i>) telah mendapatkan persetujuan secara formal dari Pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemda	IAC telah ditandatangani oleh pimpinan K/L/Pemda.	<i>Internal Audit Charter</i>			
		9	Kami telah memiliki kebijakan dalam bentuk peraturan/SK yang mendukung kegiatan pengawasan intern (misalnya; kebijakann SDM, manajemen informasi, dan keuangan).	Terdapat Peraturan/SK notulen rapat terkait dengan dukungan kegiatan pengawasan intern.	Pedoman/SOP/Juklak tentang Kebijakan SDM, manajemen informasi, dan keuangan.			
		10	Kami telah memiliki pedoman/ juklak pengawasan intern (metodologi, standar, prosedur, perangkat dalam melakukan kegiatan pengawasan intern).	Terdapat Pedoman/juklak/SOP pengawasan intern.	Pedoman/SOP/Juklak tentang Pelaksanaan Penugasan sejak perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil audit.			
		11	Adanya dokumentasi atas kebijakan, proses, prosedur, dan metodologi pengawasan.	1) Misal; kalau ada crash program yang harus dilaksanakan sehingga mengubah prioritas dalam PKPT, maka kebijakan ini harus didokumentasikan. 2) KKA	Pedoman/SOP/Juklak tentang Pelaksanaan Penugasan sejak perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil audit.			

		12	Diterapkannya standar kendali mutu pada setiap penugasan audit.	Penugasan audit sudah menerapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali mutu Audit Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah. Kendali mutu ini harus dibuktikan dengan dokumen kendali mutu atau pernyataan revidi atau paraf atas setiap dokumen pengawasan (seperti form kendali mutu, checklist, dan paraf).	Pemberlakuan kendali mutu audit mengacu ke Permenpan No.19 tahun 2009.			
		13	Penugasan pengawasan intern yang kami lakukan telah mengacu pada kebijakan, standar, pedoman dan prosedur yang ditetapkan.	1) Terdapat kebijakan, standar, pedoman, dan prosedur yang diacu. 2) APIP sudah melakukan internal quality assessment (bisa self-assessment dengan validation oleh pihak lain di luar APIP atau external quality assessment oleh pihak lain di luar APIP) untuk menilai kesesuaian penugasan pengawasan interna dengan kebijakan, standar, pedoman, dan prosedur yang ditetapkan.	Pemberlakuan kendali mutu audit mengacu ke Permenpan No.19 tahun 2009.			
LEVEL 3								
Adanya perencanaan audit berbasis risiko	1. Terlaksananya penilaian risiko secara sistematis dan fokus pada prioritas rencana kegiatan periodic APIP (audit, evaluasi, revidi, pemantauan, jasa lain) atas Gambaran risiko organisasi APIP secara keseluruhan.	14	Kami telah melakukan pemutakhiran data/informasi semua unit kerja yang dapat diawasi (<i>audit universe</i>).	Terdapat pemutakhiran data terkait obyek pengawasan.	Audit Universe/ Peta Auditan termasuk identifikasi dan penanganan risiko.			
		15	Kami telah mengidentifikasi unit kerja auditi yang memiliki risiko tertinggi.	APIP telah menentukan besaran risiko atas seluruh auditi dengan memperhatikan unsur-unsur resiko.	Audit Universe/ Peta Auditan termasuk identifikasi dan penanganan risiko.			
		16	Kami telah menentukan probabilitas terjadinya risiko yang signifikan yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan unit kerja auditi.	APIP telah menentukan besaran risiko atas seluruh auditi dengan memperhatikan unsur-unsur resiko.	Audit Universe/ Peta Auditan termasuk identifikasi dan penanganan risiko.			

		17	Kami telah mengidentifikasi alternatif penanganan risiko yang dilakukan oleh manajemen.	Terdapat dokumentasi atas alternatif penanganan risiko yang dilakukan oleh manajemen.	Audit Universe/ Peta Auditan termasuk identifikasi dan penanganan risiko.			
		18	Kami telah mengidentifikasi penanganan tambahan atau penanganan lain yang diperlukan untuk merespon risiko.	Terdapat dokumentasi atas alternatif penanganan risiko yang dilakukan oleh manajemen.	Audit Universe/ Peta Auditan termasuk identifikasi dan penanganan risiko.			
		19	Perencanaan penugasan kami, juga telah mencakup pengawasan atas auditi yang memiliki risiko tinggi, dan atau penanganannya belum tepat.	PKPT/PKAT mencantumkan kegiatan pengawasan atas obyek pemeriksaan yang memiliki risiko tinggi, dan/atau manajemen belum menangani risiko tersebut dengan tepat.	• PKPT berbasis risiko dengan sasaran audit 3E dan advisory. • SOP Penyusunan PKPT berbasis risiko.			
		20	Kami telah membandingkan rencana pengawasan yang akan dilakukan (audit, reviu, monitoring dan evaluasi, serta pengawasan lainnya) dengan tujuan strategis organisasi, untuk memastikan keduanya telah selarasa.	Seluruh kegiatan pengawasan yang tercantum dalam PKPT/PKAT telah mempertimbangkan kesesuaian dengan pencapaian tujuan K/L/Pemda.	• PKPT berbasis risiko dengan sasaran audit 3E dan advisory. • SOP Penyusunan PKPT berbasis risiko.			
		21	Kami telah Menyusun PKPT yang berbasis risiko (berdasar hasil penelitian risiko audit).	APIP Menyusun PKPT berdasarkan besaran risiko atas seluruh auditi.	• PKPT berbasis risiko dengan sasaran audit 3E dan advisory. • SOP Penyusunan PKPT berbasis risiko.			
		22	Dilakukannya komunikasi informasi mengenai risiko dan pengendaliannya kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemda	Terdapat notulen hasil rapat dengan Pimpinan K/L/Pemda mengenai risiko dan pengendaliannya.	• SOP Penyusunan PKPT berbasis risiko. • Audit Universe/Peta Auditan termasuk identifikasi dan penanganan risiko.			
		23	Kami telah melakukan pelatihan perencanaan pengawasan berbasis risiko.	Terdapat laporan hasil pelatihan perencanaan pengawasan berbasis risiko.	Dokumen rencana training untuk memenuhi kompetensi pelaksanaan audit 3E dan jasa advisory.			
APIP memiliki kerangka kerja untuk mengelola kualitas	1. Ditetapkan dan diterapkan proses untuk pemantauan berkelanjutan, menilai dan memperbaiki efektivitas kegiatan pengawasan intern. Proses tersebut mencakup pemantauan internal terus menerus, atas kinerja kegiatan pengawasan intern sebagaimana penilaian kualitas yang dilakukan secara periodic (oleh pihak internal dan eksternal).	24	Kami telah mengembangkan kebijakan, praktik, dan prosedur yang dapat memberikan kontribusi perbaikan berkelanjutan bagi kegiatan pengawasan intern.	Kebijakan, praktik dan prosedur yang dibangun termasuk diantaranya adanya proses kendali mutu atas pelaksanaan pengawasan intern.	Pedoman / panduan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan atas Audit 3E, pemberian layanan advisory.			

		25	Kami telah mengembangkan dan mendokumentasikan peran, tanggung jawab dan akuntabilitas dalam melaksanakan, mereviu, dan memberi persetujuan atas hasil penugasan pengawasan intern pada setiap tahapan proses penugasan pengawasan.	1) Terdapat supervise atas setiap tahapan pekerjaan audit, ketua tim menyupervisi anggota timnya, pengendali teknis mengawasi tim audit yang dibawahinya dan pengendali mutu menyupervisi seluruh kerja audit yang dilaksanakan. 2) Supervise tersebut didokumentasikan dalam KPA.	Pedoman / panduan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan atas Audit 3E, pemberian layanan advisory.			
		26	Kami telah melaksanakan dan memelihara kegiatan program <i>quality assurance dan perbaikannya (quality assurance and improvement program)</i> .	APIP melakukan <i>Quality Assurance and Improvement Program (QAIP)</i> secara periodic terkait dengan kegiatan pengawasan yang dilakukan guna memastikan kesesuaian penugasan pengawasan tersebut dengan standar yang ditetapkan (Standar Audit yang dikeluarkan AAIP, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah, Pedoman telaah sejawat). QAIP tersebut bisa dilakukan dengan <i>self-assessment</i> atau <i>self-assessment</i> dengan <i>validation</i> oleh pihak lain di luar APIP, atau <i>external quality assessment</i> oleh pihak lain di luar APIP.	Pedoman telaahan sejawat dan pemberlakuannya.			
		27	Kami telah mengembangkan system dan prosedur untuk memonitor dan melaporkan pelaksanaan program <i>quality assurance</i> dan perbaikannya (<i>quality assurance and improvement program</i>).	Laporan hasil pelaksanaan QAIP.	Pedoman telaahan sejawat dan pemberlakuannya.			
		28	Kami telah mengembangkan system dan prosedur untuk memonitor dan melaporkan kinerja dan efektivitas kegiatan APIP, misal: penerapan <i>peer review</i> , kecukupan pemenuhan	Laporan <i>peer review</i> atau laporan hasil survey kepuasan stakeholder terhadap peran dan layanan yang diberikan APIP.	Pedoman telaahan sejawat dan pemberlakuannya.			

			<i>internal audit charter</i> , kontribusi APIP bagi auditi (dalam tata Kelola manajemen risiko) dll.				
		29	Kami telah mengembangkan system dan prosedur untuk menindaklanjuti pelaksanaan rekomendasi yang dibuat dalam rangka meningkatkan efektivitas kegiatan pengawasan intern, serta kesesuaian dengan standar.	Terdapat rekomendasi dalam laporan QAIP yang ditindaklanjuti APIP.	Pedoman telaahan sejawat dan pemberlakuannya.		
		30	Praktik pengawasan yang kami lakukan telah meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan.	Hasil QAIP beberapa periode menyatakan bahwa penugasan pengawasan oleh APIP secara umum telah sesuai standar.	• Surat Pernyataan independensi dan objektivitas auditor. • Kuesioner kepuasan pelanggan.		
LEVEL 4							
Adanya strategi pengawasan yang dapat meningkatkan pengelolaan risiko organisasi	1. Adanya hubungan antara rencana kegiatan periodic pengawasan intern dengan praktik-praktik dan strategi manajemen risiko organisasi yang diawasi (ERM organisasi).	31	Strategi pengawasan yang kami susun telah mencakup area-area yang dianggap oleh manajemen memiliki risiko tinggi berdasarkan hasil manajemen risiko organisasi K/L/Pemda secara keseluruhan (<i>Enterprise Risk Management/ERM</i>).	Strategi pengawasan yang disusun berfokus pada area yang memiliki risiko tinggi sesuai dengan hasil manajemen risiko organisasi. Hal ini memastikan bahwa pengawasan dilakukan secara efektif dengan memprioritaskan aspek yang berpotensi menyebabkan dampak signifikan terhadap tujuan organisasi.	• Sistem Manajemen Risiko Terintegrasi: Menggunakan perangkat lunak ERM seperti COSO ERM <i>Framework</i> atau ISO 31000 untuk memetakan risiko. • Dashboard Monitoring Risiko: Platform digital yang menampilkan profil risiko secara real-time. • Database Risiko: Katalog elektronik yang memuat daftar risiko, penyebab, dampak, dan strategi mitigasi.		
		32	Unit kerja kami terus menerus memantau profil risiko organisasi K/L/Pemda dan merevisi rencana pengawasan jika diperlukan serta memperoleh persetujuan Pimpinan/Kementerian/Lemba ga/ Pemda.	Unit kerja melakukan pemantauan profil risiko secara terus-menerus dan menyesuaikan rencana pengawasan sesuai dengan perubahan yang terjadi. Hal ini dilakukan dengan melibatkan Pimpinan/Kementerian/Lemba ga/Pemda untuk memastikan pengawasan tetap relevan.	• Sistem <i>Early Warning System (EWS)</i>: Alat berbasis data analitik untuk mendeteksi potensi risiko sejak dini. • Rapat Evaluasi Berkala: Forum yang diadakan setiap bulan atau kuartal untuk meninjau dan menyesuaikan rencana pengawasan. • Aplikasi Manajemen Pengawasan: Platform digital untuk mencatat perubahan risiko dan rekomendasi tindakan mitigasi.		

		33	Kami telah memahami strategi dan praktik manajemen risiko organisasi melalui konsultasi dengan Pimpinan K/L/Pemda dan mereviu dokumen yang relevan, baik dari internal maupun eksternal organisasi.	Unit kerja memahami strategi dan praktik manajemen risiko organisasi melalui konsultasi dengan pimpinan serta mereviu dokumen yang relevan. Pendekatan ini memastikan bahwa pengawasan dilakukan berdasarkan standar dan kebijakan terkini.	• Pelatihan dan Workshop Manajemen Risiko: Program peningkatan kapasitas auditor dan pengawas. • Portal Digital Manajemen Risiko: Tempat berbagi dokumen, kebijakan, dan pedoman terbaru mengenai risiko. • Database Regulasi dan Kebijakan: Sistem yang memuat dokumen internal dan eksternal terkait tata kelola risiko.			
		34	Unit kerja kami secara periodic telah melakukan audit manajemen risiko dalam lingkup yang luas (<i>enterprise, wide risk management audit</i>).	Audit manajemen risiko dilakukan secara menyeluruh mencakup berbagai aspek risiko, baik operasional, strategis, keuangan, maupun kepatuhan. Audit ini bertujuan untuk memastikan efektivitas pengelolaan risiko dalam organisasi.	• <i>Checklist Audit Risiko</i>: Daftar periksa yang digunakan auditor dalam melakukan penilaian risiko organisasi. • Laporan Hasil Audit Risiko: Dokumen yang merinci temuan audit, rekomendasi mitigasi, dan tindak lanjut. • <i>Software Audit Risiko</i>: Aplikasi berbasis data yang mempermudah pelaksanaan audit risiko organisasi.			
LEVEL 5								
Adanya rencana strategis pengawasan intern	1. Dipahaminya arah strategi organisasi APIP auditi dan risiko serta isu penting, serta merancang perubahan keahlian/kapabilitas APIP dalam melaksanakan kegiatan pengawasan intern untuk memenuhi kebutuhan potensial di masa mendatang.	35	Kami telah memiliki rencana strategis pengawasan (<i>Renstra APIP</i>) dengan pendekatan yang fleksibel dan dinamis serta selaras dengan arah strategi organisasi K/L/Pemda untuk menangani risiko dan isu yang potensial.					
		36	Kami telah mengidentifikasi dan menilai trend, isu, dan risiko baik pada lingkungan internal maupun eksternal organisasi, serta mendiskusikannya secara intensif dengan Pimpinan K/L/Pemda.					
		37	Kami telah melakukan penilaian yang komprehensif					

			untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam praktik, sarana dan keahlian yang dibutuhkan dalam rangka merespon isu-isu dan risiko-risiko organisasi yang berkembang saat ini.					
		38	Kami telah melakukan penilaian atas pilihan-pilihan penanganan risiko yang berkembang untuk mengatasi kesenjangan yang ada. (seperti melakukan revisi, atau menambah prosedur, praktik, dan/atau sarana, menambah staf lain, dan/atau melakukan <i>co-sourcing</i>).					
		39	Kami telah memastikan bahwa semua auditor internal telah mengikuti program Pendidikan dan pengembangan profesional berkelanjutan secara tepat. (idealnya 30 sd 40 jam per pegawai per tahun).					
		40	Kami telah melakukan reviu dan penyesuaian terhadap <i>Internal Audit Charter</i> , kebijakan, praktik dan prosedur kegiatan pengawasan intern secara berkala untuk memastikan kesesuaiannya dengan standar internasional.					
		41	Kami telah melakukan pemantauan system manajemen kinerja pengawasan untuk menilai hasil dan mengambil Tindakan dalam rangka meningkatkan kinerja.					
		42	Kami telah berkontribusi untuk asosiasi profesi yang relevan guna mendapatkan pembelajaran dan penerapan praktik-praktik terbaik pengawasan intern terkini.					
		43	Kebijakan dan praktik pengawasan intern yang kami lakukan telah sesuai dengan standar dunia (sesuai dengan hakikat. Definisi internal auditing, kode etik, standar,					

		independensi dan obyektivitas, pelaporan yang valid dan dapat diandalkan).					
--	--	--	--	--	--	--	--

FORMULIR ISIAN PENILAIAN MANDIRI KAPABILITAS APIP

ELEMEN IV : AKUNTABILITAS DAN MANAJEMEN KINERJA

Key process Area	No	Uraian/Pernyataan	Penjelasan Pernyataan	Contoh Infrastruktur	Pilihan Jawaban		
					Ya	Sebagian	Tidak
Level 2							
Adanya perencanaan kegiatan pengawasan	1. Memiliki Rencana Kinerja Tahunan (RKT) penugasan pengawasan yang mencakup seluruh sumber daya yang dibutuhkan.	1	Kami telah memiliki Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang didalamnya telah mengidentifikasi sasaran dan hasil-hasil yang ingin dicapai.	Sebagaimana indicator dalam kriteria Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Komponen Perencanaan Kinerja dan subkomponen Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (PermenPAN RB Nomor 53 Tahun 2014).	Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/ Rencana Kerja (RENJA)/ Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), LAKIP.		
		2	RKT kami telah mempertimbangkan pelayanan penunjang dan administrasi yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan yang efektif (misal; SDM, material, teknologi informasi).	Sebagaimana indicator dalam kriteria Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Komponen Perencanaan Kinerja dan subkomponen Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (PermenPAN RB Nomor 53 Tahun 2014).	Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/ Rencana Kerja (RENJA)/ Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), LAKIP.		
		3	RKT yang kami susun mencakup penetapan jadwal dan penetapan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran yang telah dicapai.	Sebagaimana indicator dalam kriteria Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Komponen Perencanaan Kinerja dan subkomponen Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (PermenPAN RB Nomor 53 Tahun 2014).	Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/ Rencana Kerja (RENJA)/ Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), LAKIP.		
		4	Dalam RKT, kami telah mengembangkan Langkah-langkah penting untuk mencapai sasaran yang diharapkan.	Sebagaimana indicator dalam kriteria Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Komponen Perencanaan Kinerja dan subkomponen Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (PermenPAN RB Nomor 53 Tahun 2014).	Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/ Rencana Kerja (RENJA)/ Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), LAKIP.		

		5	RKT yang disusun menyediakan instrument untuk mengendalikan operasional kegiatan pengawasan (rencana/target atas inputs, outpus, outcomes).	Sebagaimana indicator dalam kriteria Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Komponen Perencanaan Kinerja dan subkomponen Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (PermenPAN RB Nomor 53 Tahun 2014).	Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/ Rencana Kerja (RENJA)/ Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), LAKIP.			
		6	RKT yang kami susun telah memperoleh persetujuan dari pimpinan Kementerian /Lembaga/Pemda.		Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/ Rencana Kerja (RENJA)/ Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), LAKIP.			
		7	Kami memperoleh pengalokasian anggaran untuk kegiatan pengawasan dan dapat mempergunakan anggaran tersebut untuk merencanakan kegiatan pengawasan.		Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/ Rencana Kerja (RENJA)/ Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), LAKIP.			
Adanya anggaran operasional kegiatan pengawasan	1. APIP memperoleh pengalokasian anggaran untuk kegiatan pengawasan dan dapat mempergunakan anggaran tersebut untuk merencanakan kegiatan pengawasan.	8	Kami Menyusun anggaran rencana realistis/wajar untuk kegiatan-kegiatan dan sumber daya yang telah diidentifikasi dalam RKT.		Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/ Rencana Kerja (RENJA)/ Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), LAKIP.			
		9	Anggaran operasional kami telah disahkan oleh Pimpinan Kementerian/Lembaga/ Pemda.		Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/ Rencana Kerja (RENJA)/ Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), LAKIP.			
		10	Kami selalu melakukan reuiu terhadap anggaran operasional secara berkesinambungan untuk memastikan bahwa anggaran yang disusun masih realistis dan akurat, dan kami mengidentifikasi dan melaporkan setiap selisih yang ada.	Terdapat laporan hasil reuiu anggaran APIP oleh APIP yang bersangkutan.	Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/ Rencana Kerja (RENJA)/ Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), LAKIP.			
LEVEL 3								
Adanya laporan manajemen kegiatan pengawasan	1. APIP mendayagunakan informasi untuk mengelola operasional hariannya, mendukung proses pengambilan Keputusan, serta membangun akuntabilitas.	11	Kami telah mengidentifikasi kebutuhan dan persyaratan pelaporan manajemen APIP untuk kepentingan pertanggung jawaban dan akuntabilitas manajemen APIP (missal; identifikasi jenis dan model pelaporan yang perlu disediakan oleh manajemen APIP).	Laporan pelaksanaan pengawasan intem kepada pimpinan K/L/D.	Kebijakan dan prosedur pelaporan pertanggung jawaban kinerja.			

		12	Kami telah mengembangkan system informasi pengumpulan dan pengolahan data yang relevan untuk tujuan pelaporan kegiatan pengawasan kami.	APIP memiliki system informasi pengumpulan data dan pengolahan data yang relevan untuk tujuan pelaporan kegiatan pengawasan intern.	Aplikasi system informasi berbasis teknologi untuk pengolahan anggaran/ keuangan, pengelolaan hasil pengawasan, pengelolaan kinerja seperti; SIM, HP, SIM Monev, SIM Pengendalian Anggaran/SILABI/IPMS.			
		13	Kami telah merancang laporan seluruh hasil kegiatan pengawasan intern untuk memenuhi kebutuhan pengguna dan para pemangku kepentingan yang utama.		Aplikasi system informasi berbasis teknologi untuk pengolahan anggaran/ keuangan, pengelolaan hasil pengawasan, pengelolaan kinerja seperti; SIM, HP, SIM Monev, SIM Pengendalian Anggaran/SILABI/IPMS.			
		14	Kami telah menyediakan laporan dan informasi yang relevan secara tepat waktu dan berkala.		SOP mengenai Pelaporan Ikhtisar Hasil Pengawasan.			
		15	Kami telah melakukan pemantauan penggunaan laporan dan informasi untuk melihat apakah masih relevan, dan melakukan perbaikan apabila diperlukan.	APIP telah melakukan survey kepuasan penggunaan laporan atau mengadakan pertemuan rutin dengan pengguna/ stakeholder untuk mendapatkan respon terkait informasi laporan.	SOP mengenai Pelaporan Ikhtisar Hasil Pengawasan.			
		16	Akuntabilitas dan tanggung jawab manajemen dalam kegiatan pengawasan intern telah dapat kami penuhi melalui pelaporan kegiatan pengawasan yang tepat waktu, relevan dan dapat diandalkan.	Laporan kinerja dan akuntabilitas APIP telah tepat waktu, relevan, dan dapat diandalkan.	Kebijakan dan prosedur pelaporan pertanggung jawaban kinerja.			
Adanya informasi mengenai biaya	1. APIP memiliki system informasi keuangan yang dapat menyediakan informasi keuangan yang memadai sehingga APIP dapat mengelola aktivitasnya seekonomis dan seefisien mungkin.	17	Kami telah mengembangkan system informasi biaya untuk melaksanakan kegiatan pengawasan.	1) Terdapat mekanisme untuk mendapatkan informasi yang akurat terkait biaya untuk melaksanakan kegiatan APIP. 2) APIP telah memiliki kebijakan/prosedur pelaporan informasi biaya. 3) APIP telah memiliki system informasi biaya yang relevan dan handal.	Aplikasi system informasi berbasis teknologi untuk pengolahan anggaran/ keuangan, pengelolaan hasil pengawasan, pengelolaan kinerja seperti; SIM, HP, SIM Monev, SIM Pengendalian Anggaran/SILABI/IPMS.			
		18	Kami telah menerapkan system manajemen biaya pengelolaan kegiatan pengawasan intern yang selaras dengan system manajemen keuangan dan		Aplikasi system informasi berbasis teknologi untuk pengolahan anggaran/ keuangan, pengelolaan hasil pengawasan, pengelolaan			

			operasional K/L/Pemda serta pelaporannya.		kinerja seperti; SIM, HP, SIM Monev, SIM Pengendalian Anggaran/SILABI/IPMS.			
		19	Kami telah memantau biaya yang sebenarnya dibandingkan dengan biaya standar atau biaya yang telah ditetapkan pada berbagai tahap kegiatan pengawasan intern.	Dokumen <i>analisis variance</i> biaya.	Aplikasi system informasi berbasis teknologi untuk pengolahan anggaran/ keuangan, pengelolaan hasil pengawasan, pengelolaan kinerja seperti; SIM, HP, SIM Monev, SIM Pengendalian Anggaran/SILABI/IPMS.			
		20	Kami telah memantau system manajemen biaya secara berkala dan memastikan bahwa struktur biaya masih relevan dan informasi bahwa biaya tersebut dihasilkan/diperoleh dengan cara yang paling efisien dan ekonomis.	Dokumen <i>analisis variance</i> biaya.	Aplikasi system informasi berbasis teknologi untuk pengolahan anggaran/ keuangan, pengelolaan hasil pengawasan, pengelolaan kinerja seperti; SIM, HP, SIM Monev, SIM Pengendalian Anggaran/SILABI/IPMS.			
		21	Kami telah memanfaatkan informan biaya untuk pengendalian biaya program/ kegiatan pengawasan yang dilakukan dan sebagai salah satu dasar pengambilan Keputusan.	Dokumen tindak lanjut hasil <i>analisis variance</i> dan dokumen monitor system manajemen biaya.	Aplikasi system informasi berbasis teknologi untuk pengolahan anggaran/ keuangan, pengelolaan hasil pengawasan, pengelolaan kinerja seperti; SIM, HP, SIM Monev, SIM Pengendalian Anggaran/SILABI/IPMS.			
Adanya system pengukuran kinerja	1. APiP telah mengembangkan indicator-indikator dan alat ukur yang memungkinkan untuk mengukur dan melaporkan kinerjanya dan melakukan pemantauan secara rutin atas kemajuan pencapaian target guna memastikan bahwa hasil dicapai seekonomis dan seefisien mungkin.	22	Kami telah menetapkan kegiatan pengawasan intern yang perlu diukur kinerjanya.	Dokumen System Manajemen Kinerja/SOP yang mengatur pengembangan dan penetapan <i>key performance indicator</i> (KPI).	Dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin).			
		23	Kami telah mendokumentasikan Sistem Manajemen Kinerja dalam pengelolaan kegiatan pengawasan intern, yang mencakup identifikasi data kinerja yang harus dikumpulkan, frekuensi pengumpulan data, siapa yang bertanggung jawab untuk pengumpulan data, pengendalian mutu data, siapa yang menghasilkan laporan		SOP dan Aplikasi Pengukuran Manajemen Kinerja.			

			data kinerja, dan siapa yang menerima laporan.				
		24	Kami telah mengembangkan ukuran-ukuran kinerja (rasio input/output, indicator produktivitas).	APIP memiliki dokumen pengembangan/penyusunan <i>key performance indicator</i> (KPI) yang layak untuk mengatur kinerja aktivitas APIP.	Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/ Rencana Kerja (RENJA)/ Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tapkin/RENSTRA.		
		25	Kami telah menetapkan target kinerja.	Dokumen KPI yang terukur secara kuantitatif.	Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/ Rencana Kerja (RENJA)/ Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tapkin/RENSTRA.		
		26	Kami telah menggunakan informasi kinerja untuk memantau kegiatan pengawasan intern dan hasilnya dibandingkan dengan tujuan yang telah kami tetapkan guna mengambil Tindakan yang diperlukan.	Dokumen monitoring pengukuran dan analisis kinerja sesuai KPI.	LAKIP		
		27	Kami telah melaporkan kinerja kegiatan pengawasan intern kapan saja dibutuhkan oleh pimpinan terkait K/L/Pemda dan atau pihak terkait.		LAKIP		
		28	Kami telah melakukan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas biaya dan relevansinya dengan ukuran-ukuran kinerja.		LAKIP		
		29	System pengukuran kinerja kami dapat menginformasikan bagaimana operasional harian kegiatan pengawasan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan K/L/Pemda secara keseluruhan.	Dokumen analisis/evaluasi hasil pengukuran KPI dengan pencapaian tujuan aktivitas APIP dan tujuan organisasi Pemda/K/L.	LAKIP		
LEVEL 4							
Adanya integritas atas pengukuran kinerja kuantitatif maupun kualitatif	1. APIP dapat menggunakan informasi kinerja untuk mengukur dan memantau fluktuasi yang mempengaruhi hasil-hasil kegiatan pengawasannya.	30	Kami telah mengidentifikasi dengan jelas tujuan strategis unit kerja kami.				
		31	Kami telah mengembangkan ukuran-ukuran dan target-target kinerja yang komprehensif yang dapat menetapkan Tingkat risikoyang dapat diterima (<i>acceptabel risk</i>), biaya, kualitas, dan hasil yang ingin dicapai.				

		32	Kami telah mengembangkan system untuk mengukur dan memantau kinerja kuantitatif dan kualitatif.					
		33	Kami telah menggunakan informasi kinerja untuk memonitor dan mengukur fluktuasi kinerja yang dapat mempengaruhi hasil-hasil kegiatan pengawasan.					
		34	Kami telah menggunakan informasi kinerja untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada untuk mengurangi dampak dari risiko organisasi K/L/Pemda.					
		35	Kami telah meminta masukan secara berkala dari para pemangku kepentingan utama untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas kegiatan pengawasan intern.					
		36	Kami telah mengintegrasikan hasil-hasil dari program perbaikan dan pengendalian mutu dengan system manajemen kinerja dan menggunakan informasinya untuk meningkatkan kinerja.					
		37	Kami telah melakukan pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi APIP oleh manajemen organisasi untuk mengukur dampak (<i>impact</i>) dan nilai tambah dari kegiatan pengawasan.					
		38	Kami telah mengintegrasikan sepenuhnya ukuran kualitatif dan kuantitatif untuk memastikan bahwa tujuan strategis kami telah tercapai.					
LEVEL 5								
Adanya pelaporan kepada public atas efektivitas kegiatan pengawasan internal.	1. APIP melaporkan kepada public efektivitasnya untuk menunjukkan akuntabilitas dan transparansi kepada para pemangku kepentingan organisasi dan public.	39	Kami telah membangun instrument untuk mengukur dampak dari kegiatan pengawasan yang kami lakukan.					
		40	Kami telah mengidentifikasi dampak dari kegiatan					

			pengawasan pada tataran organisasi K/L/Pemda yang mencakup kemungkinan pengurangan risiko, penghematan biaya, dan perbaikan keuangan organisasi.					
		41	Kami telah melaporkan kinerja pengawasan kami kepada para pemangku kepentingan eksternal (misal; BPK,BPKP, Inspektorat lain, dan KPK) dan public.					
		42	Kami telah memperoleh masukan dari pemangku kepentingan eksternal (misal; BPK,BPKP, Inspektorat lain, dan KPK) dan public untuk memperbaiki efektivitas APIP.					
		43	Kami telah memberikan nilai tambah (<i>value added</i>) dan berkontribusi nyata dalam perbaikan proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian K/L/Pemda.					

FORMULIR ISIAN PENILAIAN MANDIRI KAPABILITAS APIP

ELEMEN V : BUDAYA DAN HUBUNGAN ORGANISASI

Key process Area	No	Uraian/Pernyataan	Penjelasan Pernyataan	Contoh Infrastruktur	Pilihan Jawaban		
					Ya	Sebagian	Tidak
Level 2							
Adanya pengelolaan atas bisnis proses pengawasan intern	1. APIP focus pada pembinaan dan pembenahan hubungan dan infrastruktur di dalam lingkungan internalnya sendiri, yang mencakup struktur organisasi, manajemen SDM, penyusunan dan pemantauan anggaran, rencana tahunan, pemenuhan perangkat, dan teknologi pengawasan intern, dan pelaksanaan kegiatan pengawasan intern itu sendiri.	1	Kami telah memiliki struktur organisasi untuk melaksanakan pengawasan intern sesuai peraturan yang berlaku yang ditetapkan secara formal dalam bentuk Peraturan atau SK Pimpinan K/L/Pemda.	Peraturan tentang SOTK (Struktur Organisasi Tata Kerja) Dimana APIP secara fungsional bertanggung jawab langsung kepada Pucuk Pimpinan K/L/Pemda.			
		2	Kami telah mengidentifikasi peran dan tanggung jawab seluruh pejabat structural di lingkungan kami.	Uraian jabatan yang disusun berdasarkan atas analisis jabatan (termasuk peraturan pemberlakuannya).			
		3	Kami telah memiliki aturan, arahan, dan sarana komunikasi di lingkungan internal APIP.	Misal; terdapat mekanisme rapat internal APIP secara berkala.	Nota Dinas/Memo/SE tentang Penyelenggaraan Komunikasi Internal APIP.		
		4	Kami telah membina hubungan dan mendorong komunikasi yang efektif di lingkungan internal APIP.	Misal; terdapat suatu forum yang mengumpulkan tim audit dalam APIP untuk dapat saling berbagi informasi; terdapat moment pembekalan kepada tim audit oleh pimpinan APIP, terdapat forum ekspos hasil-hasil auditor.	Nota Dinas/Memo/SE tentang Penyelenggaraan Komunikasi Internal APIP.		
		5	Kami telah menganalisis kebutuhan dan memperoleh sumber daya dan perangkat pengawasan intern termasuk perangkat berbasis teknologi untuk mengelola dan melaksanakan kegiatan pengawasan intern.	1) Analisis kebutuhan sumber daya didokumentasikan. 2) APIP memiliki sumber daya dan perangkat pengawasan intern termasuk perangkat berbasis teknologi sesuai yang dibutuhkan.	Aplikasi Sistem Informasi berbasis teknologi seperti SIM HP dan SIM Monev.		
		6	Struktur organisasi kami telah tepat dan sesuai dengan	Struktur organisasi APIP memungkinkan APIP untuk berkomunikasi secara	Peraturan tentang SOTK (Struktur Organisasi Tata Kerja) Dimana APIP secara		

			kebutuhan dan budaya organisasi K/L/Pemda.	langsung dengan pucuk pimpinan organisasi, dan memungkinkan APIP untuk dapat melakukan pengawasan tanpa ada pun pembatasan akses ke seluruh unit organisasi.	fungsional bertanggungjawab langsung kepada Pucuk Pimpinan K/L/D.			
LEVEL 3								
APIP Bersama-sama dengan unit lain dalam organisasi merupakan satu tim manajemen	1. APIP berpartisipasi secara aktif dalam manajemen organisasi sebagai bagian dari tim manajemen yang memberikan nilai tambah bagi organisasi.	7	Jajaran pimpinan APIP telah memahami prioritas manajemen dan senantiasa mengikuti perubahan terkait proses bisnis serta hal-hal baru dalam organisasi K/L/Pemda.	Jajaran pimpinan APIP selalu diundang untuk mengikuti rapat manajemen puncak organisasi (ada notulennya).	• SK TPTGR, SK Baperjakat. • PKPT berbasis risiko dengan sasaran audit 3E dan <i>advisory services</i>, dan usulan perubahannya.			
		8	Pimpinan organisasi K/L/Pemda menyampaikan rencana organisasi dan informasi penting serta laporan lainnya kepada pimpinan kami (misalnya, rencana strategis dan rencana kegiatan serta laporan keuangan).		Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/ Rencana Kerja (RENJA)/ Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)/ Tapkin/RENSTRA.			
		9	Pimpinan unit APIP telah menginformasikan dan mendiskusikan rencana dan isu-isu organisasi K/L/Pemda dengan seluruh staf di lingkungan APIP.	Terdapat notulen/laporan hasil forum/rapat tersebut.	Nota Dinas/Memo/SE tentang Penyelenggaraan Komunikasi Internal APIP.			
		10	Pimpinan APIP ikut berpartisipasi dan hadir dalam forum-forum penting yang diselenggarakan organisasi K/L/Pemda guna mengetahui perkembangan strategis dan operasional kegiatan pengawasan intern serta isu-isu tentang risiko, system, prosedur, dan jenis pengendalian pada kegiatan pengawasan intern.	Terdapat notulen/laporan hasil forum/rapat tersebut.	• Adanya kegiatan-kegiatan penting dalam organisasi K/L/D Dimana Pimpinan APIP menjadi bagian yang terintegrasi dalam tim manajemen K/L/D. • SK TPTGR, SK Baperjakat.			
		11	Pimpinan kami telah mendorong staf pengawasan untuk terlibat dalam komite-komite organisasi K/L/Pemda (seperti satgas, forum) yang penting apabila diperlukan.	Terdapat SK satgas, forum, dll.	Pembentukan Forum, Satgas untuk berbagai pengetahuan.			
		12	Kami telah mempertimbangkan masukan dari manajemen dalam pengembangan rencana kegiatan pengawasan.		• PKPT berbasis risiko dengan sasaran audit 3E dan <i>advisory services</i>.			

					• SOP Penyusunan PKPT berbasis risiko. • PKPT berbasis risiko dengan sasaran audit 3E dan <i>advisory services</i>. • SOP Penyusunan PKPT berbasis risiko.			
		13	Kami telah saling bertukar informasi dengan jajaran pimpinan K/L/Pemda secara berkala terkait dengan rencana dan kegiatan pengawasan intern.	Terdapat notulen/laporan hasil forum/rapat tersebut.				
		14	Unit kerja kami menjadi penghubung organisasi K/L/Pemda (sebagai wakil manajemen) dalam berkoordinasi dengan auditor.		<i>Internal Audit Charter</i> (yang mencakup layanan audit kinerja-3E, pemberian layanan <i>advisory</i>).			
		15	Jajaran pimpinan unit kerja kami dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan (penting) dalam tim manajemen organisasi K/L/Pemda dan masukannya dianggap penting dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.	Jajaran pimpinan APIP selalu diundang untuk mengikuti rapat manajemen puncak organisasi (ada notulennya).				
APIP berkoordinasi dengan pihak lain yang menyediakan jasa pemberian advis dan penjaminan (<i>other review groups</i>)	1. APIP berbagi informasi dan berkoordinasi dengan pihak external maupun internal yang terkait dengan penyediaan jasa pemberian advis dan penjaminan (<i>providers of assurance and advisory services</i>) untuk memastikan cakupan pelayanan dan meminimalisir duplikasi kegiatan pengawasan.	16	Kami telah mengidentifikasi pihak-pihak selain kami yang memberikan jasa penjaminan (<i>assurance</i>) dan pemberian saran (<i>advisory services</i>) bagi organisasi K/L/Pemda (seperti BPKP, KAP, BPK, Inspektorat lain).		<i>Internal Audit Charter</i> (antara lain mencakup hubungan kerja dan koordinasi dengan unit pemberi jasa penjaminan dan pemberi saran lainnya).			
		17	Kami telah mengidentifikasi area-area yang dapat memberikan manfaat melalui berbagai perencanaan, informasi, maupun hasil kegiatan pengawasan dengan pihak lain tersebut (seperti BPKP, KAP, BPK, Inspektorat lain).		<i>Internal Audit Charter</i> (antara lain mencakup hubungan kerja dan koordinasi dengan unit pemberi jasa penjaminan dan pemberi saran lainnya).			
		18	Kami telah mengembangkan proses atau mekanisme untuk berbagi informasi maupun berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak lain tersebut terkait dengan isu-isu yang menjadi perhatian Bersama.	Proses atau mekanisme untuk berbagi informasi maupun berkomunikasi dengan pihak lain tersebut dapat berupa rapat, forum, dll. (ada notulen/laporannya).	Kebijakan/mechanisme koordinasi dengan unit pemberi jasa penjaminan dan pemberi saran lainnya yang sama-sama melakukan fungsi review lain seperti APIP lain dan eksternal auditor BPK, KPK; dalam perencanaan pengawasan atau pemanfaatan hasil pengawasan.			

		19	Kami telah secara regular berkomunikasi dengan auditor eksternal dan berbagi informasi rencana kerja untuk saling mendukung dan melengkapi.		Pelaksanaan rapat koordinasi dengan unit pemberi jasa penjaminan dan pemberi saran lainnya.			
		20	Komunikasi yang dilakukan dengan auditor eksternal maupun dengan pihak penyedia jasa lainnya telah dapat meminimalisir duplikasi atas kegiatan pengawasan dan memaksimalkan cakupan kegiatan pengawasan.					
LEVEL 4								
Pimpinan APIP mampu memberikan saran-saran dan mempengaruhi jajaran manajemen organisasi	1. Adanya pemahaman organisasi dan penghargaan atas visi, kepemimpinan, dan pandangan ke depan pimpinan APIP.	21	Pimpinan kami secara berkala berkomunikasi dan berinteraksi secara langsung dengan pimpinan tertinggi K/L/Pemda.					
	2. Adanya hubungan yang baik antara pimpinan APIP dengan jajaran manajemen organisasi.	22	Pimpinan kami telah memberikan kontribusi terhadap K/L/Pemda dengan memberikan sumbang saran atas isu-isu penting dan strategis.					
		23	Pimpinan kami telah mengembangkan budaya Kerjasama dan kepercayaan antara auditor dengan jajaran pimpinan organisasi baik untuk kegiatan pengawasan intern maupun terkait isu-isu organisasi.					
		24	Pimpinan kami telah berbagi pengetahuan tentang praktik terbaik dalam operasional organisasi dengan seluruh unit kerja/SKPD di lingkungan K/L/Pemda.					
		25	Pimpinan kami telah menetapkan suatu contoh nyata mengenai manajemen yang efektif, etis, dan berwawasan berdasarkan saran-saran dan petunjuk yang diberikan kepada pihak lain sebelumnya.					

		26	Pimpinan kami telah mendukung manajemen K/L/Pemda dengan mengembangkan hubungan yang kooperatif, transparan, dan formal dengan auditor eksternal dan mendorong auditor eksternal untuk senantiasa memanfaatkan hasil pengawasan intern.					
		27	Jajaran pimpinan K/L/Pemda mempercayai dan menghargai saran-saran yang kami berikan.					
LEVEL 5								
Adanya hubungan yang efektif dan berkesinambungan.	1. APiP mampu memelihara hubungan yang baik dengan para pemangku kepentingan dan jajaran pimpinan/ manajemen organisasi.	28	Kami telah berpartisipasi dan menjadi pengamat pada semua komite atau forum-forum penting organisasi K/L/Pemda (misalnya dalam forum penyusunan anggaran K/L/Pemda).					
		29	Kami telah memfasilitasi pembelajaran organisasi melalui identifikasi perubahan dilingkungan global yang berpengaruh terhadap organisasi.					
		30	Kami telah memiliki suatu mekanisme untuk melakukan pertemuan secara berkala dengan pimpinan K/L/Pemda dan para pemangku kepentingan utama.					
		31	Para pemangku kepentingan utama, jajaran pimpinan organisasi K/L/Pemda dan komite audit memahami dan menghargai unit kami.					
		32	Kami dipandang sebagai partner bisnis yang mumpuni/ kredibel di seluruh organisasi K/L/Pemda.					
		33	Visi dan nilai-nilai unit kami sesuai dengan visi dan nilai-nilai organisasi K/L/Pemda dan selaras dengan pemangku kepentingan utama.					
		34	Unit kami memegang peranan penting dalam pengembangan komitmen pimpinan.					

		35	Auditor eksternal mengandalkan hasil-hasil pekerjaan kami.					
--	--	----	--	--	--	--	--	--

FORMULIR ISIAN PENILAIAN MANDIRI KAPABILITAS APIP

ELEMEN VI : STRUKTUR DAN TATA KELOLA

Key process Area	No	Uraian/Pernyataan	Penjelasan Pernyataan	Contoh Infrastruktur	Pilihan Jawaban		
					Ya	Sebagian	Tidak
Level 2							
Hubungan pelaporan telah terbangun	1.	APIP telah membangun hubungan pelaporan (laporan kegiatan dan laporan administrasi) secara formal di lingkungannya.	1	<i>Internal Audit Charter</i> telah mendefinisikan secara formal visi, misi, tujuan, wewenang dan tanggung jawab unit APIP dan telah memperoleh persetujuan secara formal dari pimpinan organisasi K/L/Pemda.			
	2	Tujuan, wewenang dan tanggung jawab unit APIP telah dikomunikasikan ke seluruh organisasi K/L/Pemda.	Komunikasi tersebut bisa dalam bentuk sosialisasi saat gelar pengawasan, dan rapat pimpinan.	• <i>Internal Audit Charter</i> • Penyelenggaraan sosialisasi, rapat, dll terkait kewenangan dan tanggung jawab unit APIP yang ada dalam dokumen <i>Internal Audit Charter</i>.			
	3	Kami telah memiliki system pelaporan kegiatan dan pelaporan administrasi pengawasan (<i>functional and administrative reporting</i>) secara formal kepada level pimpinan K/L/Pemda.	Adanya prosedur/system yang menunjukkan bahwa APIP melapor secara fungsional ke Pimpinan K/L/Pemda dan secara administratif ke Sckjcn/Scsma/Sckda.	SOP mengenai penyampaian Ikhtisar Hasil Pengawasan ke Pimpinan K/L/D.			
	4	Kami telah melakukan revidi dan pemutakhiran internal audit charter secara berkala dan mendapat persetujuan pimpinan organisasi.		<i>Internal Audit Charter</i>			
	5	<i>Internal Audit Charter</i> dapat dijadikan dasar bagi manajemen organisasi K/L/Pemda untuk mengevaluasi kegiatan unit APIP.		<i>Internal Audit Charter</i>			
APIP memiliki akses penuh	1.	Adanya kewenangan bagi APIP untuk mengakses	6	<i>Internal Audit Charter</i> telah mencakup kewenangan untuk			

terhadap informasi asset dan personal unit, organisasi K/L/Pemda	informasi, asset, dan personal organisasi K/L/Pemda, yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas pengawasan internnya.		mengakses seluruh informasi, asset, dan personal organisasi K/L/Pemda.					
		7	Kami memiliki kebijakan dan prosedur formal terkait dengan kewenangan untuk mengakses secara penuh, bebas, dan tidak terbatas atas seluruh informasi, asset dan personal organisasi K/L/Pemda yang diaudit, serta tidak ada intervensi dan pembatasan ruang lingkup.		<i>Internal Audit Charter</i> dan kebijakan SOP turunan terakut kewenangan APIP.			
		8	Kami telah menetapkan prosedur yang harus diikuti jika auditi tidak mengungkapkan dokumen yang diperlukan selama pelaksanaan tugas pengawasan.	Terdapat SOP mengenai apa yang harus dilakukan auditor jika auditi tidak mengungkapkan dokumen yang diperlukan selama pelaksanaan tugas pengawasan.	Pedoman/SOP/Juklak tentang Pelaksanaan Penugasan sejak perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil audit.			
LEVEL 3								
Adanya mekanisme penganggaran kegiatan pengawasan	1. APIP telah membangun proses penganggaran yang transparan dan sehat untuk memastikan ketersediaan sumber daya dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.	9	Penganggaran kami mencakup sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan <i>assurance and advisory services</i> guna mengatasi risiko organisasi yang telah diidentifikasi sebelumnya (proses penganggaran didasarkan pada rencana pengawasan berbasis risiko).		• PKPT berbasis risiko dengan sasaran audit 3E dan <i>advisory services</i>. • SOP Penyusunan PKPT berbasis risiko.			
		10	Kami telah memiliki proses/ mekanisme persetujuan terhadap sumber daya yang dibutuhkan (termasuk pendanaan) yang transparan serta kewenangan untuk mengajukan besaran anggaran sesuai yang dibutuhkan.		Kebijakan/Prosedur/ Mekanisme Pengajuan, Usulan Anggaran APIP dengan memerhatikan risiko organisasi.			
		11	Kami telah mengidentifikasi dampak dari adanya pembatasan sumber daya dan telah mengomunikasikan jajaran pimpinan dalam organisasi K/L/Pemda.	Terdapat hasil analisis dampak yang dimaksud.	Kebijakan/Prosedur/ Mekanisme Pengajuan, Usulan Anggaran APIP dengan memerhatikan risiko organisasi.			
		12	Kami telah memiliki anggaran yang memadai untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami secara efektif.					

		13	Alokasi anggaran yang kami terima telah mempertimbangkan risiko dan dampak apabila terdapat kegiatan pengawasan yang tidak dilakukan.				
Adanya pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan APIP oleh manajemen organisasi K/L/Pemda	1. Adanya proses/mechanisme dalam organisasi K/L/Pemda yang melibatkan pimpinan organisasi untuk mengawasi, memberikan saran dan mereviu hasil-hasil dari kegiatan APIP untuk menguatkan independensi dan memastikan Tindakan yang tepat telah dilaksanakan, guna meningkatkan dukungan terhadap APIP dan memperluas ruang lingkup APIP.	14	Kami telah merekomendasikan dan memberikan kontribusi dalam membangun mekanisme/proses yang tepat dalam rangka pengawasan dan pemberian saran oleh jajaran pimpinan K/L/Pemda terkait dengan kegiatan kami.		• SOP mengenai Pelaporan Ikhtisar Hasil Pengawasan. • Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan secara berkala.		
		15	Kami telah membangun kebijakan dan prosedur dalam rangka berkomunikasi, berinteraksi, dan melaporkan kepada jajaran pimpinan K/L/Pemda yang bertugas mengawasi APIP.	Terdapat mekanisme pengawasan oleh jajaran pimpinan organisasi terhadap APIP.	SOP mengenai Pelaporan Ikhtisar Hasil Pengawasan.		
		16	Kami telah melakukan pertemuan secara berkala dengan jajaran pimpinan K/L/Pemda dalam rangka meningkatkan kepedulian organisasi terhadap tata Kelola, penilaian risiko, pengawasan internal, dan pentingnya lingkungan pengendalian yang kuat.	Notulen/Laporan.	Adanya kegiatan-kegiatan penting dalam organisasi K/L/D Dimana Pimpinan APIP menjadi bagian yang terintegrasi dalam tim manajemen K/L/D.		
		17	Kami mendorong jajaran pimpinan K/L/Pemda untuk mendukung independensi APIP melalui usaha-usaha seperti mengomunikasikan mandat, kewenangan, independensi, dan manfaat kegiatan pengawasan intern ke seluruh organisasi.		• <i>Internal Audit Charter</i> (yang mencakup layanan audit kinerja-3E, pemberian layanan <i>advisory</i>). • Adanya pihak dalam organisasi Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah Kinerja APIP.		
		18	Kami telah mengkoordinasikan kegiatan kami dan berbagi informasi hasil pengawasan kami dengan pihak lain yang memberikan jasa penjaminan (<i>assurance</i>) dan pemberian saran (<i>advisory services</i>) bagi organisasi		Kebijakan/mechanisme koordinasi dengan unit pemberi jasa penjaminan dan pemberi saran lainnya yang sama-sama melakukan fungsi reviu lain seperti APIP lain dan eksternal auditor BPK, KPK, dalam perencanaan pengawasan		

			K/L/Pemda (seperti BPKP, KAP, BPK, Inspektorat lain).		atau pemanfaatan hasil pengawasan.			
		19	Adanya penguatan independensi, obyektivitas, dan efektivitas unit kerja kami melalui dukungan nyata dari jajaran pimpinan organisasi K/L/Pemda.		Adanya pihak dalam organisasi Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah yang mengawasi kinerja APIP.			
		20	Tidak terdapat duplikasi pengawasan yang dilakukan unit kami dengan pihak lain yang memberikan jasa penjaminan (<i>assurance</i>) dan pemberian saran (<i>advisory services</i>) bagi organisasi K/L/Pemda (seperti BPKP, KAP, BPK, Inspektorat lain).					
		21	<i>Internal Audit Charter</i> telah mencakup aturan mengenai pengawasan terhadap unit kami oleh jajaran pimpinan K/L/Pemda yang diberikan kewenangan untuk mengawasi kinerja APIP.		<i>Internal Audit Charter</i> (yang mencakup layanan audit kinerja-3E, pemberian layanan <i>advisory</i>).			
LEVEL 4								
Adanya laporan pimpinan APIP kepada pimpinan tertinggi organisasi K/L/Pemda	1. Adanya penguatan independensi pimpinan APIP dengan membangun mekanisme pelaporan secara langsung kepada pimpinan tertinggi organisasi K/L/Pemda.	22	<i>Internal Audit Charter</i> telah menggambarkan pola hubungan pelaporan secara langsung dari pimpinan APIP kepada pimpinan tertinggi organisasi K/L/Pemda.					
		23	Kebijakan organisasi K/L/Pemda memungkinkan pimpinan kami untuk melakukan pertemuan secara berkala dan berkomunikasi secara langsung dengan pimpinan tertinggi organisasi K/L/Pemda.					
		24	Pola hubungan pelaporan pimpinan APIP dengan pimpinan tertinggi organisasi K/L/Pemda memperkuat independensi unit kerja kami dan memungkinkan kami memberikan saran-saran yang bernilai dan terpercaya bagi organisasi.					
Adanya pengawasan	Adanya badan pengawas APIP yang anggotanya mencakup pihak	25	Adanya badan pengawas independent (di luar jajaran					

terhadap APIP oleh pihak independent.	independent (di luar jajaran manajemen organisasi K/L/Pemda) guna memastikan independensi APIP, mengembangkan lingkup pengawasan APIP, dan membantu menguatkan akuntabilitas organisasi K/L/Pemda.		manajemen organisasi K/L/Pemda) yang memberikan pengawasan dan arahan fungsional kepada APIP.					
		26	Kami telah ikut berkontribusi dalam pembentukan dan kinerja badan pengawas independent dengan cara merekomendasikan atribut-atribut keanggotaan, membantu pengembangan aturan, menyediakan dukungan kesekretariatan dan mengarahkan agenda.					
		27	Kami telah mengembangkan kebijakan dan prosedur untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan memberikan laporan kepada badan pengawas independent tersebut.					
		28	Kami telah mengembangkan peran badan pengawas independent dalam memberikan rekomendasi terhadap penunjukkan dan pemberhentian pimpinan unit kerja kami.					
		29	<i>Internal Audit Charter</i> telah mencakup aturan mengenai pengawasan terhadap unit kami oleh badan pengawas independent.					
LEVEL 5								
Adanya independensi, kemampuan, dan kewenangan yang penuh	1. APIP telah menunjukkan independensi, kemampuan dan kewenangan yang penuh.	30	Kami telah memiliki independensi, kemampuan dan kewenangan penuh yang telah diformalkan dalam peraturan dan mandat dengan dukungan manajemen dan badan pengawas independent, dalam menentukan ruang lingkup, melaksanakan dan mengomunikasikan hasil pengawasan.					
		31	semua ucapan dan Tindakan jajaran pimpinan organisasi K/L/Pemda, badan pengawas independent, dan semua					

			pemangku kepentingan telah menunjukkan penerimaan dan dukungan penuh terhadap keberadaan unit kerja kami.					
		32	Budaya organisasi K/L/Pemda secara nyata mengakui dan menerima nilai-nilai dan peran dari pengawasan intern.					
		33	Kami telah membandingkan indikator kunci keberhasilan (<i>key success factor</i>) struktur tata kelola kami dengan praktik yang berlaku <i>universal</i> (misal landasan hukum, mandat dari komite audit, <i>internal audit charter</i> , kebijakan organisasi).					
		34	Pemerintah RI dan organisasi K/L/Pemda telah menunjukkan komitmen nyata terkait dengan peran pengawasan intern.					

Lampiran 3 Berita Acara Proposal Dan Hasil


UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE (UMPAR)
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani Km. 6 Telp (0421) 22757 Fax. (0421) 22757 Parepare

BERITA ACARA
PELAKSANAAN SEMINAR PROPOSAL

 Pada hari ini Kamis tanggal 17 bulan 10 tahun 2024 bertempat di ruang seminar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare telah dilaksanakan Seminar Proposal Kepada :

 Nama : Meranti iis-p
 NIM : 221 200 017
 Program Studi : Akuntansi
 Bidang Konsentrasi : Audit
 Judul Penelitian : " Analisis Kapabilitas Aparat pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Menggunakan Standard Internal Audit - Capability Model "

Dengan Komisi Penguji yang terdiri dari :

 Ketua : Yusri Tarawuni SE, M.Pd, Ak. CA, CPA, ACPA
 Anggota : 1. Rika Rahma SE, M.A, CA, CPA, ACPA.
2. Hysduna SE, M.Ak
4. Darmawan SE, M, Ak, M. Ak

Hasil Seminar *)

- ☐ Diterima tanpa perbaikan
☒ Diterima dengan perbaikan
☐ Diterima dengan perbaikan Judul
☐ Ditolak dan Seminar ulang

Judul yang direkomendasikan :

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

 Parepare, 17 / 10 / 24

Mengetahui :

Ketua Penguji, 1

*) Coret yang tidak perlu

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE (UMPAR)
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani Km. 6 Telp (0421) 22757 Fax. (0421) 22757 Parepare

REKOMENDASI

Setelah memperhatikan dan meneliti secara seksama seminar yang dipresentasikan oleh :

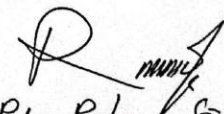
Nama : Merandi ita.p
 NIM : 221 200 017
 Program Studi : Akuntansi
 Bidang Konsentrasi : Audit
 Judul : " Analisis Kapabilitas Aparat pengawasan Internal
 Pemerintah (APIP) Menggunakan standart
 Internal Audit - capability Model "

Hasil Seminar *)

- ☐ Diterima tanpa perbaikan
☒ Diterima dengan perbaikan
☐ Diterima dengan perbaikan Judul
☐ Ditolak dan Seminar ulang

Dengan ini diajukan rekomendasi sebagai berikut:

Parepare,
 Anggota Penguji, 2


Rika Rahma, SE., M. Ak
 NBM. 1231 585

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE (UMPAR)
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani Km. 6 Telp (0421) 22757 Fax. (0421) 22757 Parepare

REKOMENDASI

Setelah memperhatikan dan meneliti secara seksama seminar yang dipresentasikan oleh :

Nama : Meranti H.S.P.
 NIM : 221 200 07
 Program Studi : Akuntansi
 Bidang Konsentrasi : Audit
 Judul : " Analisis Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal
 Pemerintah (APIP) Menggunakan Standar Internal
 Audit - capability Model "

Hasil Seminar *)

- ☐ Diterima tanpa perbaikan
☒ Diterima dengan perbaikan
☐ Diterima dengan perbaikan Judul
☐ Ditolak dan Seminar ulang

Dengan ini diajukan rekomendasi sebagai berikut:

- ① fokus penelitian.
 - poin 1 : IA - CM : jangan dihilangkan.
- ②, Tipe penelitian.
 - poin 1 : IA - CM - jangan dihilangkan.
- ③ daftar Tambahan referensi dan,
 Buku tidak dimasukkan
 pada jurnal.

Parepare,
 Anggota Penguji, 3

NBM. 105431

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE (UMPAR)

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani Km. 6 Telp (0421) 22757 Fax. (0421) 22757 Parepare

REKOMENDASI

Setelah memperhatikan dan meneliti secara seksama seminar yang dipresentasikan oleh :

Nama : Meranti S.P.
 NIM : 221 200 013
 Program Studi : Akuntansi
 Bidang Konsentrasi : Audit
 Judul : "Analisis Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal
 Pemerintah (APIP) Menggunakan Standard Internal
 Audit - Capability"

Hasil Seminar *)

- ☐ Diterima tanpa perbaikan
☒ Diterima dengan perbaikan
☐ Diterima dengan perbaikan Judul
☐ Ditolak dan Seminar ulang

Dengan ini diajukan rekomendasi sebagai berikut:

1. diperhatikan dasar yuridis dalam latar belakang.
2. Indikator dari kapabilitas.
3. Apa instrumen yang digunakan
4. perbaikan semi sar.

Parepare,
 Anggota Penguji, 4

NBM.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE (UMPAR)

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani Km. 6 Telp (0421) 22757 Fax. (0421) 22757 Parepare

BERITA ACARA PELAKSANAAN SEMINAR HASIL

Pada hari ini Sabtu tanggal 8 bulan Feb tahun 2025 bertempat di ruang seminar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare telah dilaksanakan Seminar Hasil Kepada :

Nama : Meranti iis.p
 NIM : 221 200 019
 Program Studi : Akuntansi
 Bidang Konsentrasi : Audit
 Judul Penelitian : " Analisis Kapabilitas Aporet pengurusan ^{internal} Pemerintah Menggunakan standart Internal Audit Capability Model (studi kasus pada Kantor Inspektorat Kabupaten pinrang)"

Dengan Komisi Penguji yang terdiri dari :

Ketua : 2. Y. Hasdiana, SE, M-Ak
 Anggota : 4. X. Darmawan, SE, M-El, M-Ak
1. B. Yasti Tarawiru, SE, M-Ak, Ak, CA, CPA
3. Rika Rahma, SE, M-Ak, CTA, ACPA

Hasil Seminar *)

- ☐ Diterima tanpa perbaikan
☒ Diterima dengan perbaikan
☐ Diterima dengan perbaikan Judul
☐ Ditolak dan Seminar ulang

Judul yang direkomendasikan :

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 8/2/2025

Mengetahui :

Ketua Penguji, }

Moderator

*) Coret yang tidak perlu



REKOMENDASI

Setelah memperhatikan dan meneliti secara seksama seminar yang dipresentasikan oleh :

Nama : Meranti S.S.P.
 NIM : 221 200 019
 Program Studi : Akuntansi
 Bidang Konsentrasi : Audit
 Judul : " Analisis Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Menggunakan Standar Internal Audit Capabilities Model C Studi Kasus pada Kantor Inspektori Kabupaten Pangkep)"

Hasil Seminar *)

- ☐ Diterima tanpa perbaikan
☐ Diterima dengan perbaikan
☐ Diterima dengan perbaikan Judul
☐ Ditolak dan Seminar ulang

Dengan ini diajukan rekomendasi sebagai berikut:

Parepare,
 Anggota Penguji, 2

NBM.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE (UMPAR)
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani Km. 6 Telp (0421) 22757 Fax. (0421) 22757 Parepare

REKOMENDASI

Setelah memperhatikan dan meneliti secara seksama seminar yang dipresentasikan oleh :

Nama : Meranti R.S.P.
 NIM : 221 200 017
 Program Studi : Akuntansi
 Bidang Konsentrasi : Audit
 Judul : "Analisis Kapabilitas Aparat Pengawasan Pemerintah
 Menggunakan Standard Internal Audit Capabilities
 Model C Studi Kasus pada Kantor Inspektorat
 Kabupaten Pinrang")

Hasil Seminar *)

- ☐ Diterima tanpa perbaikan
☐ Diterima dengan perbaikan
☐ Diterima dengan perbaikan Judul
☐ Ditolak dan Seminar ulang

Dengan ini diajukan rekomendasi sebagai berikut:

1. Faham manfaat dan tujuan penelitian.
2. Indikator pertanyaan untuk setiap level.
dibaca deskripsi.

Parepare,
 Anggota Penguji, 3

NBM. 223931

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE (UMPAR)
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani Km. 6 Telp (0421) 22757 Fax. (0421) 22757 Parepare

REKOMENDASI

Setelah memperhatikan dan meneliti secara seksama seminar yang dipresentasikan oleh :

Nama : Meranti iis.p
 NIM : 221 201 09
 Program Studi : Akuntansi
 Bidang Konsentrasi : Audit
 Judul : "Analisis Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal pemerintah Menggunakan standar Internal Audit Capability Model (Studi kasus pada Kantor Inspektori Kabupaten Pinarang)"

Hasil Seminar *)

- ☐ Diterima tanpa perbaikan
☒ Diterima dengan perbaikan
☐ Diterima dengan perbaikan judul
☐ Ditolak dan Seminar ulang

Dengan ini diajukan rekomendasi sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ditampung
2. Samaika dg panduan penulis

Parepare,
 Anggota Penguji, 4

NBM.

Lampiran 4 Lembar Rekomendasi Perbaikan

PERSETUJUAN REKOMENDASI PERBAIKAN SIDANG KOMISI

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa proposal penelitian atas nama:

Nama : Meranti iis.p

No. Induk Mahasiswa : 221 200 017

Program Studi : Akuntansi

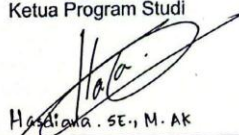
Konsentrasi : Audit

Judul Proposal : " Analisis Kapabilitas Aparat Pengawasan Pemerintah
Menggunakan Standart Internal Audit Capability "

Telah diperbaiki sesuai dengan rekomendasi dari Tim Penguji dan Perihal :

NO	PENILAI	TANDA TANGAN
1	Yasri Tarawiru, SE., M.AK., AK., CA., CTA., ACPA	1.
2	Rika Rahma, SE., M.AK., CTA., ACPA	2.
3	Hasdiana, SE., M.AK	3.
4	Darmawan, SE., M.Si, M.AK	4.

Mengetahui :
Ketua Program Studi


Hasdiana, SE., M.AK

NBM: 1213931

PERSETUJUAN REKOMENDASI PERBAIKAN HASIL

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa hasil penelitian atas nama:

Nama : Meranti iis.p
 No. Induk Mahasiswa : 221 200 019
 Program Studi : Akuntansi
 Konsentrasi : Audit
 Judul Penelitian : " Analisis Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah
 Menggunkan standart Internal Audit Capability Model" Studi
 Kasus pada Kantor Inspektorat Kabupaten pinrang)

Telah diperbaiki sesuai dengan rekomendasi dari Tim Penguji dan Perihal :

NO	PENILAI	TANDA TANGAN
1	Yasn Tarawati, SE., M. Ak., AK., CA., CTA., AC PA	1.
2	Rika Rahma, SE., M. Ak., CTA., AC PA	2.
3	Hasdiana, SE., M. AK	3.
4	Darmawan, SE., M. Si., M. AK	4.

Mengetahui :
 Ketua Program Studi

Hasdiana, SE., M. AK

NBM : 1213/21

Lampiran 5 Lembar Konsultasi Porposal, Hasil dan Skripsi



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

PROGRAM STUDI : Akuntansi

KONSENTRASI : *Audit*

NAMA MAHASISWA : Meranti iis.p

NIM : 221 200 077

JUDUL PROPOSAL PENELITIAN:

.....

.....

NO.	HARI/TGL	KONSUL KOMPREHENSIF	KONSUL PROPOSAL	PARAF PEMBIMBING

LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN SIDANG KOMISI

NO.	HARI/TGL	KONSUL KOMPREHENSIF	KONSUL PROPOSAL	PARAF PEMBIMBING

MENYETUJUI :

PEMBIMBING I,

PEMBIMBING II,

 (.....)
 NBM :

 (.....)
 NBM :



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE**

PROGRAM STUDI : Akuntansi
KONSENTRASI : Audit

NAMA MAHASISWA : Meranti iis.p

NIM : 221 200 017

JUDUL HASIL PENELITIAN : "Analisis Kapabilitas Aparat Pengawasan
: Internal Pemerintah Menggunakan Standart
: Internal Audit - Capability Model "

NO.	HARI/TGL	MATERI	PEMBIMBING	PARAF PEMBIMBING
①	14 Jan 06/01/2025	Referensi yang di laporkan ditambahkan ke df k gunakan Mendelley	5	
②	-11-	Hasil penelitian & pembahasan di tambahkan berdasarkan data penelitian	5	
③	-11-	Ace p. II	5	
④	14 Jan 13/01/2025	Sumber standart penelitian kapabilitas (dicantumkan di teknis analisis data)	1	
⑤	-11-	Tambahkan penjelasan dan tabel terkait KPA	1	
⑥	-11-	Bagian Informan diselaraskan karena menggunakan data purpos sampling	1	
⑦	-11-	Bagian pembahasan ditambahkan tabel	1	

LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN HASIL PENELITIAN

NO.	HARI/TGL	MATERI	PEMBIMBING	PARAF PEMBIMBING
5	Kamis 30/01/2025	Perbitan Bagian Hasil dan Pembahasan	/	
6	- - -	Acc P-I	/	

MENYETUJUI :

PEMBIMBING I,

PEMBIMBING II,


 (Yasri Idris, SE, M. Ak., CA, CPA, ACPA)
 NBM : 1051 110


 Rika Rahma, SE, M. Ak., CPA, ACPA
 NBM : 1231 585



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

PROGRAM STUDI : Akuntansi
KONSENTRASI : Audit

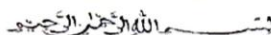
NAMA MAHASISWA : Meranti iis.p
NIM : 221 200 019
JUDUL SKRIPSI : " Analisis Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal
Pemerintah Menggunakan standart Internal Audit
Capability Model " Contoh Kasus pada Kantor Inspektorat
Kabupaten Pinrang)

NO.	HARI/TGL	MATERI	PEMBIMBING	PARAF PEMBIMBING
1		Lampirkan semua angket Pertanyaan di pembahasan	II	u
2		Acc p. II	II	u
3		Metode penelitiannya di perjelas menggunakan apa	II	u
4		Abstrak disesuaikan dgn buku panduan	II	u
5		Acc p. I	II	u

Lampiran 6 Surat Keterangan Publish Jurnal



JURNAL AK-99
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE
Alamat : Kampus II UM Parepare Gedung D Lantai 2 Jl. Jend. Ahmad Yani Km. 6 Parepare
Kode Pos 91113 Telp./Fax (0421) 22757



SURAT KETERANGAN

Nomor :012/JAK-99/FEB/KET/2025

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT. semoga segala aktivitas keseharian kita mendapat rahmat dan bernilai ibadah di sisi-Nya. Aamiin

Yang bertanda tangan dibawah ini Pengelola Jurnal AK-99 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare, menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Meranti lis. P
Nim : 221 200 017
Program Studi : Akuntansi
Judul Penelitian : Analisis Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Menggunakan Standar Internal Audit Capability Model (Studi Kasus Pada Kantor Inspektorat Kabupaten Pinrang)

Kami telah terima untuk diproses terbit pada **Jurnal AK-99** Volume 5 Nomor 2 November 2025.

Demikian Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 02 Februari 2025 M

Manager Jurnal,

Hasdiana, SE., M.Ak
NBM. 1213 431

Lampiran 7 Surat Keterangan Sebelum Meneliti dan Telah Meneliti



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (RESEARCH INSTITUTE AND COMMUNITY SERVICES)

Alamat : Gedung F3.19 Kampus II UMPAR, Jl. Jend. Ahmad Yani KM. 6 Kota Parepare, Kode Pos 91113, e-mail : lppm@umpar.ac.id

بسم الله الرحمن الرحيم

Nomor : 0430/LPPM/II.3.AU/IP/2024
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP PROV. SULSEL
di-
Makassar

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Parepare, menerangkan bahwa:

Nama : Meranti Iis P
NIM : 221 200 017
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis/Akuntansi

Adalah Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Parepare yang bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Menggunakan *Standart Internal Audit Capability Model* (Studi Kasus Pada Kantor Inspektorat Kabupaten Pinrang)".

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin penelitian kepada Mahasiswa tersebut selama 2 (dua) Bulan di Kantor Inspektorat Kabupaten Pinrang.

Atas Perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Parepare, 09 November 2024

Ketua,

Dr. Iradhatullah Rahim, M.P.
NIDN. 0926117601

Tembusan Yth.

1. Ketua BPH UMPAR
2. Wakil Rektor I UMPAR
3. Wakil Rektor III UMPAR
4. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMPAR
5. Sdri. Meranti Iis P
6. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG

Nomor : 503/0603/PENELITIAN/DPMPTSP/11/2024

Tentang

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 14-11-2024 atas nama MERANTI IIS. P, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan :

1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 1357/R/T.Teknis/DPMPTSP/11/2024, Tanggal : 15-11-2024
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0606/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/11/2024, Tanggal : 15-11-2024

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

1. Nama Lembaga : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE
2. Alamat Lembaga : JL. JEND. AHMAD YANI KM.06 PAREPARE
3. Nama Peneliti : MERANTI IIS. P
4. Judul Penelitian : ANALISIS KAPABILITAS APARAT PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH MENGGUNAKAN STANDART INTERNAL AUDIT CAPABILITY MODEL (STUDI KASUS PADA KANTOR INSPEKTORAT KABUPATEN PINRANG)
5. Jangka waktu Penelitian : 2 Bulan
6. Sasaran/target Penelitian : APARAT PENGAWASAN PEMERINTAH (APIP) DI KANTOR INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PINRANG
7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Watang Sawitto

KEDUA : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 15-05-2025.

KETIGA : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 15 November 2024



Biaya : Rp 0,-



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang





Balai Sertifikasi Elektronik



CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM



ZONA HIJAU



OMBUDSMAN



DPMPTSP



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
INSPEKTORAT DAERAH**

Jl. Gatot Subroto No. 2 Telp/Fax. (0421) 921302
PINRANG 91212

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800.2 / 32/Inspekda/1/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **H. M ASWIN, S.IP.M.Si., CGCAE**
N I P : 19710525 199203 1 007
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda, IV/c
Jabatan : Inspektur Daerah Kabupaten Pinrang
Unit Kerja : Inspektorat Daerah Kabupaten Pinrang

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya :

Nama : **MERANTI IIS.P**
NIM : **221 200 017**
Fakultas/Program Studi : **Ekonomi dan Bisnis/Akuntansi**
Judul Penelitian : **" Analisis Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Menggunakan Standar Internal Audit Capability Model (Studi Kasus pada Kantor Inspektorat Kabupaten Pinrang)."**

Bahwa benar yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Inspektorat Daerah Kabupaten Pinrang selama 02 (Dua) Bulan.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : P I N R A N G
PADA TANGGAL : 14 JANUARI 2025

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN PINRANG



H. M ASWIN, S.IP.M.Si., CGCAE

Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda, IV/c
N I P : 19710525 199203 1 007

Lampiran 8 SK dan Undangan Menguji

 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE (UMPAR) FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani Km. 6 Telp (0421) 22757 Fax. (0421) 22757 Parepare	
SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE Nomor : 470/KEP/III.3.AU/B/1446 H/2024M	
Tentang : PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE TAHUN AKADEMIK 2024/2025	
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare, setelah :	
Menimbang	: Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembimbingan Skripsi mahasiswa Program Studi Akuntansi, Program Studi Ekonomi Pembangunan, dan Program Studi Manajemen, Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun Akademik 2024/2025, dipandang perlu mengangkat Dosen Pembimbing Skripsi.
Mengingat	: 1. Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah Parepare 2. Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare
Memperhatikan	: 1. Pedoman Akademik Universitas Muhammadiyah Parepare 2. Keputusan Rapat Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare 19 September 2024
Dengan memohon Taufiq dan Inayah Allah SWT, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis	
MEMUTUSKAN	
Menetapkan	: Dosen Pembimbing Skripsi Program Studi Akuntansi, Program Studi Ekonomi Pembangunan, Program Studi Manajemen dan Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare.
PERTAMA	: Mengangkat Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Akuntansi, Program Studi Ekonomi Pembangunan, Program Studi Manajemen dan Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun Akademik 2024/2025 sebagaimana tercantum namanya pada lampiran Surat Keputusan ini.
K E D U A	: Pelaksanaan Pembimbing Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Akuntansi, Program Studi Ekonomi Pembangunan, Program Studi Manajemen dan Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare.
KETIGA	: Segala honorarium yang berhubungan dengan pelaksanaan Pembimbing Skripsi, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Universitas Muhammadiyah Parepare.
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE (UMPAR) FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani Km. 6 Telp (0421) 22757 Fax. (0421) 22757 Parepare	
KEEMPAT	: Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan, dengan ketentuan bahwa bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.
DITETAPKAN DI : P A R E P A R E PADA TANGGAL : 11 Rabiul Akhir 1446 H 14 Oktober 2024 M	
DEKAN ,  Dr. Syarifuddin Yusuf, M.Si NBM. 784 726	
Tembusan disampaikan kepada Yth : 1. Ketua BPH UMPAR 2. Rektor UMPAR 3. Masing-masing yang bersangkutan 4. Arsip	



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE (UMPAR) FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani Km. 6 Telp (0421) 22757 Fax. (0421) 22757 Parepare

Tentang : Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun Akademik 2024/2025

NO	NAMA PEMBIMBING	NIDN/NBM	JABATAN
1	Dr. Syarifuddin Yusuf, M.Si	784 726	Lektor Kepala
2	Dr. Arham, SE.,M.Ak	1030 918	Lektor
3	Dr. Yadi Arodhiskara, M.Ak	884 995	Lektor
4	Dr. Abdul Azis, SE.,M.Ak	884 994	Lektor
5	Dr. H. Parman, MM	960 810	Lektor
6	Dr. H. Irwan, MM	1148 468	Lektor
7	Dr. Nirwana Sampara, M.Si	1085 274	Lektor
8	Darmawan, SE.,M.Si., M.Ak	986 846	Lektor
9	Ruslang T, SE.,M.Si	888 895	Lektor
10	Muhammad Hatta, SE.,M.Si	1082 392	Lektor
11	Akhsan, SE.,M.Si	1086 060	Lektor
12	Yasri Tarawiru, SE.,M.Ak.,Ak.,CA.,CTA.,ACPA	1051 110	Lektor
13	Hasdiana, SE., M.Ak	1213 431	Lektor
14	Bahrudin, SE.,M.Si	1213 408	Lektor
15	Fatimah, SE., M.Si., CTA., ACPA., ZCP	1039 994	Lektor
16	Yusran Bachtiar, SE.,M.Ak	1098 943	Lektor
17	Muhammad Nur, SE.,M.Si	1156 132	Lektor
18	Hj. Nurwani, SE.,M.Ak., Ak., CA	1231 590	Lektor
19	Nuringsih, S.E.I., M.E	1262 260	Lektor
20	Lismawati, S.Sy., M.M	1201 994	Lektor
21	Agussalim, S.H.I., M.H.I	1201 997	Lektor
22	Arlianty, SE., M.Si	954 153	Lektor
23	Dr. Rusmin Nuryadin, MM	1271 286	Asisten Ahli
24	Imran Rosadi, SE., M.Si	1144 673	Asisten Ahli
25	Jumriani, SE.,M.Si	878 172	Asisten Ahli
26	Dayu Suhardi, SE., M.Si	1155 960	Asisten Ahli
27	Sudirman, ST., MM	1099 694	Asisten Ahli
28	Sariana Damis, S.Ak., M.Ak., ZCP	1309 320	Asisten Ahli
29	Rika Rahma, SE., M.Ak.,CTA.,ACPA	1231 589	Asisten Ahli
30	Firman Syah, SE., MM	1423 247	Asisten Ahli
31	Fitriyani Syukri, SE., M.Si	1309 322	Asisten Ahli
32	Andi AR, SE., MM	1536 635	Asisten Ahli
33	Fajar Ladung, SE., M.Si	1136 785	Asisten Ahli





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE (UMPAR) FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani Km. 6 Telp (0421) 22757 Fax. (0421) 22757 Parepare

34	Fitriani, SE., M.Si	1246 155	Asisten Ahli
35	Hernianti Harun, S.Ak., M.Ak	1391 047	Asisten Ahli
36	Muhammad Alwi, S.Ak., M.Ak	1416 761	Asisten Ahli
37	Kurniati Yunus, S.E., M.E	1421429	Asisten Ahli
38	Abdul Rahman Aras, S.Pd., M.E.Sy	1314 657	Asisten Ahli
39	Rudi Arafah, SE., M.Si	1148 469	Asisten Ahli
40	Deasy Soraya A. Aminartha	139 939	Asisten Ahli

DITETAPKAN DI : P A R E P A R E
PADA TANGGAL : 11 Rabiul Akhir 1446 H
14 Oktober 2024 M

DEKAN ,



Dr. Syarifuddin Yusuf, M.Si
NBM. 784 726



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE (UMPAR) FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani Km. 6 Telp (0421) 22757 Fax. (0421) 22757 Parepare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 469/III.3.AU/B/2024
Lamp : Rangkap
Hal : Undangan

Kepada Yth :
Bapak/ Ibu Dosen

Di -
Parepare

Assalamualaikum Wr.Wb

Dengan memohon petunjuk Allah SWT, Semoga aktivitas keseharian kita tetap mendapat Ridha dan Rahmat dari-Nya. Aamin.

Sehubungan dengan pelaksanaan Ujian Proposal Dan Ujian Komprehensif Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare, maka kami mengundang kepada Bapak/Ibu Dosen untuk menghadiri kegiatan tersebut, yang Insya Allah akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis - Sabtu, 17-19 Oktober 2024
Tempat : Gedung F
Pukul : 09.00 - Selesai

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan banyak terima kasih.

Wabillahi Taufiq Walhidaya
Wassalamu Alaikum Wr.Wb.

Parepare, 14 Oktober 2024

Wakil Dekan I,



R. Irsana T. SE., M.Si
NBM: 888 895

Tembusan :
1. Rektor UM Parepare
2. Arsip
3. Masing-masing Bersangkutan



SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Nomor : 169/KEP/III.3.AU/B/1446 H/2025M

Tentang :

PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare, setelah :

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Skripsi mahasiswa Program Studi Akuntansi, Program Studi Ekonomi Pembangunan, dan Program Studi Manajemen, Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun Akademik 2024/2025, dipandang perlu mengangkat Dosen Penguji Skripsi.
- Mengingat : 1. Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah Parepare
2. Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare
- Memperhatikan : 1. Pedoman Akademik Universitas Muhammadiyah Parepare
2. Keputusan Rapat Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare

Dengan memohon Taufiq dan Inayah Allah SWT, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Dosen Penguji Skripsi Program Studi Akuntansi, Program Studi Ekonomi Pembangunan, Program Studi Manajemen dan Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare.
- PERTAMA : Mengangkat Dosen Penguji Skripsi Mahasiswa Program Studi Akuntansi, Program Studi Ekonomi Pembangunan, Program Studi Manajemen dan Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun Akademik 2024/2025 sebagaimana tercantum namanya pada lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan Ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Akuntansi, Program Studi Ekonomi Pembangunan, Program Studi Manajemen dan Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare.
- KETIGA : Segala honorarium yang berhubungan dengan pelaksanaan Ujian Skripsi, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Universitas Muhammadiyah Parepare.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan, dengan ketentuan bahwa bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI : P A R E P A R E
PADA TANGGAL : 11 Ramadhan 1446 H
11 Maret 2025 M

DEKAN


Dr. Syarifuddin Yusuf, M.Si
NBM. 784 726

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua BPH UMPAR
2. Rektor UMPAR
3. Masing-masing yang bersangkutan
4. Arsip



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE (UMPAR) FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani Km. 6 Telp (0421) 22757 Fax. (0421) 22757 Parepare

Lampiran : 1 (satu)

Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare

Nomor : 169/KEP/III.3.AU/B/1446H/2025 M

Tanggal : 11 Ramadhan 1446 H bertepatan dengan tanggal 11 Maret 2025 M

Tentang : Penetapan Dosen Penguji Skripsi bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun Akademik 2024/2025

NO	NAMA PENGUJI	NIDN/NBM	JABATAN
1	Dr. Syarifuddin Yusuf, M.Si	784 726	Lektor Kepala
2	Dr. Yadi Arodhiskara, M.Ak.	848 995	Lektor
3	Dr. H. Irwan Idrus, MM.	1148 468	Lektor
4	Dr. Arham, SE., M.Ak	1030 918	Lektor
5	Dr. Abdul Azis, SE., M.Ak	848994	Lektor
6	Dr. H. Parman, MM	960 810	Lektor
7	Ruslang T, SE., M.Si	888895	Lektor
8	Darmawan, SE., M.Si., M.Ak.	986846	Lektor
9	Hj. Nurwani, SE., M.Ak., Ak.,CA	1231 590	Lektor
10	Yasri Tarawiru, SE.,M.Ak.,AK.,CA., CTA., ACPA	1051 110	Lektor
11	Fatimah, SE., M.Si., CTA., ACPA., ZCP	1039 994	Lektor
12	Hasdiana, SE., M.Ak	1213 431	Lektor
13	Arfianty, SE., M.Si	954 153	Lektor
14	Yusran Bactiar, SE., M.Ak	1098 943	Lektor
15	Akhsan, SE., M.Si	1086 060	Lektor
16	Agussalim, S.H.I., M.H.I	1201 997	Lektor
17	Nuringsih, S.E.I., M.E	1262 260	Lektor
18	Lismawati, S.Sy., M.M	1201 994	Lektor
19	Abdul Rahman Aras, M.E.Sy	1314 657	Asisten Ahli
20	Jumriani, SE., M.Si	878 172	Asisten Ahli
21	Dr. Rusmin Nuryadin, MM	1271 286	Asisten Ahli
22	Hernianti Harun, S.Ak., M.Ak.	1231 590	Asisten Ahli
23	Sariana Damis, S.Ak., M.Ak., ZCP	1309 320	Asisten Ahli
24	Rika Rahma, SE., M.Ak, CTA., ACPA	1231 589	Asisten Ahli
25	Fajar Ladung, SE., M.Si.	1136 785	Asisten Ahli
26	Andi Ar, SE., MM	1536 635	Asisten Ahli
27	Fitriani, SE., M.Si	1246 155	Asisten Ahli
28	Fitriyani Syukri, SE., M.Si.	1309 023	Asisten Ahli
29	Kurniati Yunus, S.E., M.E.	1421429	Asisten Ahli

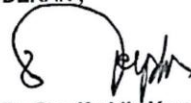
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE (UMPAR)
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani Km. 6 Telp (0421) 22757 Fax. (0421) 22757 Parepare

30	Muh. Alwi, S.Ak., M.Ak	1416 761	Asisten Ahli
31	Imran Rosadi, SE., M.Si	1144 673	Asisten Ahli
32	Muhammad Nur, SE., M.Si	1156 132	Asisten Ahli
33	Firman Syah, SE., MM	1423 247	Asisten Ahli
34	Sudiman, ST., MM	1099 694	Asisten Ahli
35	Deasy Soraya A. Aminartha Putri, SE., MM	0009128408	Penata Muda

DITETAPKAN DI : P A R E P A R E
 PADA TANGGAL : 11 Ramadhan 1446 H
 11 Maret 2025 M

DEKAN,


 Dr. Syarifuddin Yusuf, M.Si
 NBM. 784 726



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE (UMPAR)
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani Km. 6 Telp (0421) 22757 Fax. (0421) 22757 Parepare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 119/III.3.AU/B/2025

Lamp : Rangkap

Hal : **Undangan Menguji**

Kepada Yth :

Yasri Tarawiru, SE., M.Ak., Ak.,

CA., CTA., ACPA

Rika Rahma, SE.,

M.Ak., CTA., ACPA

Hasdiana, SE., M.Ak

Darmawan, SE., M.Si., M.Ak

Ketua Penguji

Anggota Penguji

Anggota Penguji

Anggota Penguji

Di

Parepare

Assalamualaikum Wr.Wb

Dengan Rahmat Allah SWT, bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu pada Ujian Hasil yang akan dipresentasikan oleh saudara(i):

Nama Mahasiswa : Meranti Iis, P.

Nim : 221200017

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Audit

Judul : Analisis Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Menggunakan Standart Internal Audit Capability Model (Studi Kasus Pada Kantor Inspektorat Kabupaten Pinrang)

Insya Allah dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Sabtu, 8 Februari 2025

Tempat : F.2.6

Jam : 10.00-11.00

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan banyak terima kasih.

Wabillahi Taufiq Walhidaya
Wassalamu Alaikum Wr.Wb.

Parepare, 5 Februari 2025

Wakil Dekan I,

Ruslanq T, SE., M.Si.
NBM: 888 895

Tembusan :

1. Arsip
2. Masing-masing Bersangkutan



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE (UMPAR)
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani Km. 6 Telp (0421) 22757 Fax. (0421) 22757 Parepare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 174/III.3.AU/B/2025

Lamp : Rangkap

Hal : **Undangan Menguji**

Kepada Yth :

Yasni Tarawiru, SE., M.Ak., Ak.,

Ketua Penguji

CA., CTA., ACPA

Rika Rahma, SE.,

Anggota Penguji

M.Ak., CTA., ACPA

Hasdiana, SE., M.Ak

Anggota Penguji

Darmawan, SE., M.Si., M.Ak

Anggota Penguji

Di

Parepare

Assalamualaikum Wr.Wb

Dengan Rahmat Allah SWT, bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu pada Ujian

Skripsi yang akan dipresentasikan oleh saudara(i):

Nama Mahasiswa : Meranti Iis, P.

Nim : 221200017

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Audit

Judul : Analisis Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal
 Pemerintah Menggunakan Standart Internal Audit
 Capability Model (Studi Kasus Pada Kantor
 Inspektorat Kabupaten Pinrang)

Insya Allah dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 14 Maret 2025

Tempat : R. FEB

Jam : 14.30-15.00

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan
 banyak terima kasih.

Wabillahi Taufiq Walhidaya
 Wassalamu Alaikum Wr.Wb.

Parepare, 12 Maret 2025

Wakil Dekan I,

Ruslang T. SE., M.Si.
 NBM: 888 895

Tembusan :

1. Arsip
2. Masing-masing Bersangkutan

Lampiran 9 Surat Keterangan Plagiasi



PERPUSTAKAAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Kampus II: Jl. Jend. Ahmad Yani Km. 6 Parepare Telp (0421) 22757

SURAT KETERANGAN

Nomor : 068 PERPUSTAKAAN UMPAR/1.3/B/M-P/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Pariman Parid, S.I. Pust

NBM : 1277 093

Jabatan : Kepala Perpustakaan UMPAR

Menerangkan bahwa :

Nama : MERANTI IIS.P.

Nim : **221 200 017**

Fakultas/Prodi : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis/Akuntansi

Hasil Similarity : 25 % (Dua Puluh Lima Persen)

Judul : Analisis Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Menggunakan Standart Internal Audit Capability Model (Studi Kasus Pada Kantor Inspektorat Kabupaten Pinrang)

Telah melakukan pengecekan kesamaan menggunakan aplikasi turnitin. Dengan ini menerangkan bahwa hasil similarity tersebut adalah **Benar** Sebagaimana terlampir. Adapun Kebenaran bebas plagiat merupakan tanggung jawab penulis dengan menandatangani pernyataan Bebas plagiat yang menjadi dokumen terpisah bersama hasil karya tulis Skripsi/Tesis/Disertasi*. Penulis wajib dan bersedia dimintai pertanggungjawaban terkait klaim dalam karya tulis ini.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 1 Februari 2025

Kepala Perpustakaan,



Pariman Parid, S.I. Pust

NBM : 1277 093

Tembusan Yth.

Arsip

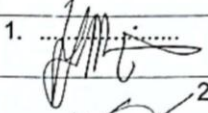
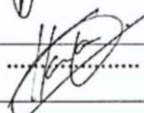
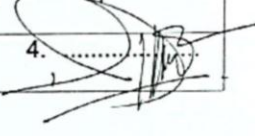
Lampiran 10 Persetujuan Rekomendasi Perbaikan Skripsi

PERSETUJUAN REKOMENDASI PERBAIKAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa ujian skripsi atas nama:

Nama : Meranti iio. p
 No. Induk Mahasiswa : 221 200 07
 Program Studi : Akuntansi
 Konsentrasi : Audit
 Judul Skripsi : " Analisis Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Menggunakan Standart Internal Audit Capability Model "C studi kasus pada Kantor Inspektorat Kabupaten pirang)

Telah diperbaiki sesuai dengan rekomendasi dari Tim Penguji dan Perihal :

NO	PENILAI	TANDA TANGAN
1	Yasri Tarawitua, SE., M.AK., AK., CA., CTA., ACPA	1. 
2	Rifa Rahma, SE., M.AK., CTA., ACPA	2. 
3	Hasdiana, SE., M.AK.	3. 
4	Darmawan, SE., M.Si., M.AK.	4. 

Mengetahui :
Ketua Program Studi


Hasdiana, SE., M.AK

NBM: 1213931

RIWAYAT HIDUP



Meranti iis.p dilahirkan di Samarinda pada tanggal 24 Juli 2003, anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Pudding dan Hj. Haisah. Bapak, Ibu, dan Kakak sudah lama meninggal dunia. Bapak saya meninggal pada saat saya masih kelas 2 SD, Ibu saya meninggal pada saat saya kelas 2 SMA, dan Kakak saya meninggal pada saat saya tamat SMA.

Sejak itu saya hanya tinggal sendiri di dunia ini dengan kata lain yatim piatu. Saat ini saya bertempat tinggal di Desa Lome Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan.

Penulis menempuh Pendidikan dimulai dari SDN 263 Lome tahun 2009, kemudian lanjut ke SMPN 1 Patampanua tahun 2015, Kemudian lanjut ke SMA yakni MAN pinrang tahun 2018 dan melanjutkan Pendidikan pada perguruan tinggi di Universitas Muhammadiyah Parepare (UMPAR) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) pada Program Studi Akuntansi pada tahun 2021. Dan insya allah kedepannya lanjut untuk kuliah profesi lagi. Aminn ya rabbal alaminnn.